

EDISI #53 MARET 2025

SBY, PRABOWO, JOKOWI BERSATU LAHIRKAN DANANTARA

LANGKAH JITU
DEDI
MULYADI
ATASI BANJIR
JABAR

AYO
BERSAMA
DAN
BERSATU
BANGUN
SUMSEL!

PUNYA JIWA
PETARUNG,
MENTAN YAKIN
100% DENGAN
KEMAMPUAN
HD

PIDATO
PRESIDEN
PRABOWO SAAT
PELUNCURAN BPI
DANANTARA

PEMERINTAH
KURANG
DANA, KEREK
ROYALTI
MINERBA

MENYUSURI
KAMPUNG
ARAB AL
MUNAWAR
PALEMBANG



Rp75.000,-

info indonesia

www.infoindonesia.id

Network



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **info** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia





Mengucapkan
Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1446 H

EDISI
BULAN
MARET
2025

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia terbentuk sudah. Sarana perjuangan untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional, bahkan keutuhan Indonesia sebagai negara-bangsa di tengah ketidakpastian geopolitik global.



22

INFO SUMSEL

Pasangan Herman Deru-Cik Ujang (HDCU), Gubernur-Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2025-2030 mengajak seluruh elemen masyarakat Sumsel kembali bersama dan bersatu melupakan semua perbedaan yang ada pasca dilantiknya HDCU sebagai pemimpin Sumsel lima tahun ke depan.



32

INFO DAERAH

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan Jawa Timur dalam lima tahun ke depan.



72

INFO NASIONAL

Kementerian Transmigrasi menjajaki kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan (LPDP Kemenkeu) untuk membangun sumber daya manusia unggul melalui program Transmigrasi Patriot.



58

INFO EKONOMI

Presiden Prabowo meminta aplikator untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pengemudi ojek daring atau ojol yang diberikan dalam bentuk tunai.



66

INFO ISTANA

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Masa 100 hari pertama setelah pelantikan berakhir pada penghujung Januari 2025. Bagaimana dengan komitmen pemberantasan korupsi?



87

INFO KHUSUS

Meski dalam situasi efisiensi anggaran, pemerintah pusat maupun banyak pemerintah daerah menyelenggarakan mudik gratis bagi warga yang memerlukannya. Untuk mudik gratis fasilitas pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan menjadi penyelenggara utamanya. Kepadatan mudik diprediksi mulai berlangsung sejak Jumat, 21 Maret 2025.

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

50 INFO WISATA

54 INFO OLAHRAGA

64 INFO BUKU

86 KAJI

38

INFO DAERAH

Tidak hanya karena intensitas hujan, tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kurang tepat dan lahan hijau yang minim juga menjadi penyebab terjadi banjir di beberapa daerah kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).



MUDIK

Sedikit saja yang dapat menjadi pembahasan dari beragam dinamika ekonomi dan politik di sekitar kita belakangan ini. Begitu banyak peristiwa saling terkait di tataran global, regional, nasional, lokal yang kita alami bersama. Belum lagi dinamika bidang lain semisal penegakan hukum dan dampak perubahan iklim.

Namun, untuk bidang ekonomi politik, momentum Maret 2025 yang beriringan dengan Ramadan 1445 hijriyah, siklus perjalanan mudik, pulang ke kampung halaman, dan arus baliknya, akan melibatkan begitu banyak warga. Dari pengalaman 2-3 tahun sebelumnya, perjalanan mudik dan arus balik pada 2025 akan melibatkan lebih dari 100 juta jiwa. Kementerian Perekonomian malah memproyeksikan pergerakan mudik kali ini akan mencapai 180 juta orang, dan 110 juta antaranya juga akan mengeluarkan belanja wisata selama periode mudik dan arus balik.

Toh musim mudik kali ini didahului dengan deflasi berturut-turut pada Januari dan Februari 2025. Deflasi, sebagai pengingat saja, merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami penurunan secara terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Badan Pusat Statistik menyebutkan deflasi dua bulan berturut-turut awal 2025 kali ini berkaitan dengan diskon tarif listrik 50 persen. Namun, muncul pula kekhawatiran bahwa deflasi juga menandakan daya beli masyarakat yang menurun.

Alhasil, pemerintah mengambil kebijakan menebar stimulus (pemacu atau perangsang) agar ekonomi bergairah. Mudik adalah momentum yang pas untuk menerapkan stimulus itu. Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutnya sebagai Stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025. Salah satunya adalah diskon harga tiket pesawat terbang hingga 14 persen dari tarif normal. Tanggapan positif pun datang dari berbagai maskapai penerbangan. Garuda Indonesia dan Citilink, Lion Air, dan Air Asia sudah mengemukakan akan memberlakukan diskon tiket di masa mudik dan arus balik pada periode 25 Maret sampai dengan 7 April 2025.

Selain insentif untuk perjalanan udara, pemerintah juga menerapkan diskon tarif tol hingga 20 persen untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Diskon ini berlaku untuk ruas tol utama yang menjadi jalur mudik. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, termasuk penyediaan rest area yang memadai dan layanan informasi real-time bagi para pemudik.

Tambahan pula, program-program diskon lainnya untuk produk sandang dan pangan yang menargetkan belanja hingga Rp100 triliun selama periode Ramadan dan Lebaran kali ini. Khusus untuk pangan, pemerintah pun berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok yang dapat dikendalikan. Antara lain dengan operasi pasar melalui jaringan Kantor Pos kelolaan PT Pos Indonesia.

Kita sungguh berharap upaya menebar stimulus perekonomian di masa mudik dan arus balik ini akan mencapai tujuannya. Selanjutnya, perekonomian nasional tumbuh stabil dan meningkat secara bertahap sesuai dengan harapan semula. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781
● FAX 021-791 96786

Twitter : @InfoIndonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadhri, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



SELAMAT BERJUANG DANANTARA

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia terbentuk sudah. Sarana perjuangan untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional, bahkan keutuhan Indonesia sebagai negara-bangsa di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Maka tak kurang dari Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 & 12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, hadir dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kelak lembaga investasi milik negara ini mudah diingat sebagai Danantara atau Danantara Indonesia.

Namun, kehadiran sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan pula legitimasi (pengesahan dan restu) pembentukan Danantara sudah

men ketiga, Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.

"Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden RI menandatangani UU No. 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," ungkap Presiden Prabowo dalam acara yang disiarkan langsung di saluran YouTube Sekretariat Presiden..

Selanjutnya, sambung Presiden,

Melalui Danantara, untuk pertama kalinya pengelolaan BUMN di Indonesia akan diurus dalam satu holding perusahaan besar. Dividen BUMN sebagai salah satu kekayaan negara akan dikelola Danantara untuk memajukan Indonesia. Peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis oleh negara di Indonesia. Danantara juga dinilai menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.

Badan investasi ini diharapkan ope-



kokoh dalam genggaman pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Prosesnya pun berlangsung tanpa banyak rintangan.

Bermula dengan penandatanganan tiga dokumen oleh Presiden Prabowo Subianto menandai lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Tiga dokumen itu, pertama, Undang-Undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kedua, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Berikutnya, doku-

"Saya juga menandatangani Keppres No. 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia."

Nah, dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga dengan diluncurkan Danantara. Ia mengatakan badan pengelola investasi ini menjadi yang terbesar di dunia. "Semua patut bangga dengan total aset lebih dari US\$ 900 miliar. Danantara akan jadi dana kekayaan negara terbesar di dunia," kata Prabowo dalam sambutannya usai peluncuran BPI Danantara.

rasionalnya bakal mirip seperti holding Temasek dari Singapura. Danantara akan mengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi bagi masyarakat.

Toh Presiden Prabowo memahami banyak pihak yang masih meragukan Danantara. Menurut Prabowo, ini adalah hal yang wajar karena Danantara sebelumnya belum pernah ada. "Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak," ungkapnya.

Menurut Presiden, keraguan itu mer-

upakan hal wajar atau lumrah saja. “Karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya,” sambung Presiden.

Namun, upaya untuk membentuk badan investasi negara (SWF, Sovereign Wealth Fund) merupakan gagasan yang sudah bertahun-tahun menjalani uji coba. Kementerian Keuangan, misalnya, pernah membentuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai cikal-bakal SWF Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007.

Pembentukan PIP mengacu pada skema SWF yang dimiliki oleh Singapura, yakni Government Investment Center (GIC) dan Temasek Holding, serta Khazanah di Malaysia. PIP mendapatkan suntikan modal awal sebesar Rp 4 triliun. Setelah berdiri hampir delapan tahun, PIP dilikuidasi pada 2015 karena investasinya dinilai tidak berkembang seperti harapan pemerintah. Penutupan PIP dikukuhkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.06/2015 yang ditandatangani Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 21 Desember 2015. “Dalam perjalanannya, GIC, Temasek, dan Khazanah bisa berjalan karena negaranya kelebihan cadangan devisa,” kata Menkeu Bambang kala itu.

Cadangan devisa Indonesia dinilai terbatas, sehingga kemampuan investasi PIP tidak maksimal. Selain itu, status PIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) membuat sumber anggarannya terbatas hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Aset-aset PIP senilai Rp 18,4 triliun dialihkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang akan dijadikan bank infrastruktur. Aset yang dialihkan berupa kas dan investasi langsung. Kas meliputi dana tunai investasi, dana geothermal, dan dana lainnya yang sebelumnya dikelola PIP.

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Peraturan ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Desember 2020. PP Nomor 74 Tahun 2020 ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 15 Desember 2020. Dijelaskan dalam PP ini, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) adalah lembaga yang diberi kewen-

gan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan,” bunyi Pasal 5. LPI merupakan Badan Hukum Indonesia

yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagaimana ketentuan PP, LPI dapat menggunakan nama “Indonesia Investment Authority” yang disingkat INA.

Lembaga ini berfungsi mengelola investasi dan bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi investasi. Adapun kewenangan LPI seba-



gaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) adalah: a. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan; b. menjalankan kegiatan pengelolaan aset; c. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (trust fund); d. menentukan calon mitra investasi; e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau f. menatausahakan aset.

"Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud, LPI dapat melakukan kerja sama dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau

gotakan Menteri BUMN serta tiga orang lainnya yang berasal dari unsur profesional. "Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," ditegaskan pada Pasal 9 ayat (2).

Sementara itu, Dewan Direktur LPI berjumlah lima orang yang seluruhnya berasal dari unsur profesional. Dewan ini bertugas menyelenggarakan pengu-
rusan operasional LPI. Wewenang yang dimiliki Dewan ini antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan LPI, melaksanakan kebijakan dan pengurusan

lukan waktu.

"Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Indonesia Investment Authority (INA) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan yang lain-lain itu pada akhirnya nanti akan masuk ke dalam Danantara. Tetapi ini diperlukan satu proses yang lebih panjang karena INA juga didasarkan pada Undang-Undang," ungkap Burhanuddin, dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 15 Februari 2025.

Sedangkan Danantara, sambungnya, dibutuhkan segera untuk meningkatkan investasi di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara lain. Ia menyebut bahwa sejak kemerdekaan, rata-rata investasi asing di Indonesia tidak melebihi US\$ 100 per kapita, jauh di bawah Vietnam yang mencapai US\$ 400 per kapita.

Burhanuddin menilai salah satu penyebabnya adalah ketidakpastian regulasi dan kondisi dalam negeri yang belum tertata dengan baik, sehingga investor enggan menanamkan modalnya. Padahal, BUMN Indonesia memiliki aset yang sangat besar, mencapai Rp16 ribu triliun atau sekitar 1 triliun dolar. Angka ini setara dengan total aset yang dikelola oleh Temasek dan GIC, dua institusi keuangan utama milik Singapura.

Dengan aset sebesar itu, Burhanuddin meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi melalui leverage di pasar investasi. Konsolidasi BUMN di bawah Danantara diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Tujuan utama pembentukan Danantara adalah mengoptimalkan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui konsolidasi ke dalam satu dana investasi nasional. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan mekanisme yang lebih terintegrasi dalam mengelola aset negara agar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara. Selain itu, Danantara juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi berbagai sektor dan lapisan masyarakat.



lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri," bunyi Pasal 7 ayat (2). Disebutkan di Pasal 8, organ lembaga ini terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direktur.

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh Dewan Direktur. Dewan ini diketuai oleh Menteri Keuangan (merangkap anggota) dan berang-

operasional LPI, serta mewakili LPI di dalam dan di luar pengadilan.

Nah, setelah Danantara terbentuk, sejumlah lembaga investasi seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) disebut-sebut akan bergabung ke dalam Danantara. Toh Ketua Tim Pakar sekaligus Inisiator Danantara, Burhanuddin Abdullah, mengemukakan prosesnya memer-

Danantara memiliki visi untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia melalui pengelolaan investasi berkelanjutan. Sebagai pengelola investasi terkemuka, dengan BUMN sebagai enabler dalam penempatan investasinya, Danantara berupaya membangun Sovereign Wealth Fund yang berdaya saing global. Tujuannya adalah mendukung pembangunan nasional serta menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam mencapai visi tersebut, Danantara menetapkan lima misi utama:

Mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip good governance untuk mendorong kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan misi Asta Cita:

Mengoptimalkan dan mengelola aset BUMN strategis guna menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di sektor-sektor strategis.

Menarik dan mengakselerasi investasi domestik maupun internasional untuk memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Membangun institusi Sovereign Wealth Fund yang mandiri dan unggul, dengan tata kelola keuangan yang sehat serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN akan berada di bawah pengelolaan Danantara, yaitu: Pertamina (PT Pertamina Persero), PLN (PT Perusahaan Listrik Negara Persero), BRI (PT Bank Rakyat Indonesia Tbk), BNI (PT Bank Negara Indonesia Tbk), Mandiri (PT Bank Mandiri Tbk), Telkom Indonesia (PT Telkom Indonesia Tbk), dan MIND ID (Mining Industry Indonesia).

Dengan terbentuknya Danantara, diharapkan pengelolaan aset negara dapat lebih terarah, transparan, dan profesional, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi pembangunan nasional. Selain itu, kehadiran Danantara juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan kekayaan negara, serta mendukung per-

tumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sedangkan sasaran konkret pembentukan Danantara antara lain:

1. Penciptaan lapangan kerja

Kehadiran Danantara diproyeksikan dapat menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Hal ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor industri.



2. Mengundang Investasi

Danantara berpotensi menarik investasi hingga 618 miliar USD. Dengan jumlah investasi sebesar ini, Indonesia dapat memperkuat sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Kontribusi terhadap PDB

Program yang dikelola Danantara diprediksi akan berkontribusi ter-

hadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 235,9 miliar USD. Dampak ini akan memperkuat perekonomian negara dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

4. Peluang ekspor yang besar

Dengan adanya Danantara, peluang ekspor Indonesia diperkirakan meningkat hingga 857,9 miliar USD. Hal ini dapat memperluas akses produk-produk lokal ke pasar internasional dan meningkatkan devisa negara.

Presiden Prabowo optimistis bahwa Danantara akan menjadi motor penggerak utama bagi perekonomian Indonesia di masa depan. Menurut dia, Danantara merupakan bentuk konsolidasi dari seluruh kekuatan ekonomi yang dikelola oleh BUMN. Karena itulah, Danantara berperan pula menjaga daya tahan ekonomi nasional, bahkan kesinambungan Indonesia sebagai negara-bangsa. ● Editor: GE

PIDATO PRESIDEN PRABOWO SAAT PELUNCURAN BPI DANANTARA

Teks lengkap pidato Presiden Prabowo akan lebih menjelaskan postur, substansi, dan tujuan pembentukan BPI Danantara. Berikut kutipannya:

"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bulan Agustus ini, bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia akan dengan bangga akan merayakan 80 tahun kemerdekaan. Selama delapan dekade, kita telah menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Namun, kita tidak pernah goyah dalam mewujudkan visi membangun Indonesia yang

Setelah 80 tahun merdeka, mengapa masih ada anak-anak kita yang kelaparan? Mengapa para petani dan nelayan kita masih berjuang untuk mendapatkan hasil yang layak dari kerja keras mereka? Mengapa setelah 8 dasawarsa masih ada desa dan kota yang belum tersentuh listrik? Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada?



FOTO: FOTO: SETPRES

sejahtera.

Kita telah berkorban begitu banyak demi menjaga negara kesatuan republik Indonesia dan menegakan cita-cita luhur yang menjadi dasar berdirinya bangsa kita. Namun, di tengah perayaan atas capaian yang telah kita raih, kita juga harus berani menghadapi kenyataan, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri.

Dan yang lebih penting bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini. Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Ini lah kenyataan yang harus kita akui, karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran.

Keberanian untuk melihat kekurangan-kekurangan kita. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan tuhan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama kita.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Azas-azas ini harus menjadi pedoman kita dan memang telah menjadi pedoman kita.

Dalam memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, asas-asas inilah yang membimbing pekerjaan saya dan menjadi dorongan utama bagi saya dalam menjalankan amanah konstitusional dengan dedikasi dan efektivitas yang setinggi-tingginya. Mengatasi tantangan-tantangan ini, memerlukan respon yang berani dan strategis, itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting.

Karena Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekadar sebuah dana investasi, melainkan instrumen, alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin kami berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun rupiah, hampir US\$20 miliar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran kini dana tersebut akan

dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional, sebagai bagian dari industrialisasi kita, dan hilirisasi kita.

Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita. Menciptakan manfaat nyata lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang

ings funds that were previously strapped by inefficiencies, corruption, and misallocation, but will now be channeled into national projects, creating real long-term benefits for our people

Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan



berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam kita murah, kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju, we have already proven our commitment to managing Indonesia's wealth and assets with careful financial discipline and responsible governance. In our first 100 days, my administration secured over 20 billion US dollars in sav-

korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu.

Prinsip yang sama akan menjadi pondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah sesuatu yang baru. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan, industri pertambangan.

Pendahulu-pendahulu kita, telah lama investasi dalam sektor-sektor strategis. Presiden pertama kita, mendirikan IPB karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno pernah mengatakan kita tidak boleh mengizinkan kelaparan yang ada di Indonesia, presiden pertama pun yang membesarkan ITB karena kita untuk merdeka, untuk sejahtera harus menguasai teknologi, presiden kedua meneruskan pembangunan dan semua Presiden-presiden kita membawa kita sampai kita sekarang hari ini bisa meluncurkan Danantara Indonesia.

Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo semua telah memberi peran dan sumbangan yang

Saya memahami, bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia, mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya, namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari US\$900 miliar, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth funds di dunia.

I know and realize that there are many questions about Danantara Indonesia. This is to be expected because this is a new initiative, unprecedented in our history. Today, all Indonesians can be proud to learn that with total assets of more than 900 billion US dollars under management, Danantara Indonesia will be one of the world's largest sovereign

menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian Indonesia. Gelombang pertama investasi senilai US\$20 miliar dalam kurang lebih proyek strategis miliaran dolar akan difokus pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur serta energi terbarukan.

Inilah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita dan kemandirian bangsa kita. Pembangunan danantara Indonesia menandai era baru bagi badan usaha milik negara yang kita pandang bukan hanya sebagai entitas bisnis tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan.

Fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance



Saya yakin dan percaya, Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat, dan lebih bersatu dari sebelumnya.

sangat besar bagi bangsa Indonesia dan sekarang jatuhlah kepada kami untuk mengamankan pondasi-pondasi yang telah dibangun dan untuk meneruskan mencapai cita-cita kita menjadi negara sejahtera, rakyat kita makmur aman dalam keadilan.

Saudara-saudara sekalian, kini setelah hampir 80 tahun berlalu, tibalah generasi kita pemerintah kita untuk mewujudkan visi para pendiri dan pendahulu kita, kita harus memastikan bahwa kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat dan dirasakan manfaatnya untuk kepentingan rakyat dan bisa meningkatkan tingkat penghasilan rakyat Indonesia.

wealth funds.

Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara, kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing.

Perusahaan yang kompetitif, profesional dan terintegrasi dalam perekonomian global, kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 100. Membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar pengikut, tapi Indonesia juga dapat

yang terbaik. BUMN harus mengedepankan inovasi gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus, menjaga disiplin kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Kolaborasi antara danantara Indonesia, BUMN dan mitra sektor swasta dan UMKM serta koperasi akan menjadi kunci dalam memaksimalkan peran mereka dalam pembangunan nasional.

Namun, ikhtiar kita terhadap danantara Indonesia tidak berhenti di dalam negeri saja, Danantara Indonesia juga akan menjadi agen bagi peran global Indonesia yang semakin kuat, melalui inisiatif ini kita akan menjalin kemitraan strategis dalam energi terbarukan, in-

frastruktur, pendidikan, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di tingkat global serta berkontribusi bagi kesejahteraan dan stabilitas regional dan dunia.

Para tamu undangan yang saya hormati, para duta besar, para tokoh-tokoh bangsa yang hadir di sini, dan pemimpin-pemimpin dari semua kalangan dan semua sektor, Danantara Indonesia menyampaikan kepada dunia bahwa kita siap untuk bekerja sama. Indonesia sent a clear message to all friends and partners worldwide, Indonesia is open for collaboration, open for business, open for investment, and open to shared prosperity. Danantara Indonesia will allow us to expand our international cooperation, and I hope that all global partners will recognize Indonesia's potential not just as an emerging economy but also as a pillar of regional stability and shared progress.

Hari ini saya bangga dengan bangsa saya, saya bangga kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara Indonesia, karena ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dengan Daya Anagata Nusantara, yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan bagi nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia. Yang artinya adalah, Danantara Indonesia, adalah untuk anak dan cucu kita. Dan antara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia.

Saya yakin dan percaya, Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat, dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat.

Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka!" • Editor: GE

DANANTARA DI ANTARA LEMBAGA INVESTASI NEGARA LAINNYA

Berbagai lembaga kajian telah menyusun daftar Sovereign Wealth Fund (SWF), dana investasi khusus kelolaan sebuah negara, berdasarkan nilai asetnya. Salah satu yang menyusunnya adalah lembaga analisis dan riset independen, Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI). merilis daftar 10 sovereign wealth fund (SWF) dengan aset terbesar di dunia. Aset yang besar memungkinkan negara pemilik SWF berinvestasi di berbagai sektor, seperti saham, obligasi, di dalam maupun luar negeri.

Nah, dalam, daftar SWFI, Norway Government Pension Fund Global (GPF) asal Norwegia menempati peringkat pertama dengan total aset mencapai US\$1.738 miliar. Posisi kedua dan ketiga daftar ini diduduki oleh dua SWF dari Tiongkok: China Investment Corporation (CIC) yang memiliki aset sebesar US\$1.332 miliar, serta SAFE Investment Company (SIC) dengan US\$1.090 miliar.

Peringkat berikutnya adalah Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dari Uni Emirat Arab, kemudian Kuwait Investment Authority (KIA). Masing-masing memiliki aset US\$1.057 miliar dan US\$1.029 miliar.

Public Investment Fund (PIF) asal Arab Saudi dengan aset sebesar US\$925 miliar, berada di peringkat keenam. Sedangkan GIC Private Limited asal Singapura yang memiliki aset sebesar US\$800,8 miliar duduk di posisi ketujuh.

Indonesia berada di peringkat kedelapan melalui BPI Danantara, yang mengelola hingga US\$600 miliar. Hal ini mencerminkan langkah investasi strategis Indonesia dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya Qatar Investment Authority dengan US\$526,1 miliar, serta Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio mencatatkan US\$514,4 miliar.

Masuknya BPI Danantara di daftar 10 besar SWF berdasarkan aset menjadi tantangan untuk menunjukkan kinerja hasil investasi yang sepadan. Pada saatnya akan kita lihat bersama-sama. • Editor: GE



SEMOGA SUKSES MENEMBUS BERBAGAI HAMBATAN

Di balik pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara, tersembul harapan lembaga itu dapat menerobos berbagai hambatan. Sekaligus memupus keraguan.

Belum banyak kisah bagaimana sampai pendiri Hedge Fund Bridgewater Associates Raymond Thomas Dalio, dengan nama ringkas Ray Dalio, hingga menjadi salah satu penasihat Danantara. Namun Ray, yang terdaftar dalam 100 orang terkaya di dunia, hadir di acara World Governments Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, pertengahan Februari 2025.

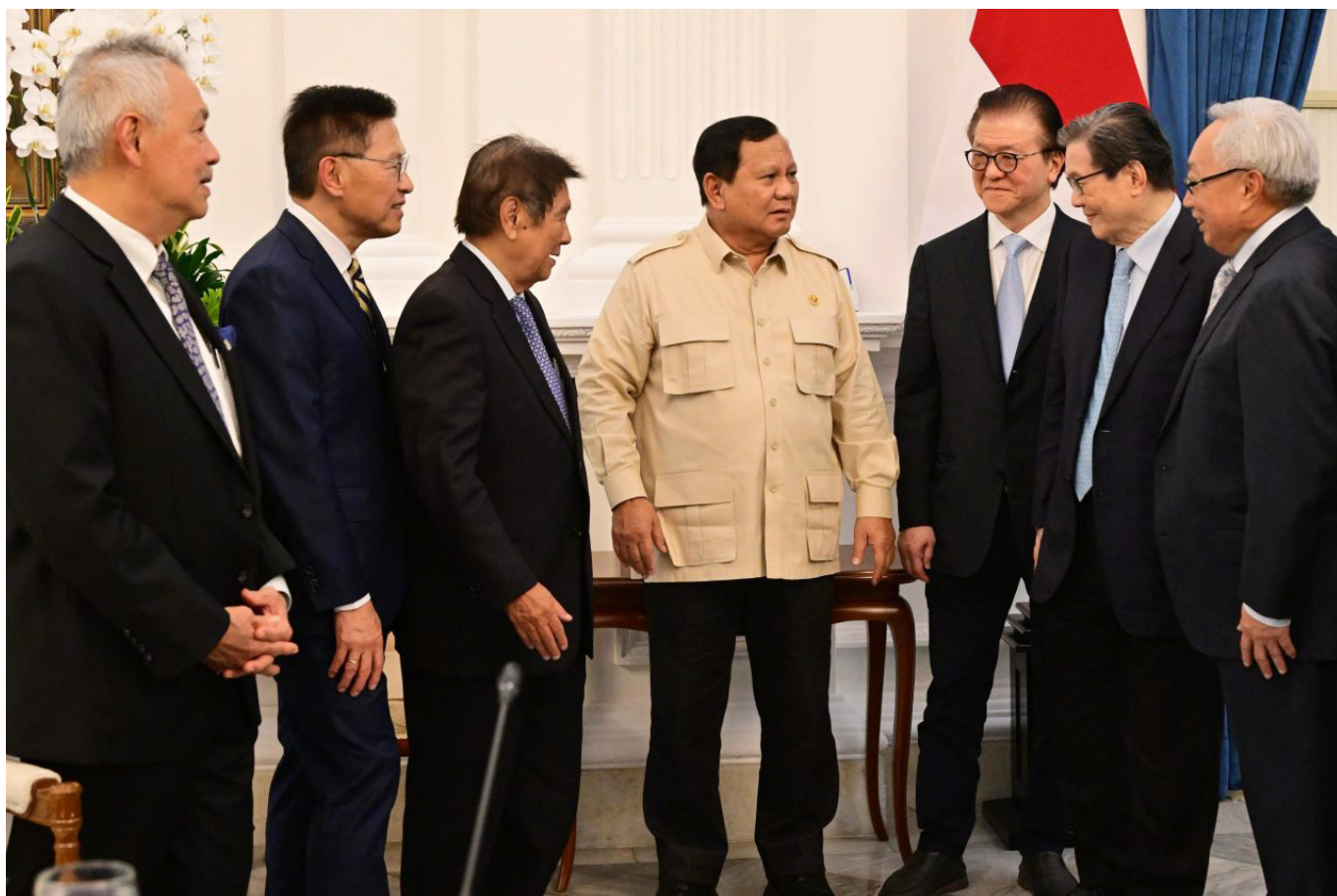
Di forum itu Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam jaringan (daring) internet. Malah Ray Dalio menanggapi pidato Presiden.

Kantor Berita Nasional Antara melaporkan, Ray Dalio penasaran mengenai rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, penelitian dan pengembangan, serta inovasi yang penyebabnya

terutama tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia.

Menanggapi Ray Dalio, Presiden Prabowo mengakui tingkat korupsi di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan telah menjadi masalah dasar bagi penurunan kinerja di semua sektor. "Saya yakin bahwa masalah dasar kami adalah telah terjadi semacam, saya tidak tahu, apakah itu penurunan kepemimpinan moral, penurunan kepemimpinan sosial. Namun, tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan," kata Prabowo.

Presiden pun bertekad untuk menggunakan seluruh energi dan wewenang yang dimiliki untuk mencoba mengatasi korupsi, yang dinilai sebagai penyakit, serta akar dari seluruh penurunan kinerja di berbagai sektor



tersebut. Pada forum itu, Kepala Negara berkomitmen teguh untuk memberantas korupsi dan maladministrasi. Menurut Prabowo, dibutuhkan keberanian untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta mengakui bahwa korupsi tersebut sebagai kelemahan dan kekurangan di negara ini.

Setelah 100 hari menjalankan pemerintahan, Prabowo juga menyoroti tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah dari masyarakat yang cukup tinggi, yakni mencapai 81 persen, melampaui persentase kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden. Ia menilai bahwa masyarakat telah menerima pesan terkait upaya pemerintah agar tidak satu pun individu dapat kebal hukum.

"Tindakan kami telah membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Mereka yang dianggap tidak tersentuh kini dimintai pertanggungjawabannya," kata Prabowo.

Prabowo pun mengungkapkan bahwa segala bentuk korupsi, seperti penyalahgunaan dana pemerintah, penggelapan, pajak rendah yang han-

ya berpihak pada pengusaha, telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Prabowo pun mengungkapkan alasannya untuk melakukan efisiensi di kementerian/lembaga hingga 20 miliar dolar AS, untuk mengalokasikan dana tersebut dalam berbagai proyek strategis dan berkelanjutan,

"Setelah 100 hari, saya berhasil menghemat 20 miliar dolar AS. Saya yakin bahwa jika saya tidak menyimpan uang itu, uang itu akan hilang begitu saja. Saya menghadapi beberapa perlawanan dari birokrasi yang mengangap diri mereka tak tersentuh, tetapi saya bertekad untuk bergerak, saya bertekad untuk menegakkan hukum," ujar Prabowo.

Selanjutnya pada Jumat, 7 Maret 2025, sepekan lebih setelah peresmian berdirinya Danantara, Ray malah muncul di Istana bertemu dengan kalangan pemerintah dan swasta terkemuka Indonesia. Dalam pertemuan itu hadir sejumlah menteri dan para pengusaha swasta di Indonesia guna membahas

strategi pengelolaan aset nasional, serta peningkatan investasi di Indonesia.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsolidasi kekuatan ekonomi Indonesia melalui entitas baru yaitu Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang baru meluncur. Presiden mengemukakan Danantara ini dikonsolidasikan untuk mengintegrasikan aset-aset negara guna meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat global.

"Danantara ini kita konsolidasikan untuk melaksanakan suatu perbaikan, suatu peningkatan dalam kinerja, dengan melakukan suatu perbaikan-perbaikan, di mana perlu perbaikan dan kita akui sendiri bahwa kita banyak perlu perbaikan semuanya supaya kinerja aset-aset kita cukup baik," ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menekankan pula bahwa keterbukaan terhadap pandangan kritis serta pengalaman para investor dan profesional global sangat penting dalam pengelolaan aset Indonesia ke depan. Lebih lanjut, Pres-



iden Prabowo berharap semua entitas ekonomi dapat dilaksanakan dengan efisien dan mampu bersaing dengan semua entitas di dunia.

"Dengan demikian saya mengundang tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang di bidang swasta yang sudah punya pengalaman sendiri puluhan tahun dalam manajemen, dalam investasi, dalam pengelolaan untuk bersama-sama dengan pemerintah. Sehingga nanti pelaksanaan daripada Danantara ini akan dilakukan dengan cermat dan dengan teliti. Saya kira itu pembukaan dari saya," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyoroti peluncuran sover-

vestor di dunia yang dikenal dengan wawasan mendalam dalam strategi investasi dan manajemen aset. Kehadirannya di Indonesia diharapkan dapat memberikan perspektif yang berharga dalam optimalisasi pengelolaan aset negara serta menarik lebih banyak investasi ke Tanah Air.

"Saya rasa kami memang memerlukan nasihat-nasihat yang kritis ini, saya rasa kuncinya untuk bisa bagaimana kemajuan di dunia ini bisa selalu kami cari, dan di mana kami selalu memerlukan nasihat-nasihat kritis dan juga keberanian untuk belajar dari satu sama lain. Saya rasa inilah kuncinya," tandas Presiden.

mengambil kendali dan membuat reformasi yang sangat sulit untuk mengatasi tantangan-tantangan korupsi, serta merevitalisasi negara-negara tersebut," kata Ray Dalio sebagaimana dikutip Kantor Berita Nasional Antara.

Dalam kesempatan itu, Ray Dalio menilai Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang tepat untuk membawa Indonesia menuju negara maju. Dia meyakini bahwa Indonesia mempunyai sejumlah potensi untuk ke luar dari status negara berkembang.

"Saya telah berbicara langsung dengan Bapak Prabowo dan menurut saya Bapak Prabowo adalah orang yang tepat dan beliau membuat saya datang



eign wealth fund (SWF) Indonesia yang baru dan mengundang Ray Dalio untuk berbagi wawasan bersama. Selain itu, Kepala Negara juga mengundang Ray Dalio untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi Indonesia.

"Saya baru saja menjelaskan bagaimana kami sangat beruntung Anda dapat hadir di sini dengan pengalaman-pengalaman Anda, dengan berbagai pengalaman yang sangat jelas dan luas di Ekonomi global, dengan berbagai pengalaman di Asia, di Timur Tengah dan di dunia. Serta kami sangat beruntung dengan anda hadir di sini sebagai seorang sahabat," kata Presiden Prabowo kepada Ray Dalio.

Ray Dalio merupakan salah satu in-

Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk bergerak cepat. Meski begitu, langkah ini tetap memerlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam mengelola aset serta mengembangkan ekonomi nasional.

Sedangkan Ray Dalio mengemukakan sejumlah hambatan yang perlu diatasi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Tantangan tersebut antara lain tata kelola birokrasi, kemampuan menghasilkan modal, kemudahan berbisnis dan berwirausaha, serta strategi memberantas korupsi.

"Di beberapa negara, yang saya lihat transisi itu terjadi. Saya tahu arti penting seorang pemimpin yang mampu

ke sini untuk bertemu dengan Anda secara langsung," ucap Ray Dalio di hadapan jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan beberapa pengusaha Indonesia.

Dia menambahkan, "Saya mengikuti perkembangan dunia. Saya menyaksikan apa yang terjadi. Saya bukan akademisi, saya bukan investor makro. Saya menyadari hal tersebut, tetapi yang saya lihat dari situasi ini, potensi itu ada dan saya senang dapat berkontribusi, dapat melakukan ini."

Ray Dalio dikabarkan akan masuk dalam struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pelak-

sana atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani usai pertemuan dalam kesempatan yang sama.

"Insya Allah," ujar Rosan menjawab pertanyaan media soal kepastian Ray Dalio sebagai Dewan Penasihat Danantara.

Rosan Roeslani menjelaskan, kehadiran investor kawakan Ray Dalio untuk membagikan pengalaman tentang investasi kepada para taipan.

Ray Dalio disebut-sebut bakal menjadi Dewan Penasihat Danantara bersama mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair, yang sebelumnya juga dipastikan oleh Rosan Roeslani. "Kalau hari ini, (Ray Dalio) datang ke sini, kemudian beliau sharing dengan kami, kemudian dengan ini, tentunya beliau juga apa, kalau saya bilang ya alhamdulillah lah, tadi kita sih sudah salam, itu saja."

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kepastian Ray Dalio bergabung dengan Danantara, Rosan Roeslani kemudian menjawab dengan isyarat berupa mengangkat kedua ibu jari tangannya, seakan-akan mengiyakan pertanyaan media.

Sebelumnya, Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik Presiden Prabowo, Hashim Sujono Djohadikusumo menyatakan harapannya supaya tokoh-tokoh global, salah satunya Ray Dalio bisa masuk ke dalam struktur kepengurusan Danantara. "Semoga sosok-sosok seperti Ray Dalio dan Bridgewater Associates dapat bergabung (dengan Danantara)," kata Hashim di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Dia beranggapan bahwa keberadaan para tokoh global seperti Ray Dalio diharapkan mampu menarik banyak penanam modal untuk bekerja sama dengan Danantara dalam berbagai proyek yang ramah lingkungan dan layak. Tujuannya, lanjut dia, guna mendukung transisi energi hijau di tanah air. "Gagasannya untuk mengundang banyak investor untuk bekerja sama dalam berinvestasi pada proyek-proyek yang layak," ungkap Hashim.

Danantara sendiri sudah menuntaskan penyusunan pengurusnya. Presiden Prabowo bertindak sebagai

Pembina dan Penanggung Jawab. Sedangkan Dewan Penasihat Danantara mendudukkan antara lain mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Di Badan Pengawas, bertindak sebagai Ketua adalah Erick Thohir dan Wakil Ketua Badan Pengawas: Muliaman Darmansyah Hadad. Sedangkan di Badan Pelaksana duduk sebagai Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO): Rosan Perkasa Roeslani, Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria, dan Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO): Pandu Patria Sjahrir.

Dari dalam negeri, kalangan ekonom dan lembaga kajian sudah

Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara. Ia mengungkapkan prasyarat utama sebuah perusahaan investasi yang mengelola dana jumbo seperti BPI Danantara bisa bekerja dengan baik adalah lepas dari kepentingan politik. Sayangnya, struktur BPI Danantara tidak mengimplikasikan demikian.

Dia mencontohkan, Danantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden seperti yang tercantum dalam Pasal 3E draf UU BUMN hasil revisi tertanggal 4 Februari 2025. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. Masalahnya, Dewan Pengawas berhak memberhentikan badan pelak-



mengemukakan pandangan kritisnya. Namun, pandangan itu lebih banyak menyoroti aspek legal. Lembaga kajian Center of Economics and Law Studies (Celios) misalnya menerbitkan laporan studi "Permasalahan dan Risiko Hukum pada Regulasi Pembentukan Danantara yang ditulis oleh Muhammad Saleh dan disunting oleh Bhima Yudhistira Adhinegara.

Celios dalam laporan itu mengemukakan setidaknya lima masalah legal terkait pembentukan Danantara. Lembaga kajian ini juga menyampaikan 11 rekomendasi terkait masalah legal Danantara.

Sebelumnya, peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan melihat pemerintah akan sangat dengan mudah melakukan intervensi politik kepada pengurus Badan Pengelola

sana (CEO, COO, dan CIO) BPI Danantara seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h revisi UU BUMN.

"Jadi manajemen Danantara itu tetap di bawah pengaruh atau pengawasan dari Kementerian BUMN," ujar Deni dalam media briefing Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, Selasa, 25 Februari 2025.

Nah, kembali lagi ke perspektif bisnis Ray Dalio mengenai kendala yang menghambat Indonesia menjadi negara maju: tata kelola birokrasi, kemampuan menghasilkan modal, kemudahan berbisnis dan berwirausaha, serta strategi memberantas korupsi. Semoga Danantara dapat menerobos kendala itu dengan penyesuaian-penyesuaian tanpa gejolak yang tidak perlu. • Editor: GE

DANANTARA DAN MANAJEMEN RISIKO

Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Apa saja faktor kunci keberhasilan agar Danantara berjalan mulus? Bagaimana Danantara dilihat dari sisi manajemen risiko?

Pembentukan Danantara itu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU 19/2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan DPR pada 4 Februari 2025.

Danantara adalah super holding BUMN yang mirip sovereign wealth funds (SWF), seperti Temasek di Singapura. Pembentukan Danantara bertujuan mendorong optimalisasi pengelolaan aset negara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan di pelbagai sektor, seperti energi terbarukan, industri hilir, manufaktur canggih, dan produksi pangan.

Danantara akan mengelola aset Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN. Tujuh BUMN itu adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, Telkom Indonesia, dan MIND ID, BUMN holding industri pertambangan Indonesia.

Awalnya, Danantara akan mengelola aset dari INA dan tujuh BUMN mencapai USD900 miliar atau sekitar Rp14.670 triliun dengan asumsi nilai tukar rata-rata Rp16.300 per dollar AS.

Apakah Danantara sama persis dengan Temasek? Danantara dibentuk berdasarkan pada UU, sedangkan Temasek tidak. Temasek tidak bertanggung jawab kepada Perdana Menteri atau Presiden Singapura. Temasek berbentuk perseroan terbatas layaknya perusahaan pada umumnya. Karena itu, pembentukannya cukup dengan pendaftaran pendirian perusahaan dan tidak bergantung pada proses politik di parlemen ataupun pemerintah.

Ada perbedaan alasan dalam pembentukan Danantara dan Temasek. Danantara dibentuk dengan harapan mengkonsolidasikan seluruh aset BUMN di seluruh penjuru Tanah Air dalam satu badan dan mengefisienkan pengelolaan kekayaan negara. Maka, Danantara bertanggung jawab kepada presiden.

Di sisi lain, Temasek awalnya didirikan dengan tujuan menjadi lapisan pelindung dari pengaruh politik. Pemerintah Singapura ingin memisahkan urusan politik dengan komersial agar BUMN tak bisa menjadi instrumen politik (Luther Lie, Kompas, 4 Desember 2024).

Lagi-lagi, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi supaya Danantara berjalan mulus?

Pertama, satu hal yang wajib dipenuhi adalah penentuan kriteria pengurus Danantara. Ini amat penting dan mendesak.

Mengapa? Karena Danantara akan mengelola aset begitu besar dari tujuh BUMN raksasa.

Bagaimana kriteria calon pengurus Danantara? Calon pengurus Danantara wajib memiliki integritas tinggi. Hal itu sebagai benteng utama dalam mengelola dana yang begitu besar. Calon juga wajib mempunyai kompetensi tinggi dalam bidang ekonomi, keuangan, perbankan, investasi, hukum, dan atau manajemen aset.

Selain itu, calon pengurus wajib profesional dan independen dalam arti tidak memiliki afiliasi ke partai politik. Pun, calon pengurus tidak memiliki hubungan keluarga dengan penyelenggara negara. Kriteria itu semua akan mendukung profesionalitas calon dalam menjalankan tugasnya. Tanpa profesionalitas tinggi, fungsi Danantara akan mandek.

Kedua, Danantara juga wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola (good corporate governance/GCG). Hal itu akan mendorong Danantara dapat menjalankan bisnis secara profesional, efektif, dan efisien. Dengan demikian, Danantara memiliki daya saing yang

kokoh di mata investor global.

Ketiga, ingat bahwa risiko negara (country risk) juga penting untuk dipertimbangkan. Selama ini, risiko negara Indonesia termasuk moderat (moderate risk) dan belum pernah tercatat risiko rendah (low risk). Risiko negara merupakan suatu cara pengukuran mengenai tingkat ketidakpastian politik dan ekonomi dalam suatu negara yang dapat berdampak pada nilai pinjaman dan investasi di negara tersebut (Alan C Shapiro, 1998).

Karena itu, pemerintah perlu menggeber peringkat risiko negara agar makin rendah. Mengapa? Lantaran kian rendah risiko negara, investor global akan kian tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk menghasilkan tingkat risiko negara, lembaga peringkat mengelompokkan komponen risiko negara ke dalam tiga risiko, yaitu politik, ekonomi, dan finansial. Setiap kategori risiko itu memiliki kontribusi 50 persen untuk risiko politik, 25 persen masing-masing untuk risiko ekonomi dan risiko finansial.

Artinya, risiko politik merupakan faktor dominan dalam penilaian risiko negara. Tingkat risiko negara yang meliputi risiko amat rendah, rendah, moderat, tinggi, dan amat tinggi itu merupakan gambaran yang lebih obyektif mengenai kondisi suatu negara.

Sarinya, pemerintah wajib menggenjot komponen risiko politik, seperti stabilitas pemerintahan, profil investasi, tingkat korupsi, peran militer dalam politik, hukum dan ketertiban sosial, tingkat demokratisasi, dan kualitas birokrasi.

Komponen risiko ekonomi, antara lain meliputi pendapatan per kapita, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil, inflasi

OLEH: PAUL SUTARYONO

Pengamat Perbankan

Assistant Vice President BNI (2005-2009)

Staf Ahli Pusat Studi Bisnis (PSB) Universitas

Prof Dr Moestopo (UPDM)

tahunan, tingkat keseimbangan APBN, dan transaksi berjalan. Komponen risiko finansial meliputi rasio utang luar negeri terhadap PDB, debt service ratio, rasio transaksi berjalan dengan ekspor barang dan jasa, cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar. Hal itu juga menjadi pertimbangan bagi lembaga peringkat terkemuka, seperti S&P, Moody's atau Fitch Rating dalam menentukan peringkat suatu negara.

Keempat, beberapa hari terakhir ini di media sosial muncul imbauan tarik dana dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI yang tergabung dalam Danantara. Hal itu menyiratkan bahwa pemerintah harus segera melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Danantara. Bagaimana struktur organisasi Danantara? Bagaimana koordinasi, kedudukan, serta hubungan pekerjaan antara pengurus Danantara dan direksi tiga bank BUMN?

Dalam operasional perbankan, direksi tiga bank BUMN tersebut sudah semestinya tetap independen. Jangan sampai Danantara ikut cawe-cawe. Apakah direksi tiga bank BUMN itu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Danantara?

Itu semua penting untuk dipahami nasabahnya. Buah manisnya, tingkat kepercayaan nasabahnya terhadap bank lekas pulih kembali karena bisnis perbankan berbasis kepercayaan (trust). Simpanan bank dijamin LPS. Akhirnya, imbauan tarik dana pun akan pupus.

Kelima, dengan berpayung pada UU BUMN, BPI Danantara disebut tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik.

BPK serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dapat memeriksa jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sebaliknya, Presiden Prabowo akan mengajak mantan Presiden Indonesia, seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo, untuk ikut mengawasi Danantara (Tempo.com, 21/2/2025).

Model pengawasan demikian dapat dikatakan jauh dari profesional. Hal itu dapat menimbulkan benih-benih kasus penyelewengan uang negara atau korupsi. Padahal semua lembaga keuangan negara diawasi DPR.

Katakanlah Bank Indonesia (BI), meski independen, tetap diawasi oleh DPR melalui Badan Supervisi BI sebagai perpanjangan tangan DPR. Badan Supervisi BI adalah badan yang dibentuk untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi

pengawasan di bidang tertentu di BI untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan.

Demikian pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diawasi DPR melalui Badan Supervisi OJK dan Badan Supervisi LPS.

Keenam, untunghlah pemerintah telah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara. PP itu sebagai aturan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2025 untuk menjadi petunjuk pelaksanaan operasional Danantara. Tanpa itu, Danantara belum dapat menjalankan fungsinya.

Ketujuh, dipandang dari sudut manajemen risiko, model pengawasan Danantara seperti itu dapat mengundang potensi risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi

dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Tujuan final manajemen risiko adalah melindungi aset organisasi, termasuk sumber daya manusia, properti, keuangan, dan reputasi.

Pengawasan semacam itu bisa membawa potensi risiko operasional. Apa itu risiko operasional? Risiko operasional sebagai risiko yang berkaitan dengan operasional bisnis yang meliputi dua komponen risiko.

Satu, risiko kegagalan operasional (operational failure risk) atau risiko intern terdiri dari risiko yang bersumber dari sumber daya manusia, proses, dan teknologi. Dua, risiko strategi operasional (operational strategic risk) atau risiko ekstern yang berasal dari faktor-faktor antara lain politik, pajak, regulasi, pemerin-

tah, masyarakat, dan kompetisi (Michel Crouhy, Dan Galai & Robert Mark, 2000).

Dengan bahasa lebih bening, pengawasan Danantara seperti itu bisa mendorong lahirnya risiko operasional yang kedua, yakni risiko strategi operasional yang bersumber dari faktor politik, regulasi, dan pemerintah.

Untuk itu, Danantara sudah seharusnya diawasi BPK, BPKP, dan KPK sekaligus. Sungguh, tidak sepatutnya mantan presiden diajak menjadi pengawas Danantara.

Nah, ketika aneka faktor kunci keberhasilan tersebut telah terpenuhi dengan saksama, amat diharapkan fungsi utama Danantara dapat berjalan lancar. ●





AYO BERSAMA DAN BERSATU BANGUN SUMSEL!

Pasangan Herman Deru-Cik Ujang (HDCU)), Gubernur- Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2025-2030 mengajak seluruh elemen masyarakat Sumsel kembali bersama dan bersatu melupakan semua perbedaan yang ada pasca dilantik-nya HDCU sebagai pemimpin Sumsel lima tahun ke depan.

Persaingan politik telah usai dan saat ini kembali bersama-sama membangun Sumatera Selatan agar lebih maju lagi.

"Saatnya saya mengajak masyarakat Sumsel untuk move on dan melupakan perbedaan. Bagi para pemenang kontestasi Pilkada jangan merasa gembira tak terkendali dan bagi yang belum menang supaya menyadari bahwa semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk bergandengan tangan membangun Sumsel," ucap Herman Deru.

Ia pun berharap kepemimpinan HDCU kedepan terus kompak dan bersatu padu dalam memimpin Sumsel.

"Alhamdulillah, ini semua semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan Saya dan Pak Cik Ujang sebagai pasangan Guber-

nur dan Wakil Gubernur. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala bantuan, doa dan support untuk memenangkan HDCU sebagai pemimpin Sumsel 2025-2030," kata Herman Deru.

Menurut Herman Deru saat ini bagi HDCU merupakan fase untuk mewujudkan apa saja yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

"Izinkan Saya dan pak Cik Ujang untuk kembali memimpin Sumsel dengan target tercapainya visi misi yang kami dengarkan seirama dengan kebijakan nasional dan selaras dengan harapan masyarakat dari berbagai unsur baik dari segi usia dan profesi," imbuhnya.

Herman Deru secara khusus juga meminta agar masyarakat Sumsel dapat selalu mengiringi kepemimpinan

HDCU dengan doa agar amanah yang diemban ini dapat dijalankan dengan baik.

"Kami berdua adalah manusia biasa yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu doakan dan sertai kami dalam mewujudkan Sumsel Maju Terus Untuk Semua," tandasnya.

Gelar Sosialisasi Lewat Safari Ramadan

Salah satu upaya HDCU untuk mengajak masyarakat Sumsel kembali bersatu yakni dengan melakukan Safari Ramadan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BUMN/BUMD, tokoh agama/ masyarakat Tahun 1446 H/2025 di berbagai tempat.

Seperti dilakukan Masjid Ar-Ra'iyah

DPRD Provinsi Sumsel. Pada Safari Ramadhan yang disini dengan sholat isya dan tarawih berjamaah kali ini, Gubernur Herman Deru dalam arahan singkatnya mengungkapkan kalau kegiatan ini menjadi sarana dalam mempererat silaturahmi utamanya di kalangan Forkopimda dan masyarakat umat muslim di Sumsel.

"Melalui kegiatan Safari Ramadhan ini, kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia ini. Sebagai sarana menjaga ukhuwah Islamiah dalam kebersamaan," ucap Herman Deru.

Lebih lanjut Herman Deru menegaskan, selama lebih kurang 1,5 tahun dirinya tidak menjabat sebagai Gubernur pasca habisnya masa jabatan periode pertama.

"Untuk itu pada masa jabatannya di periode kedua ini, Saya bersama Cik Ujang mohon diterima kembali dalam mendorong majunya pembangunan Sumsel," harap Deru.

Herman Deru juga mengajak para Forkopimda untuk bersama-sama menjaga kondusifitas daerah.

"Utamanya di bulan ramadhan ini menjaga kecukupan kebutuhan pokok sehingga harga tetap stabil dan inflasi tetap terjaga," tambah Herman Deru.

Herman Deru juga mengajak jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumsel dapat melibatkan stafnya masing-masing pada kegiatan Safari Ramadhan berikutnya.

"Safari Ramadhan berikutnya setiap instansi melibatkan stafnya agar semakin meriah. Meski kita efisiensi tapi saya kira untuk kegiatan seperti ini tidak menjadi soal," tandasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Diniandie mengucapkan selamat pelantikan atas dilantikannya H Herman Deru dan Cik Ujang (HDCU) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2025-2030.

"Insya Allah dibawah kepemimpinan HDCU Sumsel akan semakin maju," harapnya.

Dia menyebut kegiatan Safari Ramadhan seperti ini perlu dilakukan sebagai sarana silaturahmi antara Forkopimda dan umat muslim di Sumsel.

Pada kesempatan itu turut hadir para Forkopimda Sumsel lainnya diantara-

nya Kapolda Irjen Andi Rian Ryacudu Djajadi, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kajati Sumsel atau yang mewakili.

HDCU juga kembali melanjutkan Safari Ramadhan 1446 Hijriah di Masjid As-Sa'adah Mapolda Sumsel.

"Saya secara pribadi dan kelembagaan mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumsel yang telah menyelenggarakan Safari Ramadhan ini," ucap Herman Deru.

solusi untuk dalam membangun Sumsel," tambahnya.

Selain itu lanjut Herman Deru, Safari Ramadhan juga menjadi sarana bertukar pikiran dan mencari solusi secara langsung dengan bertatap muka sebagai bagian dari syiar Islam.

"Melalui Safari Ramadhan kita harapkan dapat meningkatkan Ukhuwah Islamiyah, wathaniyah dan basyariyah," tandasnya.

Sementara itu Kapolda Sumsel Irjen



Herman Deru berharap kegiatan seperti ini terus digelar secara berkesinambungan sebagai sarana silaturahmi menjalin keakraban sehingga menimbulkan inspirasi baru bagi kemajuan Sumsel ke depan

"Yang kita ambil hikmahnya dari Safari Ramadhan ini adalah bisa berkumpul dan bersilaturahmi untuk dapat saling bertukar pikiran dan mencari

Pol Andi Rian Djajadi mengatakan bahwa kegiatan Safari Ramadhan 1446 Hijriah di Polda Sumsel merupakan program yang telah disusun jauh hari sebelumnya.

"Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan dan seluruh puasa kita dibulan suci ramadhan ini mendapatkan pahala yang setimpal oleh Allah SWT," pungkasnya. ● Adv

PUNYA JIWA PETARUNG, MENTAN YAKIN 100 PERSEN DENGAN KEMAMPUAN HD

Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia Dr Andi Amran Sulaiman menyebut Sumatera Selatan (Sumsel) dapat menempati posisi teratas sebagai provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia, bahkan melampaui Pulau Jawa.

Dengan jiwa petarung yang dimilikinya, Mentan Andi Amran merasa yakin 100 persen pada kemampuan Gubernur Herman Deru untuk meningkatkan pertanian di Sumatera Selatan bahkan menjadi yang terbesar di Indonesia.

aku percaya bisa, Sumsel jadi peringkat satu menjadi lumbung pangan Indonesia," ucap Mentan pada Rapat Koordinasi luas tambah tanam dan penyerapan gabah sekaligus Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian.

Lahan Rawa (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR), untuk di Provinsi Sumsel pada tahun 2025 ini penambah luas tanamnya mencapai 150.000 hektar. Untuk lokasi luas tanahnya, terdapat di daerah Kabupaten OKI dan Kabupaten Musi Banyuasin.



Menurut Mentan, selain Provinsi Sumsel memiliki potensi luas panen yang cukup besar pada tahun 2025, kemudian hasil kerja keras para petani dan insan pertanian, daerah ini juga dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkomitmen penuh dalam meningkatkan produktivitas padi.

"Kami ingin Provinsi Sumsel menjadi nomor satu terbaik nasional daerah penghasil beras terbesar. Ini Gubernur Sumsel adalah petarung, dan pasti akan menyelesaikan masalah. Pak Gubernur

Mentan Andi menegaskan, pertanian yang diprioritaskan oleh Kementerian Pertanian meliputi provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Papua Selatan.

"Ini menjadi terbesar kita rancang pertaniannya, untuk menjadi lumbung pangan nasional, dan Insya Allah pasti meningkat minimal nomor 3 nanti kedepan," katanya.

Mentan mengungkapkan, Pemerintah berupaya meningkatkan produksi beras nasional melalui Program Optimalisasi

"Kita butuh 1 juta untuk tambahan, tahun ini 150.000 tetapi nanti pengembangan 1 juta hektar, mudah-mudahan bisa selesai selama 5 tahun," tambahnya.

Mentan mendukung penuh Sumsel dalam mempercepat tercapainya swasembada pangan, terkhusus Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg), hal ini juga diharapkan menambah semangat petani di Provinsi Sumsel.

"Kami mengajak semua pihak untuk dapat berkolaborasi bersama-sama, penyuluh pertanian lapangan juga harus bergerak bersama-sama. Penyuluh kita akan suport mereka kita ingin mereka berkompetisi, nanti kedepan kalau berhasil swasembada bahkan ekspor. Dari 37.000 penyuluh kami siapkan 5000 sampai 10.000 motor untuk PPL yang terbaik," tandasnya.

Siap Wujudkan Target

Sementara Gubernur Provinsi Sumsel Herman Deru menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian Pertanian yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terhadap wilayahnya.

Menurutnya, program dari Kementan turut membangun sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Terima kasih kami pada Bapak Menteri dan jajaran yang sudah begitu perhatian kepada provinsi Sumatera Selatan, terutama diberikan program Serasi (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani. Sebelumnya provinsi Sumsel pada peringkat 8 produksi berasnya, dengan adanya program serasi menjadi peringkat 5, yang InsyaAllah akan jadi peringkat 3 minimal," ungkapnya

Gubernur Herman Deru mengakui merasakan sentuhan seluruh jajaran Kementerian Pertanian terhadap pertanian khususnya di Provinsi Sumsel. Herman Deru mengungkapkan di masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Herman Deru - Cik Ujang akan bertekad dengan apa diinstruksikan sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian.

"Provinsi Sumsel mengangkat penyuluh dengan biaya APBD Provinsi sejak saya menjabat 2019 kemarin berjumlah 2000 penyuluh," katanya

Herman Deru menyebut Provinsi Sumsel menjadi sasaran daerah lain untuk studi banding mengenai Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP).

"Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian kita semua penyuluhnya modern berbasis IT, jadi bukan yang gaptek, jadi penyuluh yang mengerti tentang marketing, mengerti tentang perbankan, juga menjadi pem-



bimbing untuk menjadi masyarakat petaninya mengerti perbankan," tambahna.

Usai Rakor, Gubernur Herman Deru mendampingi Mentan Andi Amran Sulaiman dan Wakil Mentan Sudaryono meninjau sekaligus membuka Operasi Pasar Pangan Murah (OPM) di Kantor Pos Merdeka Palembang.

Sembako yang disediakan di pasar ini diantaranya yakni beras SPHP, beras premium, minyak, gula pasir, telur, ayam, daging kerbau, bawang cabai dan berbagai produk lainnya.

Harga jualnya beras SPHP harga Rp 60.000/5 kg, minyak kita harga Rp 14.700/ liter, gula harga Rp 15.000 per kg, beras premium Rp 72.000/ 5 kg, telur Rp 27.000/ kg, ayam Rp 34 ribu per ekor dan daging kerbau harga Rp 75.000. Masing-masing produk hanya boleh dibeli maksimal 2 pcs per item.

Operasi Pasar Pangan Murah pangan ini digelar tak lain untuk menekan harga sembako yang tinggi di pasaran saat ini sehingga bisa membantu masyarakat mendapat sembako murah.

"Jarang-jarang ya Menteri sama Wamen sama-sama jalan. Dengan Gubernur Sumsel juga luar biasa, ada Direksi PT Pos, BUMN hari ini kita cek langsung Pasar Pangan Murah di Palembang, Sumsel," ujar Mentan.

Menurut Amran tidak ada alasan lagi hari ini harganya naik. Pasalnya produksi beras justru meningkat tajam tahun ini sebesar 52% dibandingkan tahun lalu berdasarkan data BPS. Begitupun stok beras saat ini mencapai 2 juta ton.

Mentan RI juga secara tegas meminta semua pengusaha tidak menjual pangan di atas HET. Jika tetap tidak diindahkan, pihaknya mengatakan tak segan menindak pengusaha dengan melakukan penyegelan. ●

GELAR OPERASI PASAR DAN MUDIK GRATIS UNTUK WARGA SUMSEL

Guna meringankan kebutuhan ekonomi saat Ramadan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar operasi pasar dan mudik gratis. Untuk kegiatan ini Pemprov Sumsel menggandeng TP PKK, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan.

Operasi Pasar Ramadhan 2025 yang diadakan Pemprov Sumsel melalui Dinas Perdagangan bersama TP PKK Sumsel ini telah dilakukan rutin setiap tahun. Ada beberapa tempat yang menjadi titik Operasi Pasar ini yaitu; pembukaan di Halaman Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel.

Selain itu pada tanggal 11 Maret di Pasar Alang-alang Lebar, 18 Maret di Pasar Talang Betutu, kemudian 21 Maret di wilayah Kerten, dan 25 Maret di Kantor Gubernur Sumsel. Terakhir penutupan akan dilaksanakan kembali di halaman Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel.

Dalam kesempatan itu Ketua TP PKK

Hj Febrita Lustia Herman Deru mengatakan kegiatan ini adalah sarana untuk membantu masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah pemenuhan bahan pokok sehari-hari selama bulan Ramadhan.

"Kegiatan ini dilakukan untuk membantu masyarakat di dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, salah satunya di bulan Ramadhan, banyak ibu-ibu yang ingin membuat kue," kata Feby.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, Henny Yulianti mengatakan secara lengkap mengenai kegiatan Operasi Pasar Ramadhan 2025.

Kegiatan operasi pasar murah ini memiliki beberapa tujuan yaitu menekan

laju inflasi daerah dengan memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan tidak mengalami lonjakan yang signifikan.

Kedua meringankan beban ekonomi masyarakat terutama menjelang hari besar keagamaan.

Ketiga memastikan ketersediaan bahan pokok dengan menjalin kerjasama antar pemerintah dengan distributor dan pengusaha agar pasokan barang tetap lancar, serta membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam sistem perdagangan daerah.

"Barang yang tersedia di Operasi Pasar Ramadhan 2025 ini beragam seperti beras Bulog SPHP, Minyak goreng, telur ayam, tepung terigu, gula pasir, cabai, bawang merah, bawang putih,



daging ayam dan daging sapi. Selain itu juga ada minuman kesehatan, sayur mayur dan buah-buahan,” jelas Henry.

Ia juga menambahkan bahwa tidak hanya bahan pangan yang tersedia, namun juga ada beberapa beberapa kerajinan seperti tas dan baju yang merupakan hasil dari produk UMKM di Sumsel.

Selain dihadiri oleh Ketua TP PKK, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua TP PKK Sumsel Hj Lidyawati, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumsel Desy Edward Candra, Perwakilan Polda Sumsel, Pimpinan Bulog Wilayah Sumsel serta organisasi lainnya.

Gelar Mudik Gratis 2025

Sementara Pemprov Sumsel melalui melalui Perhubungan (Dishub) akan



Pendaftaran on-line mudik gratis menggunakan Bus akan dibuka pada tanggal 17 Maret 2025 mendatang.

membuka pendaftaran online peserta mudik gratis 2025.

“Pendaftaran online mudik gratis menggunakan Bus akan dibuka pada tanggal 17 Maret 2025 mendatang,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, Ari Narsa JS di kantor Gubernur.

Untuk Keberangkatan lanjut Ari, nantinya akan dilepas langsung Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijadwalkan tanggal 27 Maret 2025 mendatang.

Mudik Gratis ini menggunakan moda transportasi Bus yang dilakukan di Terminal Alang-alang Lebar.

Sedangkan bagi pemudik menggunakan kereta api akan diberangkatkan dari stasiun Kertapati Palembang.

Dia merinci untuk transportasi kereta api akan melayani rute Palembang-Prabumulih-Muara Enim- Lahat, Tebing tinggi dan Lubuk Linggau sebanyak 5 gerbong dalam 1 rangkaian dengan

muatan 520 orang.

Sedangkan rute Palembang-Prabumulih-Baturaja-Martapura-Tanjung Karang disediakan 5 gerbong 1 rangkaian dengan total muatan sama yaitu 520 orang.

“Untuk tanggal 28 Maret, akan ada tambahan 1 gerbong dalam 1 rangkaian tambahan dengan rute Prabumulih-Muara Enim-Lahat-Tebing Tinggi-Lubuk Linggau-Lampung. Diperkirakan penyediaan kursi untuk kereta api mencapai

tan dengan jurusan Palembang-Jogja, Palembang-Solo dan Palembang-Bandung.

“Sedangkan, rute untuk di pulau Sumatera tujuan Palembang-Solok, Palembang-Padang, Palembang-Padang Sidempuan dan Palembang-Medan,” jelasnya.

Khusus angkutan dalam provinsi jelas Ari, akan disiapkan angkutan dengan tujuan Palembang-Lubuk Linggau-Murata. Palembang-Muara Enim-Lahat-



total 1.500 kursi,” jelasnya.

Kemudian untuk program mudik gratis 2025 ini, pihaknya menyiapkan 424 kursi untuk penumpang angkutan Bus antar kota dan antar provinsi. Lalu, untuk angkutan antar kota dalam provinsi, ada 479 kursi.

“Sehingga total keseluruhan yaitu kurang lebih 903 kurs,” jelasnya.

Adapun rute yang akan dilayani pada mudik gratis kali ini, untuk angkutan luar Pulau Sumatera masing-masing angku-

Pagar Alam. Kemudian rute Palembang-Baturaja-Muaradua. Kemudian rute Palembang-Lahat-Tebing Tinggi.

Khusus untuk pendaftaran transportasi kereta api, akan dibuka melalui link website yang telah disediakan Bank Sumsel Babel.

“Untuk kereta api akan disediakan link website pendaftaran dari Bank Sumsel babel. Ini pun terbatas pendaftarannya. Jika sudah memenuhi kuota, maka pendaftaran akan ditutup,” tegasnya. ●

HDCU TARGETKAN CETAK 100.000 “SULTAN MUDA”

Gubernur Sumsel H. Herman Deru menargetkan akan melahirkan 100.000 Sultan Muda di Sumsel dalam program Gerak Cepat di masa kepemimpinan Herman Deru-Cik Ujang (HDCU). Melalui program tersebut mereka yakin ekonomi Sumsel akan tumbuh pesat dan lapangan pekerjaan akan terbuka lebar yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut HD, dirinya beserta Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dan berpartisipasi aktif karena keberhasilan pembangunan daerah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

Menurutnya dibutuhkan peran serta dari seluruh pihak, baik dari kalangan legislatif, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat umum dalam mendukung setiap program pembangunan terutama tetap melanjutkan Program Strategis HDCU melalui Program Gerak Cepat.

Ada 12 program cepat yang mereka gagas untuk merealisasikan keberhasilan pembangunan di Sumsel. Program-program tersebut yakni:

1. Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
2. Melanjutkan Program Berkat (Bero-bat Gratis Ber-KTP)
3. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)
4. Pendidikan yang Berkeadilan,
5. Infrastruktur Tuntas Merata,
6. Sumsel Interkoneksi,
7. 100.000 Sultan Muda Sumsel,
8. Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya,
9. Sumsel Wonderful 2030,
10. Sumsel Berintegritas dan Melayani,
11. Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak dan yang terakhir
12. Revitalisasi Pasar Tradisional.

Lebih jauh HD mengatakan Visi Misi dan Program Gerak Cepat yang mereka sampaikan tersebut tentunya telah



sesuai dengan visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu HDCU dikatakannya juga akan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Program makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan ; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Harapan kami kepada Sumatera Selatan, mari kita teruskan perjuangan

untuk pembangunan Provinsi yang kita cintai ini demi masyarakat Sumatera Selatan yang Sejahtera dan lebih maju.

Dalam kesempatan itu HDCU juga menyampaikan Kami ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membangun Provinsi Sumatera Selatan yaitu para Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, semoga tetap memberikan pengabdian terbaik untuk Sumatera Selatan yang kita cintai ini.

"Dengan penuh kesungguhan dan tekad yang kuat, Insya Allah kami Herman Deru dan Cik Ujang (HDCU) siap mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya demi Sumsel Maju Terus Untuk Semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan



tugas dan tanggung jawab ini," pungkasnya.

Rapatkan Barisan Wujudkan Sumsel Maju Terus Untuk Semua

Herman Deru menyadari sepenuhnya bahwa tanggung jawab ini bukanlah hal yang ringan, namun dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif. Namun ia yakin dapat mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, Sumsel Maju Terus Untuk Semua.

Dalam periode kedua kepemimpinan ini, mereka juga berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan dengan baik, sekaligus menghadirkan inovasi-inovasi baru guna menjawab tantangan dan dinamika pembangunan ke depan.

"Fokus utama kita adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," jelasnya.

HDCU juga menyampaikan beberapa misinya dalam periode ini yaitu:

Pertama, mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing, dengan program.

Kedua, melanjutkan "Program Berkah Plus". Kelanjutan program berkah (berobat dengan menggunakan KTP) den-

gan penambahan fasilitas rumah singgah.

Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga miskin yang sakit dengan "Program Sambang Rawat".

Keempat meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Untuk itu HDCU juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dan berpartisipasi aktif karena keberhasilan pembangunan daerah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran serta dari seluruh pihak, baik dari kalangan legislatif, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat umum dalam mendukung setiap program pembangunan. ●

SIAPKAN BANTUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

Salah satu Program Gerak Cepat atau Gercep Herman Deru dan Cik Ujang atau HDCU adalah melakukan pembangunan infrastruktur secara merata. Sebagai realisasi hal itu HD berkunjung ke berbagai daerah, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi yang pertama.

Luasnya Kabupaten OKI ini menjadi perhatian tersendiri bagi Gubernur Sumsel H. Herman Deru. Untuk itu infrastruktur jalan di Kabupaten OKI masuk dalam prioritas pembangunan dan ia siap memberikan bantuan.

Hal itu disampaikannya saat melaksanakan Safari Ramadhan 1446 Hijriah Gubernur dan Forkopimda Provinsi Sumsel di Rumah Dinas Bupati OKI, Sabtu (8/3/2025).

Dikatakannya saat menjabat Gubernur, bantuan yang diberikan kepada kab/kota berupa Bantuan Gubernur Bersifat Khusus atau dikenal Bangubsus. Bantuan ini diberikan sesuai skala prioritas kebutuhan tiap daerah.

Untuk itulah sebelum mendapatkan bantuan, tiap. Kepala Daerah harus paparan dulu kepadanya apa-apa saja yang menjadi prioritas di daerah.

Terkait kebutuhan di OKI, Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang akan merespon secepatnya secara proporsional.

Dipaparkan Herman Deru ada 3 ala-

san utama Gubernur dapat memberikan bantuan Bangubsus.

Pertama program tersebut merupakan super prioritas bagi daerah. Misalnya program yang sangat baik tapi sempat terhenti karena berganti pemimpin sehingga mangkrak.

Kedua yaitu program yang merupakan janji kepala daerah terpilih. Termasuk misalnya janji perbaikan infrastruktur dari Bupati saat mencalonkan diri.

Kemudian yang ketiga adalah program reguler.

"Jadi untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur itu tenang saja. Nanti silakan paparkan mana yang super prioritas tentu akan dibantu," ujar HD.

Dengan pengalamannya yang cukup banyak di DPRD Sumsel, HD meyakini Muchendi mampu membawa Kabupaten OKI menjadi lebih maju, makmur dan bahagia warganya.

Sementara itu, Bupati OKI Muchendi Mahzareki begitu bersyukur karena Kabupaten OKI menjadi pilihan pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dalam pelaksanaan kegiatan Safari



Ramadhan 1446 Hijriah Gubernur dan Forkopimda Sumsel.

"Ini suatu kehormatan bagi kami. Kami senang Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur berkenan hadir ke OKI," jelasnya.

Selain dapat bersilaturahmi, kesempatan ini juga dimanfaatkannya untuk mengajukan usulan bantuan perbaikan infrastruktur kepada kepada orang nomor satu di Sumsel tersebut.

"Kondisi fiskal saat ini kurang bagus, Untuk itu kami mohon dengan sangat. OKI ini begitu luas dan masalah utamanya adalah infrastruktur. Kami berharap Gubernur dapat memberikan bantuan keuangan terutama untuk pembangunan jalan. Ini juga tentunya mewakili keinginan masyarakat," ujar Muchendi.

Dalam kesempatan itu Herman Deru dan Wagub Cik Ujang memberikan bantuan sembako dan santunan kepada puluhan anak yatim piatu.

Safari Ramadhan Bersama Masyarakat OKI

Kabupaten OKI menjadi daerah pertama di luar Kota Palembang yang dikunjungi HDCU sekaligus melakukan silaturahmi dan Safari Ramadhan 1446 Hijriah.

Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa syukur dan gembiranya karena dapat kembali bersilaturahmi dalam suasana yang lebih baik dengan masyarakat OKI sejak 2 tahun terakhir.

Dikatakannya Kabupaten OKI merupakan kabupaten dan sangat luas hingga berbatasan ke Lampung. Kabupaten ini memiliki keanekaragaman suku, potensi pertanian, perkebunan dan perdagangan menjadikan kabupaten ini sangat masyhur dan terkenal.

"Kabupaten ini sangat masyhur dan dikenal. Tapi terkenal ini juga menjadi beban tersendiri sehingga OKI harus tampil lebih baik lagi dari masa kemarin," jelasnya.

Lebih jauh Herman Deru mengatakan kedatangannya dan Wagub Cik Ujang beserta Forkopimda tak hanya untuk bersilaturahmi saja namun juga untuk mengetahui apa saja yang terjadi di OKI. Terutama menghadapi Ramadhan.

Herman Deru berpesan agar pejabat setempat dapat menjaga agar tidak terjadi lonjakan harga selama Ramadhan hingga menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Saya pesan betul, minta jangan sam-

pai terjadi lonjakan harga khususnya bahan makanan. Sering - sering turun cek harga dan jika melonjak cek apa penyebab. sebab demand akan tinggi sampai Lebaran," ujarnya.

Dia menghimbau agar pejabat terkait dapat mengecek kebutuhan pokok agar jangan sampai ada yang menyimpan sembako atau bermain curang.

Di akhir sambutan Herman Deru menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab OKI dan masyarakat karena sudah diterima dengan penuh keakraban dan sangat baik.

Dia juga berharap pertemuan dan silaturahmi ini dapat semakin meningkatkan sinergitas, koordinasi maupun komunikasi antara Kab/kota dan Provinsi.

Sementara itu, Bupati OKI Muchendi Mahzareki dalam sambutannya mengatakan begitu bersyukur karena Kabupaten OKI menjadi pilihan pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dalam

pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan 1446 Hijriah Gubernur dan Forkopimda Sumsel.

"Ini suatu kehormatan bagi kami. Kami senang Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur berkenan hadir ke OKI," jelasnya.

Selain dapat bersilaturahmi, kesempatan ini juga dimanfaatkannya untuk mengajukan usulan bantuan perbaikan infrastruktur kepada kepada orang nomor satu di Sumsel tersebut.

"Kondisi fiskal saat ini kurang bagus, Untuk itu kami mohon dengan sangat. OKI ini begitu luas dan masalah utamanya adalah infrastruktur. Kami berharap Gubernur dapat memberikan bantuan keuangan terutama untuk pembangunan jalan. Ini juga tentunya mewakili keinginan masyarakat," ujar Muchendi.

Dalam kesempatan itu Herman Deru juga memberikan bantuan sembako dan santunan kepada puluhan anak yatim piatu. ●





TANCAP GAS WUJUDKAN PROGRAM PRIORITAS

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan Jawa Timur dalam lima tahun ke depan.

Salah satu dari program prioritas itu ialah peningkatan layanan Trans Jatim. Khofifah menargetkan peningkatan frekuensi dan kapasitas layanan Trans Jatim di berbagai koridor, termasuk peluncuran koridor baru Sidoarjo-Mojokerto (Koridor 6). Peningkatan kenyamanan dan rute menjadi prioritas.

Program prioritas selanjutnya ialah mudik gratis terintegrasi. Program mudik gratis berbasis darat dan laut akan kembali dijalankan, dengan peningkatan penanganan dermaga pelabuhan, dan pemantapan jalan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pemudik.

"Sejak dilantik, kami langsung berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan kelancaran arus mudik," ujar Khofifah, Sabtu, 1 Maret 2025.

Selanjutnya ialah program integrasi data tunggal sosial ekonomi. Khofifah mengatakan pentingnya integrasi data tunggal untuk mendukung perencanaan pembangunan yang terpadu dan efektif.

"Super apps dengan integrasi data tunggal akan menjadi kunci," katanya.

Percepatan pembangunan rumah sakit juga menjadi salah satu program prioritas Khofifah. Pembangunan Rumah Sakit Muhammad Nur dan Rumah Sakit Paru di Jember akan dipercepat.

"Kami akan mempercepat tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kedua rumah sakit tersebut," ujar Khofifah.

Penguatan kompetensi talenta milenial juga menjadi bagian dari program kerja

prioritas. Program penguatan kompetensi bagi talenta milenial melalui jobs center akan dijalankan untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital dan ekonomi kreatif bagi generasi Z dan UMKM.

Pada bidang infrastruktur, peningkatan perawatan jalan dengan program 'sapu bersih' lubang dan pemeliharaan rutin akan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas selama Lebaran.

Di bidang ekonomi,
Khofifah

menjadikan perluasan pembiayaan usaha mikro dan kecil dan penguatan ekonomi kreatif sebagai bagian dari prioritas. Program

perluasan pembiayaan usaha mikro dan kecil akan dilakukan melalui hibah model Baswedan ultra mikro, Bank UMKM, dan penyaluran KUR melalui bank pemerintah daerah.

Program Desa Berdaya akan terus dilakukan, dengan sinergi program desa wisata, desa devisa, klinik BUM-



Des, dan ekotren untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat desa.

Khofifah juga merepons positif sekaligus menaruh optimisme terhadap rencana peluncuran 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan di desa.

Hal ini menjadi upaya Pemprov Jatim menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih

iden nomor dua, tiga dan enam. Ia menyebut program ini diproyeksikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di desa.

"Kopdes Merah Putih, bagaimana menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Insyaallah di _launching_ pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Puncak Hari Koperasi Nasional ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan," jelasnya.

Mengenai modelling Koperasi Desa Merah Putih, Khofifah menjelaskan,

Jawa Timur," tegas Khofifah menambahkan.

Selaras dengan Gubernur Khofifah, Sekretaris Kementerian Koperasi RI Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa gagasan Koperasi Desa Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden untuk membantu rakyat yang diindikasi masih lemah ekonominya.

"Ini diharapkan akan menjawab permasalahan yang ada di desa khususnya menghadapi rantai distribusi pangan, keterbatasan permodalan, dan dominasi middle man yang menekan



pada Peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli mendatang.

"Terkait Koperasi Desa, Bupati/Wali Kota mungkin sudah mulai ditemui oleh Kepala Desanya. Bagaimana sebenarnya detail program Kopdes, apalagi kalau desa itu sudah punya Bumdes dan Koperasi. Kita perlu mencari format agar kehadiran Kopdes produktif," ujarnya.

Menurut Khofifah, rencana 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih ini penting dan selaras dengan Asta Cita Pres-

nantinya akan ada tiga skema. Pertama, membangun koperasi baru, kedua mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan rebranding, ketiga membangun dan mengembangkan koperasi yang sudah ada sebagai jaringan dari Bumdes atau lembaga lainnya di desa.

"Sebagai bagian dari program nasional, Pemprov Jatim akan terus memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Bismillah, kita ikhtiarkan ini semua bagi kesejahteraan masyarakat

harga petani dan mengurangi biaya bagi konsumen," kata Ahmad.

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih ini berpotensi multifungsi, salah satunya pusat produksi dan distribusi diantaranya memperpendek supply chain (rantai pasak), menekan harga ditingkat konsumen, meningkatkan harga ditingkat petani hingga menciptakan lapangan kerja.

Oleh karena itu, Ahmad juga menegaskan arahan Presiden dan Menteri Koperasi bahwa Kopdes Merah Putih

harus berjalan, tidak boleh gagal dan harus didukung semua pihak, terutama pemerintah daerah.

"Maka, kita berkoordinasi secara massif baik antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program penyalarsan, strategi percepatan, monitoring dan evaluasi," terang dia.

Ahmad juga menjelaskan, prioritas pembentukan Kopdes dilakukan mela-

jadi program prioritas. Mengacu data BMKG tentang musim kemarau yang diperkirakan berlangsung April-Juni, pemerintah provinsi akan melakukan penanganan sungai-sungai rawan banjir untuk mencegah bencana.

Khofifah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan.

"Kepala daerah harus bekerja cepat,

masyarakat, dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keterbukaan.

"Pembangunan yang dilakukan harus mampu memberikan manfaat langsung bagi rakyat, baik dalam bentuk infrastruktur, kesejahteraan sosial, maupun pelayanan publik yang lebih baik," tandas Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan daerah dan provinsi. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai elemen strategis di kabupaten/kota di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Kami akan terus berupaya untuk membangun daerah ini sebaik mungkin, dengan semangat guyub rukun, untuk memaksimalkan potensi energi



Sejak dilantik, kami langsung berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan kelancaran arus mudik.

positif yang ada dan memberikan kinerja terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara," lanjutnya.

Khofifah berharap agar seluruh kepala daerah dan masyarakat Jawa Timur senantiasa bekerja bersama dalam semangat kebersamaan untuk kemajuan daerah, sehingga dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Husnul Aqib, menyampaikan dukungannya terhadap visi misi yang diusung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak terutama ketahanan pangan.

Anggota DPRD Jatim Dapil Gresik-Lamongan itu menilai bahwa program-program yang dijalankan oleh pasangan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur, terutama dalam mengurangi tingkat



lui pemetaan koperasi berdasarkan kondisi existing. Pertama, koperasi unit desa aktif (existing) sebanyak 4.088. Kedua, untuk koperasi unit desa non aktif sebanyak 4.615 dan akan dilakukan revitalisasi koperasi agar menjadi layak.

Selanjutnya, ketiga, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) bertransformasi menjadi koperasi sebanyak 64.766. Terakhir, desa yang belum memiliki Koperasi Unit Desa (KUD).

Dalam program prioritas lainnya,antisipasi musim kemarau juga men-

tetapi yang lebih penting adalah bekerja keras. Kami berharap segala yang dilakukan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala," tambahnya.

Khofifah juga mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik, guna mencapai hasil yang optimal. Ia menegaskan bahwa kerja keras yang dilakukan bukan hanya untuk mencapai target pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi



kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan.

"Yang diharapkan oleh warga Jawa Timur, titik beratnya adalah mengurangi tingkat kemiskinan, terutama pada saat ini, untuk segera direalisasikan program-program tersebut," ujar Husnul Aqib yang juga ketua Fraksi PAN Jatim ini.

Husnul Aqib, menekankan pentingnya program-program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur.

"Beberapa hal yang perlu segera ditangani adalah perbaikan irigasi, pen-

ingkatan jalan yang banyak berlubang, serta pengerukan waduk dan embung yang sangat dibutuhkan untuk ketahanan pangan,"katanya.

Dia juga mengaitkan konsep ketahanan pangan dengan infrastruktur yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa untuk mencapai cita-cita ketahanan pangan yang diusung oleh Pemerintah Pusat, khususnya oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, infrastruktur yang mendukung sektor pertanian harus dibenahi.

"Karena itu, konsep dasar cita-cita Pak Prabowo untuk ketahanan pangan harus didukung dengan perbaikan in-

frastruktur. Waduk yang sedimennya tinggi dan mengalami pendangkalan harus dikeruk agar ketahanan pangan bisa terjaga," jelasnya.

Husnul Aqib menambahkan, bahwa infrastruktur yang memadai akan mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, yang sebagian besar bergantung pada pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.

"Dengan memperbaiki irigasi, jalan, serta waduk yang ada, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kerugian petani, dan memperkuat ketahanan pangan di Jawa Timur,"katanya.

Sebagai anggota legislatif, anggota komisi A DPRD Jatim itu berkomitmen untuk mendukung program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan terus mendukung dan mengawal pelaksanaan program-program ini, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan infrastruktur, agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur,"pungkasnya. •



TUGAS PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Memastikan pasokan, keamanan dan kenyamanan yang dibutuhkan.

Selain itu, Bobby Nasution juga meminta ASN Pemprov Sumut untuk senantiasa beradaptasi dengan zaman dan situasi. Ia mencontohkan, ada hewan kecil yang mampu bertahan hidup ketimbang dinosaurus pada masa itu.

Hewan kecil tersebut mampu ber-

Bobby Nasution juga mengajak Forkopimda Sumut untuk terus melanjutkan kolaborasi yang selama ini telah terbangun. Salah satu fokus yang ditargetkannya adalah menghilangkan Narkoba di Sumut. Menurutnya, Indonesia Emas 2045 Sumut akan terwujud apabila Narkoba dapat hilang.

mampu membawa Sumut ke arah yang lebih baik.

"Menjadi pemimpin di Sumut tidak ringan dan tidak mudah, di semua sektor kita perlu kerja keras, saya yakin dengan kepemimpinan Pak Bobby dan Pak Surya, Sumut bisa melesat dan membanggakan bagi kita semua," ucap Fa-



adaptasi dengan lingkungannya, sementara dinosaurus tidak.

"Yang mampu bertahan bukanlah dinosaurus, tapi hewan kecil yang hidup pada masa itu, kuncinya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan waktu, oleh karena itu saya minta semua harus jadi seperti hewan kecil itu, kita sama-sama adaptif, ikuti perkembangan zaman, teknologi dan kepemimpinan," kata Bobby Nasution, didampingi Wakil Gubernur Surya. Ia optimis, keduanya

"Saya minta support dan dukungan untuk Narkoba di Sumut, benar-benar harus kita hilangkan, kami (Pemprov Sumut) akan support penuh dengan gerakan, gebrakan, dan kami akan lakukan tindakan pencegahan di Sumut," ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut mengucapkan selamat pada Gubernur Bobby dan Wakil Gubernur Surya. Ia optimis, keduanya

toni.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan Ketua TP PKK Sumut dari Tyas Fatoni kepada Kahiyang Ayu.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, istri Wakil Gubernur Surya, Titiek Sugianti, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februantio, Pangdam I/BB Rio Firdianto, Kajati Sumut Idianto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

(Forkopimda) lainnya. Juga hadir Walikota Medan Rico Waas.

Disisi lain, Bobby Nasution menyampaikan lima plus satu program prioritas pembangunan, selama memimpin Provinsi Sumut, bersama Wakil Gubernur (Wagub) Surya (2025-2030). Lima program tersebut yakni kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan UMKM, pangan, serta pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). Sedangkan program plusnya adalah program khusus di setiap daerah.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dalam Rangka Penyampaian Pidato Sambutan Gubernur Sumut Masa Jabatan 2025-2030, di Ruang Rapat DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin 3 Maret 2025. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti.

"Program pembangunan di Sumut perlu diperkuat untuk menyempurnakan pelaksanaan Asta Cita sebagai pedoman pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045," katanya.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, menurut Bobby Nasution, SDM menjadi komponen utama yang harus diperhatikan. Bonus demografi menjadi salah satu poin untuk mencapai Indonesia Emas. Untuk itu SDM yang baik harus dipersiapkan, mulai dari berkeluarga sampai berada di kandungan ibunya.

Disampaikan juga, kesehatan merupakan salah satu program prioritas yang sangat penting. Apalagi, dengan melihat rendahnya harapan hidup, tingginya prevalensi stunting, maraknya penyakit menular, dan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut menjadi tantangan yang perlu mendapat penanganan khusus.

"Tentunya kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari 33 kabupaten/kota, baru 11 kabupaten/kota yang tercover UHC (Universal Health Coverage). Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan Insya Allah, dalam waktu 2 tahun ke depan kami memastikan seluruh wilayah di Sumut harus mencapai UHC. Sehingga Sumut mencapai UHC di 33 kabupaten/kota. Kami berharap seluruh kabupaten/kota

memastikan keterlibatan kolaborasi antara Pemprov dan Pemda," ucapnya.

Bobby mengatakan, infrastruktur pembangunan di Sumut diketahui belum merata. Rendahnya kualitas infrastruktur menyebabkan terhambatnya distribusi pangan dan pembangunan.

Karena itu, melalui infrastruktur yang merata, terhubung, dan ramah lingkungan, Bobby mengatakan Pemprov Sumut bukan hanya ingin menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan, tapi juga irigasi, sekolah, rumah sakit, penyediaan listrik, rumah layak huni, sanitasi dan air bersih. Tapi juga memastikan kontinuitas di daerah terpencil.

"Dengan demikian transportasi dan distribusi barang dapat dirasakan masyarakat termasuk di daerah pedesaan," ucapnya.

Sementara di sektor ekonomi, lan-

dan ekonomi desa.

Program prioritas selanjutnya adalah pertanian. Swasembada pangan adalah salah satu target Presiden RI.

Untuk itu, kata Bobby Nasution, Sumut harus bisa mengambil peran dari target tersebut, dengan menerapkan modernisasi pertanian, seperti memastikan peningkatan produksi, dan penurunan HPP. Sehingga para petani sejahtera dan masyarakat bisa menikmati kebutuhan pangan asal Sumut sendiri.

Bobby Nasution melanjutkan, seperti diketahui bahwa sejumlah wilayah di Sumut pendidikannya belum begitu baik. Dirinya menyebutkan ada sekolah belum teraliri listrik, belum tersentuh digital dan internet.

"Dalam dua tahun kedepan, seluruh sekolah di Sumut layak dijadikan tempat pembelajaran. Ada listrik, internet,



jutnya, tentunya harus berbanding lurus dengan kondisi infrastruktur dan tercermin pertumbuhan industri pengolahan dan pemberdayaan UMKM.

"Kami ingin pelaku UMKM harus mendapatkan tempat, mengenal digitalisasi. Kami menginginkan para pelaku UMKM bisa terlibat langsung, ikut serta membangun Sumut, berkolaborasi dengan korporasi di Sumut. Untuk memperkuat stabilitas makro dan menjadikan Sumut sebagai pusat bio industri dan pariwisata global, diperlukan langkah strategis terpadu seperti hilirisasi industri, inovasi teknologi, pemanfaatan energi terbarukan, dan penerapan ekonomi hijau dan pemanfaatan digitalisasi," terangnya.

Pemerataan ekonomi juga didorong oleh pemberdayaan koperasi melalui akses pembiayaan melalui BUMDES

sehingga pendidikan berjalan dengan baik," katanya.

Selain lima program prioritas tersebut, Bobby Nasution juga menyampaikan program plus sebagai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Dia menyampaikan, program tersebut khusus diterapkan berdasar basis di setiap daerah.

Ia mencontohkan, seperti dilakukan khusus di wilayah pariwisata, wilayah terluar seperti Nias. Seperti diketahui bahwa ada empat daerah tertinggal di Sumut. Bobby berharap daerah-daerah tertinggal tersebut minimal bisa berkurang dan maksimal tidak lagi menjadi daerah tertinggal.

"Kami percaya seluruh komponen Sumut bisa mendukung dan men-support program yang akan kami lakukan dan jalankan," harapnya. •

LANGKAH JITU DEDI MULYADI ATASI BANJIR JABAR

Tidak hanya karena intensitas hujan, tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kurang tepat dan lahan hijau yang minim juga menjadi penyebab terjadi banjir di beberapa daerah kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi masuk ke Sungai Cibalabuan, Pelabuhan Ratu, Sukabumi yang dipenuhi sampah, Sabtu 8 Maret 2025.

Di lokasi juga terlihat Bupati Sukabumi, Asep Japar, Kapolres Sukabumi, AKBP Samian dan Dandim 0622/Kab Sukabumi, Letkol Kav Andhi Ardana Valerindra yang juga ikut turun ke sungai mengangkat sampah.

Dedi Mulyadi bahkan sempat bercanda dengan Bupati Sukabumi, Asep Japar saat mengangkat beragam jenis sampah di aliran Sungai Cibalabuan.

Dedi mengatakan, baru saja dilantik menjadi bupati sudah dibuat repot oleh bencana.

"Kapan lagi maen sama kapolres di air, sama bupati, karek dilantik beres, ripuh, ini nih retret," ujar Dedi Mulyadi sambil tertawa.

Sebelumnya, Dedi mengatakan, ia mengangkat sampah pakaian dalam.

"Kalau sampahnya ada kasur, bantal, guling, seprai, segala macam lah, celana dalam ada," ujarnya.

Dia menjelaskan, banjir akibat luapan Sungai Cibalabuan karena adanya pendangkalan sungai dan beberapa faktor lain.

"Ini kan halnya sederhana. Satu, sungainya mengalami pendangkalan walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar dibuat melengkung, nanti saya bangun jembatannya," jelasnya.

"Ketiga, warganya jorok buang sampah ke sungai. Keempat, hutannya rusak pohonnya dibabatin, yang kelima, ini gila semua," sambung Dedi.

Dedi Mulyadi pun tak habis pikir dengan kelakuan warga yang membuang segala jenis sampah ke sungai.

"Udah gitu, sagala rupa (sampah), kebanyakan sih sampah dari rumah. Itu kan material-material kayu yang sudah lama ditebang yang tidak dibersihkan itu kemudian pada jatuh ke sungai," ujarnya.

Banjir melanda sejumlah desa yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Selain banjir, tanah longsor juga menghantam rumah warga dan menutup jalan di beberapa desa.

Dedi Mulyadi bergerak dengan mengumpulkan empat kepala daerah di Jawa Barat untuk membahas penanganan banjir.

"Kita lakukan bersama sesuai dengan daerah masing masing, apa permasalahannya dipaparkan satu satu untuk langkah solusinya," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Jumat 7 Ma-



ret 2025.

Ada sejumlah langkah yang dilakukan Dedi guna mencegah banjir di masa mendatang.

1. Pembongkaran Hibisc Fantasy

Dedi menginstruksikan agar tempat rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor dibongkar. Dia menemukan ketidaksesuaian antara izin yang diajukan dan luas lahan yang digunakan.

PT Jaswita, pihak pengelola tempat rekreasi, mengajukan izin pembangunan area seluas 4.800 meter persegi. Namun pada kenyataannya, perusahaan di bawah BUMD Jabar ini mengembangkan sampai 15 ribu meter persegi.

Lewat Pemkab Bogor, Dedi sudah memperingatkan PT Jaswita hingga diminta membongkar sendiri tapi tidak ada respons.

"Karena tak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Bantu pak Wabup, Pimpinan DPRD Bogor. Dukung kita bongkar," kata Dedi.

Selain Hibisc Fantasy, dia juga menyegel lokasi lain yang dianggap berkontribusi terhadap banjir seperti, bangunan milik PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi, lokasi milik PTPN 1 regional 2 Gunung Mas dan Eiger Adventure Land.

2. Audit pengembang perumahan yang klaim bebas banjir

Dedi berkata banjir di beberapa titik di Jawa Barat terjadi di perumahan-perumahan yang mengklaim bebas banjir. Dia pun bakal mengaudit para pengembang yang menjual hunian dengan klaim serupa agar banjir tidak terulang.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir. Fakta-tornya

oleh apa, kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" ucapnya.

3. Cabut Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

Pembangunan sejumlah lokasi wisata ditengarai berkontribusi terhadap banjir Jabodetabek. Dedi mengaku akan mencabut Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022. Menurut dia, Perda tersebut membuat tata ruang di Puncak berubah.

Perda berisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024. Perda ditandatangani

dian dikembalikan alam Jawa Barat seperti kondisi semula. Sesuai dengan aspek-aspek penata ruangan yang memadai yang memberikan keselamatan bagi warga," ujarnya.

4. Melarang warga Jakarta bangun villa di Bogor

Dedi melarang warga Jakarta membangun vila dan bangunan sejenis di kawasan Puncak, Bogor. Banjir Jakarta, Bekasi hingga Depok merupakan imbas kerusakan lanskap di hulu Sungai Ciliwung.

"Jangan lagi bangun-bangunan villa



Ridwan Kamil dan menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2019 dan Perda Nomor 22 Tahun 2010.

"Yang pertama kita akan mencabut perda itu. Kemudian

dan sejenisnya di Puncak. Kenapa? Kalau kemudian sekarang airnya ke Jakarta ya karena mereka cari tempat untuk tidur," kata Dedi di Bogor, Jawa Barat, Kamis 6 Maret 2025.

5. Seruan untuk hentikan alih fungsi lahan

Dedi menyerukan larangan alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor. Hal ini perlu dilakukan, lanjutnya, untuk mencegah bencana lebih lanjut dan menjaga keseimbangan ekosistem.

"Berdasarkan data yang kami miliki, lebih dari seribu hektare lahan perkebunan teh di Puncak telah beralih fungsi. Ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memperburuk kondisi lingkungan," tegasnya.

Dia pun mengaku akan berkoordinasi dengan beberapa pihak termasuk PTPN dan Perhutani Jabar untuk mengembalikan fungsi konservasi lahan yang berubah. ●



HARGA DAN STOK PANGAN DI JAKARTA AMAN HINGGA LEBARAN

Sebagai komitmen Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 10 Maret 2025.

Pramono Anung didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, serta jajaran pemerintah daerah, memastikan kondisi harga dan pasokan bahan pokok aman.

"Kami meninjau pasar ini karena telah menjadi pusat distribusi berbagai bahan pokok, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga komoditas tersebut tetap stabil, serta mendukung program-program pemerintah dalam menanggulangi inflasi harga pangan," ujar Pramono.

Dalam tinjauan tersebut, perhatian khusus diberikan pada harga cabai dan bawang, dua komoditas yang kerap mengalami lonjakan harga.

P r a m o n o

memastikan distribusi kedua bahan tersebut berjalan lancar, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga.

Ia juga berdialog dengan pedagang, pemasok, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menggali kendala yang menyebabkan fluktuasi harga.

"Alhamdulillah, dari peninjauan, kita melihat harga cabai dan bawang menunjukkan fluktuasi yang wajar, dengan kenaikan dan penurunan harga

yang seimbang. Namun, untuk mengatasi fluktuasi ini,

kami berupaya melakukan contract farming, sehingga pasokan kedua komoditas tersebut tercukupi dengan harga yang stabil," ungkapnya.

Tak hanya melakukan pemantauan, Gubernur Pramono juga melepas 10 armada Pasar Murah yang bertugas



mendistribusikan bahan pokok langsung ke masyarakat.

Program ini bertujuan menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau di 296 titik se-Jakarta, terutama selama HBKN.

"Semoga upaya ini dapat menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam mengatasi permasalahan harga pangan, serta memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi. Maka, kami juga menyiapkan solusi inovatif untuk memastikan distribusi pangan berjalan baik, salah satunya melalui pelepasan armada Pasar Murah ini," jelasnya.

Dengan langkah konkret ini, diharapkan harga bahan pokok tetap stabil dan masyarakat Jakarta dapat

yang lain-lain sayur-mayur seperti kentang, tomat, buncis dan sebagainya harganya relatif stabil," kata Pramono.

Dia menyampaikan, tak hanya Pasar Kramat Jati menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta melainkan juga di tempat-tempat lain.

Pramono menjelaskan, setiap hari sebanyak 10 truk juga dikerahkan untuk mengantarkan pangan subsidi di daerah-daerah alias di tempat-tempat yang mengalami kekurangan stok.

"Maka dengan demikian, saya meyakini bahwa kesiapan bahan-bahan yang dibutuhkan masyarakat untuk menyambut puasa dan Idul Fitri ini lebih dari cukup," katanya.

Harganya termonitor dengan baik, hanya memang pasti bakal ada fluk-

Suharini Eliawati menegaskan untuk stok beras yang ada di gudang cukup untuk 6 bulan ke depan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan "panic buying".

"Sekarang ketersediaan beras kami dalam jumlah yang cukup," katanya.

Menurut dia, beras yang ada di Jakarta jika digabungkan dari stok Bulog, Food Station dan BUMD lainnya bisa bertahan hingga enam bulan ke depan.

Konsumsi beras masyarakat Jakarta dalam kondisi normal sebanyak 2.700 ton per hari. Sedangkan pada bulan Ramadan terdapat peningkatan menjadi kisaran 3.000 ton per hari.

"Pemprov DKI Jakarta sudah memastikan bahwa 9 bahan pangan strat-



menikmati Ramadan serta Idul Fitri tanpa terbebani lonjakan harga pangan.

Pramono menjelaskan, meskipun pada tanggal 3-4 Maret 2025 sempat ada kekurangan stok dan mengakibatkan nilai sedikit naik, namun sekarang ini secara keseluruhan nilai bahan pangan sudah stabil.

Bahkan, kata Pramono, beberapa nilai bahan pokok mengalami penurunan. Kendati demikian ada juga nilai yang naik.

Yang tetap mengalami kenaikan adalah cabe rawit merah.

"Cabai rawit hijaunya malah turun,

tuasi. "Karena sangat beruntai dari curah hujan dan sebagainya, terutama yang menyangkut cabe merah, cabe hijau," kata Pramono.

Sedangkan untuk nilai daging, Pramono mengatakan terjadi kenaikan nilai untuk daging segar, sementara nilai daging kaku (frozen) tetap stabil.

Pramono mengatakan bahwa pihaknya juga sudah melakukan rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

egis Jakarta masa Ramadan dan menjelang Lebaran pada kondisi yang cukup," katanya.

Eli menambahkan bahwa adanya peningkatan harga saat ini masih dalam kondisi aman dan tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Apalagi saat ini kebutuhan pangan sedang meningkat.

Untuk itu, kata Eli, yang terpenting warga jangan panik sehingga melakukan pembelian secara besar-besaran (panic buying) karena ketika sudah terjadi kepanikan maka yang ada hanya menumpuk bahan pangan di rumah sehingga di pasar menjadi

• INFO DAERAH

langka.

"Kita sampaikan ke seluruh masyarakat Jakarta, yang pertama jangan 'panic buying'. Karena Pemprov DKI Jakarta menjamin ketersediaan pangan," ujarnya.

Harga berbagai macam produk pangan strategis pada sejumlah pasar di Jakarta, saat ini masih relatif terkendali. Kenaikan signifikan terpantau hanya terjadi pada komoditas cabai merah.

Menurut Eli, kenaikan harga bukan disebabkan minimnya pasokan, melainkan dipicu permintaan pasar yang meningkat sebelum dan saat awal Ramadan ini.

"Selain cabai merah, produk pangan seperti daging dan beras masih dalam kisaran harga yang nyaman untuk

pembeli dan pedagang," ucapnya.

Dijelaskan Eli, pihak BI Perwakilan di Jakarta menyampaikan bahwa pada Februari lalu terjadi deflasi, meski tidak sedalam Januari 2025 kemudian dari periode 2019 hingga 2024, menunjukkan data kenaikan kebutuhan tertinggi terjadi selama bulan Ramadan.

Tren kenaikan kebutuhan itu biasanya akan terus meningkat hingga puncaknya pada waktu mendekati Idul Fitri. Setelahnya, tren kebutuhan akan menurun seiring musim mudik dan banyak warga ke kampung pulang halaman mereka.

Untukantisipasi kenaikan harga, ungkap Eli, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan lebih dari 290 kegiatan pasar pangan murah di berbagai lokasi seperti kantor lurah, RPTRA, Kantor

Wali Kota, rumah susun dan permukiman warga.

"Kami pastikan, harga berbagai pangan strategis dalam kegiatan dijual dengan harga terjangkau," ulasnya.

Keamanan stok beras juga sudah dibuktikan oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo yang telah meninjau ketersediaan stok beras di gudang Food Station yang berada di kawasan Cipinang.

Bahkan, untuk memastikan kondisi pangan, Rio bersama pimpinan dan anggota Komisi B telah meninjau stok beras di Gudang Rice Plan Cipinang (RPC) milik PT. Food Station Tjipinang Jaya.

Menurut Rio, terdapat lima poin penting yang harus diperhatikan dalam menjaga stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan hingga



Idul Fitri.

Yakni, ketersediaan stok pangan, pendistribusian, kualitas pangan, harga terjangkau, dan keamanan stok.

Oleh sebab itu, sambung Rio, perlu diperhatikan seluruh unsur, baik pemangku kepentingan maupun pemilik kepentingan.

"Karena selama ini yang muncul bagaimana harga sering kali terlihat di luar jangkauan saat momen-momen tertentu, seperti Ramadan dan Lebaran," ujar Rio.

Terlebih di luar momentum tersebut, kata Rio, juga mengalami lonjakan harga yang tak terduga.

Karena itu, pinta Rio, jalur pendistribusian stok pangan diperhatikan secara serius dan rinci.

Pasalnya, pemerintah pusat telah

menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani minimal sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kemudian saat distribusi tersebut masuk ke pasar-pasar di Jakarta, secara otomatis pedagang akan kesulitan menjual di bawah Rp10 ribu.

Hal itu berimbas dari persoalan harga dan berdampak pada aspek inflasi perekonomian. "Nah, ini kita cek betul distribusinya seperti apa dan bagaimana," jelas Rio.

"Karena harus diperhatikan selain jalur normal yang memang sudah di bawah naungan pemda kemudian juga di luar naungan pemda juga perlu kita perhatikan," tambah Rio.

Politisi PDI Perjuangan itu mengimbau, jangan ada oknum yang meman-

faatkan momentum Ramadan dan Idul Fitri untuk mengambil keuntungan dengan mematok harga tinggi kepada masyarakat.

Penentuan harga tinggi tersebut berdampak kerugian di masyarakat luas.

"Kita sebagai DPRD itu memang memiliki tuntutan untuk memastikan dan mengawasi. Bahkan melakukan tindakan rekomendasi terhadap tindakan yang mereka lakukan," tegas dia.

Untuk itu, harap Rio, stabilitas harga stok pangan tetap terjaga. Meski nantinya harga pangan fluktuatif (naik turun).

"Jadi, stabilitas stok pangan dan harga menjadi penting untuk dilakukan kontrol secara reguler dan secara sistemik," pungkas dia. •



Gratispol dan Jospol

LANGKAH RUDY-SENO TEPATI JANJI

**Ruang Rapat Paripurna
DPRD Kalimantan Timur
riuh sejenak saat Gubernur
Kaltim, Rudy Mas'ud,
menyelipkan bait pantun
dalam pidato perdananya
dalam Rapat Paripurna
ke-8 DPRD Kaltim, Senin, 3
Maret 2025.**

"Bumi Etam indahlah sangat, hijau pepohonan udara sehat, mari bersama merajut semangat, generasi emas semakin dekat."

Berpakaian dinas harian berwarna khaki dengan pin emas di dada kiri, Rudy yang baru saja tuntas mengikuti retret kepala daerah di Magelang, memastikan dalam 100 hari kepemimpinannya bersama Seno Aji, akan menjadi perhatian besar masyarakat Kaltim.

"Kami akan selaraskan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun ke depan dalam tahun ini. Karena itu, kami mengajak DPRD Kaltim agar berkolaborasi dalam mewujudkannya," sebut mantan anggota Komisi III DPR itu.

Menutup pidatonya, Rudy mengakui bahwa pemerintah pusat sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ekonomi dunia pun, sebutnya, dalam keadaan yang bergejolak. Namun, ia meyakini bahwa kondisi-kondisi

tersebut tak akan menghalangi pemerintah daerah dalam mewujudkan janji-janji politiknya.

Usai rapat paripurna, Rudy menegaskan bahwa janji-janji dalam Gratispol akan segera diwujudkan. Mulai dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, jaringan internet gratis, hingga umrah gratis untuk marbot masjid.

Di ranah pendidikan, Rudy menegaskan bahwa tidak akan ada lagi beasiswa untuk mereka yang menempuh pendidikan di wilayah Kaltim. Beasiswa hanya berlaku bagi mereka yang melanjutkan pendidikan ke luar Kaltim. Sementara untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan gratis, akan disesuaikan menurut kelas dan diprioritaskan untuk warga kurang mampu.

"Insya Allah anggaran kita cukup, kalau perlu kita pangkas (anggaran) yang



lain," ujarnya.

Terpisah, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebutkan bahwa produk hukum untuk kebijakan Gratispol dalam proses persetujuan Kementerian Dalam Negeri menjadi peraturan gubernur. "Itu menjadi fokus tim transisi saat ini," ungkapnya.

Sebagai informasi, tim transisi pemerintahan Rudy-Seno dipimpin oleh mantan Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso. Ia didampingi sejumlah akademikus dari Universitas Mulawarman Samarinda, yaitu Prof Bohari Yusuf, Aji Sofyan Effendi, Hajrah, serta Achmad Zaini.

Selain akademikus Unmul, tim transisi melibatkan Akhmad Fathoni yang merupakan pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian, ada Wakil Rektor Universitas Siber Asia, Abdul Wahab Bangkono, yang juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Serta Syahrir A Pasinringi dari Universitas Hasanuddin.

Selain akademikus, nama politikus gaek Putra Jaya Husin yang sebelumnya merupakan mantan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional juga turut dalam daftar nama tim transisi. Kemudian ada purnawirawan jenderal bintang dua polisi Muhammad Arkan Hamzah yang sebelumnya merupakan analis kebijakan utama Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri.

Lalu, ada ketua Forum Satunusa yang merupakan salah satu organisasi masyarakat pendukung Rudy-Seno di Pilkada lalu, Herman A Hasan. Serta konsultan komunikasi politik Irfan Wahid atau yang dikenal sebagai Ipang Wahid. Total, terdapat 12 anggota tim transisi Rudy-Seno.

Kembali ke program Gratispol, Seno Aji menegaskan bahwa tidak ada syarat nilai sebagaimana yang berlaku di program beasiswa di periode sebelumnya. Hanya batasan umur yang berlaku untuk masing-masing jenjang dari S1 hingga S3.

"Tapi, jangan sampai bapak-bapak 50 tahun mendaftar beasiswa untuk S1," kelakarnya.

Selain batasan umur, dia menegaskan bahwa Gratispol diprioritaskan untuk mereka yang menempuh pendidikan di Kaltim. Untuk mereka yang menempuh

pendidikan di luar daerah hingga luar negeri akan dibantu dengan program lain yang akan dinamai Beasiswa Kaltim Sukses.

"Jadi ada Gratispol, ada Beasiswa Kaltim Sukses," bebernya.

Seno menyebutkan, mereka yang menempuh pendidikan di luar Kaltim dinilai mampu secara ekonomi, sehingga hanya diberikan beasiswa. Selain itu, pendidikan di Kaltim diprioritaskan agar dapat meningkatkan kualitas mutu sekolah dan perguruan tinggi di Kaltim menjadi unggul.

"Makanya kita gratiskan," tegasnya.

Dalam dokumen Surat Edaran Wakil Gubernur Kaltim dengan nomor 000.7.2.4/4566/Bapp-II yang diterbitkan 24 Februari 2025, Seno Aji

modern; pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan pelayanan publik; dan peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah.

Selanjutnya, Jospol mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM; mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa; membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan dan rumah sakit; membangun infrastruktur di seluruh Kaltim, seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi dan pelabuhan internasional.

Kemudian revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angku-



telah mengimbuai segenap organisasi perangkat daerah untuk merancang Gratispol dalam penyusunan RPJMD serta rencana strategis organisasi perangkat daerah.

Dokumen tersebut memuat dua program unggulan pemerintahan Rudy-Seno, yaitu Gratispol dan Jospol. Gratispol terdiri dari tujuh program gratis, yaitu bersekolah SMA/SMK hingga S3, gratis biaya berobat dan layanan kesehatan, kemudian gratis makanan bergizi. Lalu, gratis wifi internet di seluruh desa, gratis seragam sekolah, gratis biaya administrasi kepemilikan rumah, serta gratis haji dan umrah untuk marbot.

Adapun Jospol memuat sembilan program yang terdiri dari hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian

tan industri dan pariwisata; serta terakhir, memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerja sama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta.

Dalam surat imbuai tersebut, Seno memerintahkan sekretaris provinsi selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar menyusun rencana kerangka keuangan daerah dalam RPJMD menyesuaikan visi misi tersebut.

Seno Aji juga memberikan tenggat waktu paling lambat 14 Maret 2025 untuk pembuatan dokumen awal RPJMD dan renstra organisasi perangkat daerah agar selanjutnya dapat dibahas bersama pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik. Tanda tangan Seno Aji serta stempel gubernur Kaltim menutup lampiran surat edaran dua halaman tersebut. •

GALANG KOLABORASI UNTUK MEMBANGUN MUBA LEBIH CEPAT DAN SEJAHTERA

Komitmen kuat untuk membangun Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ditunjukkan Bupati Muba H M Toha dan Wakil Bupati Rohman dengan turun ke lapangan menyambangi kantor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memperkuat sinergi dan koordinasi demi mewujudkan “Muba Maju Lebih Cepat dan Sejahtera”..

Kunjungan diawali ke Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0401 Muba, di mana mereka disambut hangat oleh Dandim Muba Letkol Inf Erry Dwianto. Selanjutnya, rombongan melanjutkan kunjungan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sekayu.

Suasana semakin berkesan ketika Bupati dan Wakil Bupati Muba meninjau ruang sidang di Pengadilan Agama. Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menanyakan kepada Syarifah Aini selaku Ketua Pengadilan Agama Sekayu terkait faktor-faktor utama yang paling sering menjadi penyebab perceraian.

Ia juga menyampaikan harapannya untuk segera merumuskan strategi dan upaya pencegahan guna menekan angka perceraian di Muba.

Bupati Muba HM Toha, yang akrab disapa Wak Toha, juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar instansi demi pelayanan publik yang optimal serta percepatan pembangunan di Muba.

Dengan kunjungan ini, diharapkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Muba dan Forkopimda semakin solid, sehingga pelayanan publik dapat semakin optimal dan pembangunan daerah semakin cepat terealisasi.

“Alhamdulillah, hari ini kami dapat bersilaturahmi langsung dengan jajaran Forkopimda. Terima kasih atas sambutannya. Ini merupakan langkah awal untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dalam membangun Kabupaten Muba ke depan. Saya berharap kita semua dapat bekerja bersama, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,



serta menjadikan Muba lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Kunjungan ini disambut antusias Forkopimda yang merasa bangga atas perhatian dan keterlibatan langsung dari Bupati dan Wakil Bupati Muba. Mereka pun menegaskan kesiapan untuk terus bersinergi dalam melayani masyarakat serta berinovasi demi kemajuan daerah.

Siap Dukung Visi Muba Maju Lebih Cepat

Langkah cepat Bupati Muba H. M. Toha dan Wabup Rohman dalam membangun daerah tak hanya sebatas retorika. Memasuki hari ketiga bertugas, keduanya langsung tancap gas memperkuat sinergi dengan berbagai institusi strategis.

Keduanya melanjutkan agenda dengan mengunjungi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin guna memperkuat kolaborasi dalam penegakan hukum serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kunjungan ini disambut hangat Kepala Kejaksaan Negeri Muba, Roy Riady beserta jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Toha menegaskan bahwa sinergi antara Pemkab Muba dan Kejari sangat krusial dalam memastikan kebijakan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin membangun Muba dengan tata kelola yang bersih dan profesional. Dengan dukungan Kejari, kami yakin pembangunan dapat dipercepat dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” tegas Bupati Toha.

Menanggapi hal tersebut, Kajari Muba Roy Riady menyambut baik ajakan kerja sama dan menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung visi pembangunan daerah yang lebih maju.

“Kami di Kejaksaan Negeri Muba berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkab dalam memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai aturan. Kami juga siap memberikan pendampingan hukum agar setiap kebijakan daerah bisa terlaksana dengan baik dan transparan,” ujar Roy Riady.

Ia juga menambahkan bahwa Kejari siap menjadi mitra strategis dalam men-

jaga integritas pemerintahan di Muba.

“Kolaborasi ini penting agar pembangunan daerah bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan hukum yang berarti,” terangnya.

Kunjungi DPRD Muba

Bupati Musi Banyuasin H M Toha dan Wakil Bupati Muba Rohman melakukan kunjungan silaturahmi yang mengugah semangat ke Pimpinan Dewan

pa pentingnya hubungan antara eksekutif dan legislatif.

“Silaturahmi ini adalah langkah awal untuk membangun ikatan yang lebih kuat. DPRD adalah mitra strategis dalam setiap gerak langkah kita,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

“Kita semua memiliki peran penting untuk membawa Kabupaten Muba ke arah yang lebih maju,” tambahnya.

HM Toha mengingatkan bahwa pem-



Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Muba. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Muba demi kemajuan daerah kedepannya.

Kunjungan ini disambut dengan antusias Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay beserta para Wakil Ketua, yaitu Irwin Zulyani, H Ahmadi, dan Edi Pramono, pada hari Senin, 10 Maret 2025. Suasana penuh keakraban dan harapan memenuhi ruangan saat mereka bersama-sama berdiskusi tentang langkah-langkah strategis untuk Muba yang lebih baik.

Bupati H M Toha menekankan beta-

impin adalah sebuah amanah. “Kami berharap, dengan sinergi ini, kita dapat bekerja sama dengan kompak. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama kita,” tegasnya. Pesan ini mengajak semua pihak untuk bersatu dalam satu visi.

Sementara Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kunjungan ini.

“Kedatangan Bupati dan Wabup adalah momen bersejarah bagi kami. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk mensejahterakan masyarakat Muba,” ungkapnya. ●

HM TOHA: SAATNYA MENUJU MUBA MAJU LEBIH CEPAT!

Dalam suasana penuh semangat dan harapan, Bupati Musi Banyuasin (Muba) H. M Toha, bersama Wakil Bupati Rohman, menghadiri rapat paripurna masa persidangan II ke-5 tahun 2025. Acara ini menjadi momen bersejarah untuk menyampaikan pidato sambutan sebagai Bupati Muba periode 2025-2030.

Dalam pidatonya, Bupati HM Toha mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dan Wakil Bupati Rohman. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara Pemilu dan jajaran TNI/Polri yang telah menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada.

"Kami resmi dilantik pada 20 Februari 2025, dan ini adalah awal dari perjalanan kami untuk Muba yang lebih baik," katanya dengan semangat.

Bupati Toha memperkenalkan visi besarnya untuk lima tahun ke depan yakni "Maju Lebih Cepat, Bersama Mensejahterakan Muba." Visi ini adalah komitmennya untuk membawa Muba menuju kesejahteraan dan daya saing yang lebih tinggi.

Untuk mencapai visi ini, terdapat tujuh misi strategis yang akan menjadi pilar

kebijakan dan program kerja, antara lain:

1. Penguatan SDM melalui transformasi pendidikan dan kesehatan.
2. Rekonstruksi sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penguatan moderasi beragama dan ekonomi keumatan untuk keharmonisan sosial.
4. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan melayani.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas yang lebih baik.
6. Sinergi dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kokoh.
7. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan dengan perhatian pada lingkungan.

Bupati Toha menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ia mengajak semua elemen untuk bersatu mem-



bangun Muba yang lebih baik.

Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay, juga memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati. Ia berharap kepemimpinan mereka akan diberkahi dan mampu mengemban amanah rakyat dengan baik.

"Mari kita bersatu mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Muba dalam membangun Kabupaten Muba yang kita cintai," pungkasnya.

Satu Komando, Satu Frekuensi untuk Muba

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sedang bertransformasi! Di bawah kepemimpinan Bupati HM Toha dan Wakil Bupati Rohman, langkah cepat diambil pasca-pelantikan melalui Rapat Staf Jajaran Pemkab Muba 2025.

Tujuan utama memastikan roda pemerintahan berputar efektif, efisien, dan selaras dengan program nasional yang berpihak kepada masyarakat.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Serasan Sekate ini dipimpin Bupati Muba HM Toha yang diwakili Wabup Rohman.

Wabup Rohman menekankan, sinergi lintas OPD adalah kunci utama untuk menjalankan program pembangunan yang efektif dan efisien.

Ia mengajak semua pihak untuk menyatukan visi demi mewujudkan Muba yang lebih maju dan sejahtera, mempercepat Program Prioritas pro rakyat yang telah ditetapkan.

"Kami sadar, saya dan Pak Bupati HM Toha bukan berasal dari birokrasi. Namun, kami ditakdirkan untuk memimpin Kabupaten Muba ini. Mari kita bergerak dalam satu komando, satu frekuensi, untuk membangun dan melayani masyarakat lebih baik," serunya dengan semangat.

Rohman juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program kerja yang sejalan dengan kebijakan pusat.

Ia mengingatkan agar setiap langkah diambil dengan hati-hati dan mengikuti prosedur yang berlaku.

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak hanya sejalan dengan program nasional, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan

masyarakat Muba. Disiplin, sinergi, kolaborasi, dan kekompakan dalam birokrasi adalah hal yang tak bisa ditawar," tambahanya.

Tak hanya itu, Wabup Rohman meminta setiap OPD untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Sementara Sekretaris Daerah Dr H Apriyadi bersama sama para kepala OPD dan camat menyatakan kesiapan

mereka untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan mendukung setiap program yang dirancang untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Muba.

Dengan semangat baru dan komitmen yang tinggi, Pemkab Muba Menjalankan Visi Misi Muba Maju Lebih Cepat dan siap menghadapi tantangan dan membawa perubahan yang signifikan demi kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin ke depannya. •





MENYUSURI KAMPUNG ARAB AL MUNAWAR PALEMBANG

Kampung Arab Al Munawar terletak di kota Palembang, kampung di Sumatera Selatan yang menarik.

Bukan hanya karena tergolong tua, destinasi wisata ini nilai sejarahnya juga tak luput dari perhatian. Desa wisata yang terletak di tepi Sungai Musi yang disebut "Laot" atau laut oleh masyarakat, kampung ini memiliki banyak kejutan dan pesona.

Kota Palembang tidak hanya memiliki sejarah panjang dalam perdagangan dan kejayaan maritim, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai etnis dan budaya.

Salah satu yang paling menarik adalah komunitas Arab yang telah menetap selama berabad-abad. Kampung Arab di Palembang, khususnya Kampung Al-Munawar, menjadi saksi hidup akulturasi budaya Arab dengan budaya lokal.

Sejarah Kampung Arab di Palembang Keberadaan Kampung Arab di Palembang tidak lepas dari sejarah perdagangan maritim yang berkembang sejak era Kesultanan Palembang Darussalam.

Para pedagang dari Timur Tengah, khususnya dari Hadramaut, Yaman, mulai menetap di Palembang sejak abad ke-17. Mereka menikah dengan penduduk setempat dan membentuk komunitas yang hingga kini masih eksis.

Kampung Arab Al-Munawar sendiri dikenal sebagai salah satu permukiman tertua di Palembang yang dihuni oleh keturunan Arab. Nama Al-Munawar berasal dari keluarga besar yang mendominasi kawasan ini.

Kampung Arab Al-Munawar terletak di tepian Sungai Musi, tidak jauh dari ka-

wasan Benteng Kuto Besak. Salah satu daya tarik utama kampung ini adalah rumah-rumah kuno yang berusia ratusan tahun.

Rumah-rumah di Kampung Arab memiliki ciri khas

Arsitektur perpaduan Palembang dan Timur Tengah. Rumah-rumah berbentuk rumah panggung khas Palembang

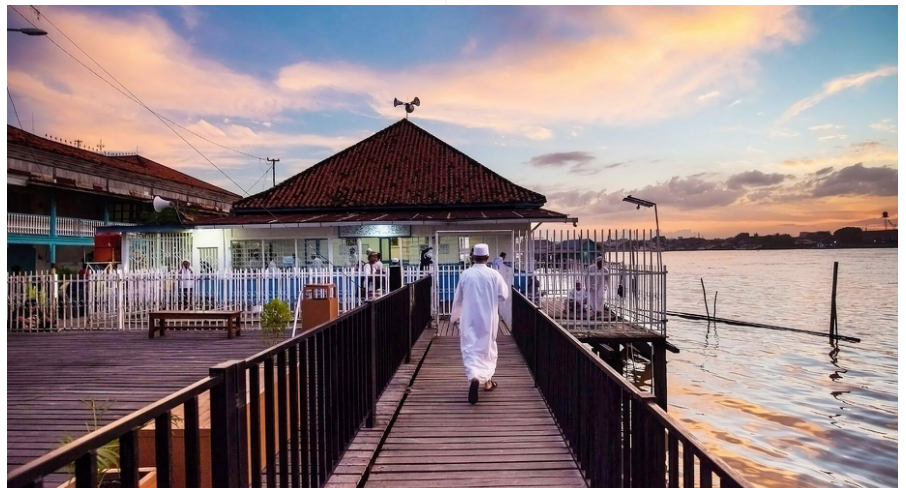
ghuninya.

Kehidupan Sosial dan Budaya

Masyarakat di Kampung Arab Palembang masih memegang teguh tradisi nenek moyang mereka. Beberapa tradisi yang masih lestari hingga kini antara lain:

1. Perayaan Maulid Nabi

Setiap tahun, warga Kampung Arab



dengan sentuhan ornamen khas Timur Tengah, seperti pintu dan jendela besar berukir.

Material bangunan yang tahan lama. Beberapa rumah dibuat dengan kayu ulin yang dikenal kuat dan tahan terhadap perubahan cuaca.

Nuansa klasik dan religius. Sebagian besar rumah memiliki mushola kecil, mencerminkan kehidupan religius pen-

mengadakan perayaan Maulid Nabi dengan meriah. Acara ini diisi dengan pembacaan shalawat, doa bersama, dan pembagian makanan khas Arab seperti roti maryam dan nasi kebuli.

2. Pernikahan Adat Arab-Palembang

Pernikahan di komunitas Arab Palembang memiliki keunikan tersendiri. Biasanya, prosesi akad nikah dilakukan

dengan adat Arab, sementara resepsi bisa menggabungkan unsur budaya Palembang. Pakaian pengantin pria sering menggunakan jubah putih, sedangkan pengantin wanita mengenakan gaun panjang berhijab.

3. Kuliner Khas Arab-Palembang

Kampung Arab juga terkenal dengan kuliner khasnya yang merupakan perpaduan cita rasa Arab dan Palembang, seperti:

Nasi Kebuli – Nasi berbumbu khas Timur Tengah yang disajikan dengan daging kambing.

Martabak Arab – Berbeda dari martabak biasa, martabak Arab lebih tebal dan kaya rempah.

Kopi Arab – Kopi dengan campuran kapulaga dan kayu manis yang memiliki aroma khas.

Peran Kampung Arab dalam Penye-

ini dengan merenovasi beberapa rumah tua tanpa menghilangkan nilai historisnya.

Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Kampung Arab, mereka bisa menikmati:

1. Wisata sejarah dan budaya dengan menyusuri rumah-rumah tua.
2. Wisata kuliner khas Arab-Palembang di rumah makan lokal.
3. Wisata religi dengan mengunjungi masjid dan mengikuti kegiatan keagamaan.

Kampung Arab di Palembang bukan hanya sekadar permukiman biasa, tetapi juga warisan sejarah dan budaya yang masih hidup hingga kini.

Keunikan arsitektur, tradisi, kuliner, serta peran penting dalam penyebaran Islam menjadikannya sebagai destinasi yang wajib dikunjungi. Dengan pelestarian yang tepat, Kampung Arab dapat



baran Islam di Palembang

Selain sebagai tempat tinggal komunitas Arab, kampung ini juga berperan penting dalam perkembangan Islam di Palembang. Beberapa ulama besar berasal dari Kampung Arab, dan hingga kini, masjid-masjid di kawasan ini menjadi pusat kegiatan keagamaan.

Salah satu masjid terkenal adalah Masjid Al-Munawar, yang sering dijadikan tempat pengajian dan kegiatan dakwah.

Pariwisata dan Pelestarian Kampung Arab

Dalam beberapa tahun terakhir, Kampung Arab Al-Munawar menjadi salah satu destinasi wisata budaya dan religi di Palembang.

Pemerintah kota bersama warga setempat berusaha melestarikan warisan

terus menjadi bagian dari kekayaan budaya Palembang yang mendunia.

Suasana Ramadan di Kampung Arab Palembang

Ramadan selalu membawa nuansa khas di berbagai daerah di Indonesia, tetapi di Kampung Arab Palembang, suasana ini terasa begitu istimewa.

Kawasan yang kaya akan sejarah Islam ini masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang membuat bulan suci semakin berkesan.

Dari buka puasa di masjid bersejarah hingga arak-arakan sahur yang meriah, Ramadhan di sini penuh dengan kearifan lokal yang memikat.

Berbuka di Masjid Berusia

Ratusan Tahun

Saat azan Magrib berkumandang, Masjid Al-Munawar, salah satu masjid tertua di Palembang menjadi titik berkumpul bagi warga.

Di sini, berbuka puasa bukan sekadar makan bersama, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi antara keturunan Arab Hadramaut dan masyarakat lokal. Sajian khas Timur Tengah seperti nasi kebuli, roti maryam, dan teh tarik menjadi menu favorit yang selalu dinantikan.

Dendang Sahur, Tradisi yang Tetap Lestari

Suasana Ramadan di Kampung Arab tak hanya terasa saat berbuka, tetapi juga menjelang sahur. Warga memiliki tradisi Dendang Sahur yang mana sekelompok pemuda berkeliling kampung sambil memainkan bedug dan rebana.

Mereka membangunkan warga dengan lantunan shalawat dan nyanyian khas, menciptakan suasana yang syahdu sekaligus penuh kebersamaan.

Pasar Ramadan, Perpaduan Rasa Timur Tengah dan Lokal

Menjelang waktu berbuka, Kampung Arab berubah menjadi surga kuliner dadakan. Pasar Ramadan yang hanya buka di bulan puasa ini menawarkan berbagai makanan khas, mulai dari samosa, falafel, hingga olahan daging kambing.

Tak ketinggalan, kuliner khas Palembang seperti pempek dan tekwan tetap menjadi favorit, menambah keberagaman cita rasa yang bisa dinikmati pengunjung.

Indahnya Berbagi di Malam Lailatul Qadar

Ketika Ramadan memasuki 10 hari terakhir, suasana di Kampung Arab semakin syahdu. Warga berlomba-lomba bersedekah, membagikan makanan dan pakaian kepada anak yatim serta kaum dhuafa.

Beberapa keluarga bahkan membuka rumah mereka untuk para tamu yang ingin beritikaf atau menikmati sahur bersama, mencerminkan semangat kebersamaan yang begitu kental.

Ramadan di Kampung Arab Palembang bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga perayaan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. ●

BUBUR SURO, TRADISI BERBAGI TAKJIL BERBUKA DI MASJID TERTUA

Setiap bulan Ramadan, Masjid Al-Mahmudiyah atau Masjid Suro Palembang memiliki tradisi memasak dan membagikan bubur suro sebagai takjil berbuka puasa.

Masjid Suro ini berada di Jalan Ki Gede Ing Suro, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Jelang waktu berbuka puasa, banyak warga setempat yang mengantri dengan membawa tempat makan untuk dapat menikmati bubur suro yang dibagikan oleh pengurus masjid.

Tradisi membagikan bubur suro secara gratis selama Ramadan terus

13.30 WIB. Dana pembuatan bubur suro berasal dari swadaya masyarakat hingga jemaah masjid.

"Setiap hari, kami membagikan sekitar 600 sampai 800 porsi bubur suro secara gratis ke warga yang datang ke masjid maupun yang mau berbuka di masjid. Kalau resep bubur suronya, sudah ada dari turun temurun sejak lama," kata Sekretaris Masjid Suro, Hajrianto Akbar.

Setelah dimasak, bubur suro tersebut dibagikan di Masjid Suro setiap setelah salat Ashar pukul 16.00 WIB hingga bubur tersebut habis.

Hajrianto menjelaskan, setiap hari petugas menyiapkan 10 kilogram beras dan 2,5 kg daging dan tetelan, dan rempah-rempah pilihan. Bubur tersebut dimasak kurang lebih satu jam dan selalu diaduk hingga matang.

"Saat dimasak, harus terus diaduk agar bumbunya benar-benar meresap dan buburnya tidak gosong," ujarnya.

Selain dibagikan, bubur suro terse-

Suro, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, Sumatera Selatan.

Dibangun oleh seorang ulama besar, KH Abdurahman Delamat (Ki Delamat) di atas tanah wakaf milik Kiai Kiagus H Khotib Mahmud tahun 1889 dan selesai tahun 1891.

Masjid unik dengan ciri khas melayu ini, awalnya disebut dengan nama Masjid Suro. Lalu Kiagus H. Matjik Rosad, cucu dari Kiagus H Khotib Mahmud mengusulkan nama Al-Mahmudiyah, hingga akhirnya jadilah nama Al-Mahmudiyah.

Pada awal berdirinya, masjid ini ramai sekali dikunjungi masyarakat sekitarnya, baik untuk shalat maupun menimba ilmu agama kepada Kiai Delamat.

Namun, Tuan Residen waktu itu tidak menghendaki masjid tersebut dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan dakwah Islam. Pemerintah Kolonial khawatir masyarakat Palembang akan berontak kepada Kompeni.

Akhinya, Kiai Delamat dipanggil oleh



dilakukan secara turun temurun oleh pengelola Masjid Suro Palembang.

Bubur suro identik dengan rasa gurih, asin, sedikit berlemak dan mengenyangkan. Menu ini biasanya diburu para warga, sebagai salah satu menu takjil berbuka puasa.

Sebelum dibagikan, pengurus masjid terlebih dahulu memasak bubur tersebut di samping masjid sekitar pukul

but juga disediakan untuk masyarakat yang akan buka puasa bersama di Masjid Suro tersebut.

Sejarah Masjid AL-Mahmudiyah Atau Masjid Suro

Masjid Besar Al-Mahmudiyah atau Masjid Suro adalah salah satu masjid tertua di kota Palembang. Masjid ini berlokasi di jalan Jalan Ki Gede Ing

Tuan Residen dan diperingatkan untuk tidak lagi menyebarkan Islam. Bersama itulah keluar larangan menyelenggarakan shalat Jumat. Kiai Delamat pun diperintahkan untuk meninggalkan kota Palembang karena dianggap membahayakan Pemerintah Hindia Belanda.

Ia akhirnya menetap di Dusun Sarika hingga wafatnya dan di makamkan di Masjid Babat Toman. Namun, oleh

anaknya, KH Abdul Kodir dan KH Muhammad Yusuf, jenazah Kiai Delamat dipindahkan kembali ke Palembang dan dimakamkan di belakang mimbar khatib.

Tetapi, karena tidak disetujui Tuan Residen, akhimya jenazahnya dipindahkan kembali ke Pemakaman Jambangan di belakang Madrasah Nurul Falah, Kelurahan 30 Ilir, Palembang.

Pada masa penjajahan Belanda, Masjid Suro ini pernah dibongkar dan dilarang untuk dipergunakan sebagai tempat ibadah selama kurang lebih 36 tahun. Setelah kepengurusan masjid diserahkan kepada Kiai Kgs. H. Mahmud Usman atau Kiai Khotib, akhimya nama masjid ini berubah menjadi Masjid Al-Mahmudiyah sesuai nama pengurusnya.

Setelah Kiai Kgs. H. Mahmud Usman meninggal dunia maka sekitar tahun 1343 H/1919 M diadakanlah pertemuan antara pemuka agama dan masyarakat di Kelurahan 30 Ilir untuk membentuk kepengurusan masjid yang baru.

Ini atas prakarsa Kiai Kiemas H. Syekh Zahri. Maka, terpilih lah kepengurusan bam yang diketuai oleh Kgs H.M. Ali Mahmud.

untuk memperingati hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro yang bertepatan dengan 1 Muharram.

Dilansir dari laman Nahdlatul Ulama (NU) Online, bubur Suro diambil dari kata Asyuro, bubur yang komposisinya terdiri atas berbagai macam biji-bijian mulai dari beras putih, beras merah, kacang hijau, dan beberapa jenis biji-bijian lainnya yang kemudian dimasak menjadi bubur.

Kemunculan bubur Suro merupakan wujud untuk memperingati hari

tujuh yang berasal dari penggunaan tujuh jenis kacang yang terdiri dari kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang mede, hingga beberapa kacang lainnya.

Angka tujuh menggambarkan tujuh hari dalam satu minggu sehingga bagi yang menyantap bubur Suro menjadi doa agar selalu diberi keberkahan dan kelancaran di setiap harinya. Meski tidak sepopuler dulu, bubur Suro masih dijumpai di Pulau Jawa Timur, seperti Madura hingga wilayah Jawa Tengah



Di masa kepengurusannya, pada tahun 1920, masjid ini mulai dibongkar untuk diperbaiki. Pada tahun 1925 dibangun menara masjid Yang lebih penting bagi masyarakat, diperbolehkannya kembali shalat Jumat oleh Tuan Residen.

Asal-usul Bubur Suro

Awalnya bubur Suro dihidangkan

di mana Nabi Nuh selamat setelah 40 hari mengarungi banjir besar. Dari kisah tersebut, maka tradisi bersedekah dengan bubur Suro semakin berkembang di tengah masyarakat memiliki landasan yang tidak sembarang dilakukan.

Makna di Balik Bubur Suro

Bubur Suro terkandung pada angka

lainnya yang disajikan menjelang malam 1 Muharram.

Selain dinikmati bersama keluarga dan kerabat terdekat, bubur Suro menjadi salah satu sajian yang sering dibagikan secara bersamaan di masjid sebagai bentuk sedekah dan berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan utamanya saat menjelang 1 Suro. •



MASIH MEMAKAI WARISAN SHIN TAE YONG

Skuad Timnas Indonesia ternyata tidak banyak berubah meski sudah ditangani pelatih baru.

Namun Garuda Calling kali ini bakal menjadi debut bagi pelatih Patrick Kluivert sejak menggantikan Shin Tae-yong.

Hanya saja meski sudah terbelang agak lama berada di Indonesia, pelatih asal Belanda ini masih saja belum leluasa mengenal pemain berkualitas dari produk lokal di Liga 1 Indonesia. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan di skuad Timnas Indonesia sejak ditangani Patrick Kluivert.

Ini terbukti dari 27 nama panggilan Timnas Indonesia terbaru, pemain-pemainnya ternyata sebagian besar masih sama bahkan terkesan masih memakai warisan peninggalan Shin Tae-yong.

Yang ada rasa baru, hanya munculnya nama Septian Bagaskara dan Ole Romeny, serta mulai menghilangnya nama Asnawi Mangkualam, Witan dan Sayuri bersaudara.

Nama-nama lama yang sempat tidak dimainkan Shin Tae Yong seperti Elkan Baggott dan Saddil Ramdani juga tak kunjung mendapat panggilan kembali.

Demikian juga nama tiga pemain yang sedang menjalani proses menjadi WNI (hari ini): Emil Audero, Joey Pelupessy dan Dean James, juga belum masuk daftar panggilan.

Namun kabarnya, ketiga pemain baru naturalisasi ini akan masuk daftar tunggu, jika dalam sepekan ini ada pemain yang diganti karena sebab cedera atau penurunan performa.

Secara keseluruhan jika dihitung-hitung, dari 27 pemain yang dipanggil, hanya 9 pemain yang berasal dari klub lokal liga 1: Dewa United (3), Persija (2), Persebaya, Borneo, Persis, PSS (1).

Sisanya 18 pemain adalah abroad: Belanda (5), Inggris (4), Belgia (2), Italia, Denmark, USA, Australia, Japan, Malaysia dan Thailand (1).

Tiga pemain yang sebelumnya menjadi andalan di era Shin Tae-yong mulai ditepikan oleh Patrick Kluivert. Mereka itu adalah Asnawi Mangkualam (Port FC Thailand), Yakob Sayuri (Malut United), dan Witan Sulaeman (Persija).

Di luar Witan yang berkurang menit bermainnya, Asnawi dan Yakob sebenarnya masih jadi andalan bersama klubnya masing-masing. Namun keduanya belum dilirik oleh Patrick Kluivert untuk bulan ini.

Ada hal yang cukup mengejutkan, dari 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ternyata tidak ada satupun dari Persib Bandung. Padahal klub ini merupakan pimpinan klasemen Liga 1 Indonesia saat ini.

Ada nama Mark Klok yang sempat digadang-gadang akan masuk skuad Timnas Indonesia pilihan Patrick Kluivert. Namun nyatanya sang pemain tidak masuk skuad pilihan Patrick Kluivert.

Padahal Mark Klok berharap ia bisa bermain di Timnas Indo-

nesia bersama Thom Haye. Hal ini tentu cukup mengecewakan karena inilah kesempatan terakhir baginya di Timnas Indonesia.

Tidak Menyangka Masuk Skuad

Meski ada kecewa karena tidak masuk skuad namun ada juga yang merasa gembira dan bersyukur bisa bergabung

stagram Pribadinya.

Kemudian Patrick Kluivert memanggil dua pemain Dewa United yakni Septian Bagaskara dan Egy Maulana Vikri.

Egy Maulana Vikri juga pemain paling subur di skuad Garuda sekarang dengan catatan delapan gol dari 27 laga.

Penyerang berusia 24 tahun ini unggul tiga gol dari barisan pencetak gol



dengan Patrick Kluivert

Salah satunya adalah Jordi Amat merasa sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan Patrick Kluivert.

Jordi Amat kemudian berjanji bakal memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia.

Bangga memakai warna-warna Indonesia sekali lagi."

"Suatu kehormatan yang datang dengan tanggung jawab besar. Kami akan memberikan segalanya," tulis Jordi Amat dilansir dari akun pribadinya di in-

terbanyak berikutnya, Ricky Kambuaya, Marselino Ferdinan, dan Ramadhan Sananta yang masing-masing mencetak lima gol.

Sementara Septian Bagaskara masuk dalam keinginan Patrick Kluivert sejak lama. Kini ia menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia di skuad kualifikasi Piala Dunia 2026.

Persaingan Semakin Ketat

Banyaknya pemain yang dinilai punya potensi tinggi untuk bergabung

Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 :

GK Nadeo Argawinata/Borneo
GK Ernando Ari/Persebaya
GK Maarten Paes/Dallas (USA)
DF Rizky Ridho/Persija
DF Muhammad Ferarri/Persija
DF Pratama Arhan/Bangkok Utd (THA)
DF Jordi Amat/Johor DT (MAL)
DF Sandy Walsh/Yokohama (JPN)
DF Justin Hubner/Wolves (ENG)
DF Shayne Pattynama/Eupen (BEL)
DF Jay Idzes/Venezia (ITA)
DF Calvin Verdonk/NEC (NED)
DF Mees Hilgers/Twente (NED)
DF Kevin Diks/Copenhagen (DEN)
MF Ricky Kambuaya/Dewa United
MF Egy Maulana/Dewa United
MF Marselino Ferdinan/Oxford (ENG)
MF Nathan Tjoe-A-On/Swansea (ENG)
MF Ivar Jenner/Jong Utrecht (NED)
MF Thom Haye/Almere (NED)
MF Eliano Reijnders/Zwolle (NED)
FW Ramadhan Sananta/Persis Solo
FW Hokky Caraka/PSS Sleman
FW Septian Bagaskara/Dewa United
FW Rafael Struick/Brisbane Roar (AUS)
FW Ragnar Oratmangoen/Dender (BEL)
FW Ole Romeny/Oxford (ENG)

dengan skuad Patrick Kluivert membuat persaingan terasa nyata. Hal ini dialami beberapa pemain.

Untuk di posisi full back kanan dan winger kanan misalnya, Yakob Sayuri kehilangan kesempatan untuk bermain bersama namun nyatanya tak dilirik Patrick Kluivert.

Perlu diketahui, di posisi full back kanan, terdapat Sandy Walsh dan Kevin Diks, sedangkan di area winger kanan ada nama Egy Maulana Vikri, Eliano Reijnders hingga Ole Romeny.

Demikian juga Ole Romeny akan menghadapi persaingan yang bisa dibilang sengit.

Selain Ole, Patrick Kluivert juga memanggil lima pemain lain yang berposisi sebagai penyerang.

Kelima pemain itu adalah Septian Bagaskara, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struick, Hokky Caraka, dan Ramadhan Sananta.

Kendati demikian, Ole yang merupakan pemain profesional tidak takut dengan persaingan.

Ole Romeny menegaskan bahwa ia siap bersaing untuk mendapatkan tempat utama di Skuad Timnas Indonesia.

Bomber keturunan Medan, Sumatera Utara, tersebut bahkan mengaku ingin berkontribusi penuh untuk Timnas Indonesia. •

TANPA TRIO NATURALISASI, SKUAD BISA BERUBAH

Ketua Umum PSSI Erick Thohir, optimis dengan kehadiran ketiga pemain naturalisasi baru semakin menambah kekuatan Timnas Indonesia. Sayangnya trio pemain itu tidak masuk skuad yang dibawa dan didaftarkan Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.

Kehadiran ketiga pemain ini cukup memberikan semangat bagi suporter Timnas Indonesia. Sehingga meski tidak masuk dalam skuad yang didaftarkan namun kemungkinan akan terjadi perubahan

"Kehadiran Joey, Dean, dan Emil tentu akan menambah kekuatan Timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya. Tentu bergabungnya mereka akan menambah pilihan dan variasi formasi yang akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert. Selain itu kedalaman tim juga semakin lengkap," kata Erick Thohir.

Erick menambahkan ketiga pemain ini sudah melakukan proses pembuatan KTP dan paspor.

Proses selanjutnya, tiga pemain ini akan melakukan proses perpindahan federasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain.

Dengan demikian akan terjadi penambahan skuad Timnas Indonesia dari 27 menjadi 30 pemain. Dari jumlah tersebut nantinya akan diambil Patrick Kluivert sekitar 26 pemain untuk didaftarkan ke skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026.

Beberapa pemain mengaku sangat antusias ketika namanya masuk dalam skuad Patrick Kluivert untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ole Romeny misalnya, pemain Oxford United itu tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya setelah menerima panggilan dari Skuad Garuda.

"Pertandingan pertama melawan Australia akan datang. Saya bersemangat untuk itu," ungkap Ole Romeny yang baru menjalani naturalisasi bersama Geydens Dion Markx.

"Saya memilih Indonesia karena ingin menjadi bagian penting dalam tim, negara, dan juga kemajuan sepak bolannya," ujarnya.

"Ketika ke sana, saya sempatkan waktu bermain bola bersama anak-anak di desa."

"Itulah mengapa saya sepatok (naturalisasi) dan juga untuk menginspirasi mereka," kata dia.

Perasaan yang sama diungkapkan winger Timnas Indonesia Eliano Reijnders yang sempat terpinggirkan oleh Shin Tae Yong karena dianggap kalah bersaing dengan pemain lainnya.

Untuk mengungkapkan rasa bangganya pada Timnas Indonesia, Eliano dis-



ebut-sebut tengah merayu rekan satu timnya di PEC Zwolle untuk gabung ke Timnas Indonesia.

Namun, yang menarik perhatian adalah momen ketika ia mengarahkan kamera ke Tristan Gooijer, fullback kanan klub yang tengah dipinjamkan dari Ajax Amsterdam U-21.

Tidak hanya itu, Reijnders juga menuliskan keterangan yang semakin memperjelas maksudnya.

Tristan, come to Indonesia," tulis Eliano dengan tagar dan emoji hati.

Tristan adalah pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Di klubnya saat ini, PEC Zwolle, Tristan Gooijer biasa bermain di bek kanan. Akan tetapi, dia juga bisa diposisikan sebagai bek tengah atau kiri.

Tristan Gooijer sendiri telah beberapa kali memberikan indikasi ketertarikannya bergabung dengan Timnas Indonesia.

Lain halnya dengan Rizky Ridho yang performanya sempat menu-run hingga terancam terdepak dari skuad Timnas Indonesia, bek tengah Persija Jakarta ini berhasil bangkit.

Ia mencetak gol spektakuler nyaris dari tengah lapangan saat

timnya menghadapi Arema Malang dalam lanjutan Liga 1.

Gol bermula dari serangan Arema yang bisa dihalau para pemain Persija. Gelandang Ryo Matsumura yang melihat Ridho tak terkawal memberikan bola daerah. Ridho berlari kencang mengejar bola.

Tanpa mengontrol bola, Ridho yang melihat posisi kiper Arema, Lucas Frigeri terlalu maju, langsung menendang bola ke arah gawang. Gol itu seakan membuktikan kalau Rizky Ridho belum habis dan layak memperkuat Timnas Indonesia, siapa pun pelatihnya.

Zona Asia putaran ketiga.

Ini menjadi debut pertama bagi Septian Bagaskara yang selama ini tidak pernah dilirik Shin Tae Yong.

Penampilan Septian Bagaskara di BRI Liga 1 bersama Dewa United menjadi salah satu alasan namanya masuk radar Timnas Indonesia.

Striker berusia 27 tahun asal Kediri itu telah mencetak tujuh gol dan satu asist dalam 25 penampilannya musim ini, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak dari pemain lokal di liga.

Ia hanya kalah dari rekan setimnya di



Septian Bagaskara Jadi Pembeda

Sebagian besar skuad Timnas Indonesia ini merupakan hasil warisan Shin Tae Yong atau sudah pernah dipanggil sebelumnya. Namun ada satu pemain yang menjadi pembeda yakni Septian Bagaskara.

Septian Bagaskara tengah menjadi perbincangan hangat karena namanya disebut-sebut menjadi bagian dari Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Dewa United, Egy Maulana Vikri, yang mencetak 11 gol. Tujuh gol Septian musim ini dicetak ke gawang lima klub berbeda, yakni Persib Bandung (dua gol), Persis Solo, PSBS Biak, Semen Padang, dan Bario Putera (dua gol). Hebatnya, banyak dari gol tersebut datang saat ia masuk sebagai pemain pengganti atau supersub.

Septian Bagaskara sempat menimba ilmu di Manchester United Soccer School pada 2015, di mana ia berlatih di bawah bimbingan legenda The Red Devils, Andy Cole. Ia bahkan mencetak gol dalam pertandingan melawan tim U-17 Manchester United.

Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan bermain untuk Persedikab Kediri pada 2016 sebelum bergabung dengan Persik Kediri setahun kemudian. Di Persik, ia menjadi andalan tim dan membantu mereka menjuarai Liga 3 pada 2018 serta Liga 2 pada 2019, yang membawa klub promosi ke Liga 1 pada 2020.

Pada 2022, Septian hijrah ke RANS Nusantara FC sebelum akhirnya bergabung dengan Dewa United pada 2023. ●





MITRA OJOL MENANTI THR

Presiden Prabowo meminta aplikator untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pengemudi ojek daring atau ojol dalam bentuk tunai.

"Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan layanan berbasis aplikasi memberi bonus hari raya dalam bentuk uang tunai dan mempertimbangkan keaktifan kerja," kata Prabowo usai bertemu CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Patrick Walujo, Grab Indonesia, hingga pengemudi ojol di Istana, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Prabowo mengatakan, saat ini ada 250 ribu pengemudi atau kurir daring yang aktif bekerja secara penuh alias full time. Selain itu, ada 1 hingga 1,5 juta pengemudi yang bekerja paruh waktu alias part time.

"Besaran dan bonus akan disampai-

kan Menteri Ketenagakerjaan," kata Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan, pengemudi ojol akan mendapatkan THR dalam menyambut Idulfitri 2025. THR tersebut akan diberikan dalam bentuk uang tunai. Namun, aturan mengenai kebijakan ini masih dalam tahap finalisasi, terutama terkait formulasi THR bagi pengemudi ojol.

Yassierli menyebutkan, beberapa komponen yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan formula ini adalah jenis layanan, jenis angkutan, dan jam kerja pengemudi.

"Kami ingin memastikan aturan ini telah disepakati semua pihak sebelum diumumkan. Kami berharap dalam waktu dekat aturan ini bisa segera diberlakukan. Ini adalah hasil musyawarah antara aplikator dan pengemudi ojol," ujar Yassierli di Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.

Momen Spesial

Gojek secara resmi menyatakan akan memberikan bonus hari raya dalam ben-

tuk uang tunai kepada mitra pengemudi lewat program Tali Asih Hari Raya.

Presiden Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, mengatakan, Gojek sebelumnya juga telah membuat program Ramadan bagi para mitra driver. Sebab, menurutnya, momen Ramadan merupakan momen spesial sekaligus tantangan bagi para mitra.

"Kali ini, dirancang lebih istimewa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Gojek menghadirkan program Tali Asih Hari Raya untuk memberikan manfaat nyata agar mitra driver dapat menjalani Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan lebih bermakna," kata Catherine dikutip dari siaran pers, Senin, 10 Maret 2025.

Melalui program Tali Asih Hari Raya, Gojek akan menyalurkan Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai kepada Mitra Driver yang memenuhi kriteria tertentu. Bonus uang tunai ini akan diterima Mitra Driver sebelum Hari Raya Idulfitri.

Dia menyebut program ini merupakan salah satu solusi dari Gojek untuk mendukung mitra, sekaligus menjalan-



kan imbauan Presiden Prabowo Subianto mengenai Bonus Hari Raya untuk mitra pengemudi online dalam bentuk uang tunai.

"Gojek terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan transparansi dalam pengalokasian dana bagi mitra," katanya.

Melalui program Tali Asih Hari Raya, Gojek berupaya para mitra driver dapat menjalani Ramadan dengan damai dan merayakan Idulfitri dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga mereka.

Hal senada juga dilakukan Grab Indonesia yang merespons imbauan Presiden Prabowo kepada aplikator untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol dalam bentuk tunai. Grab mengadakan program Bonus Hari Raya (BHR) melalui program bonus kinerja khusus.

"Kolaborasi antara pemerintah dan industri ini adalah bukti nyata bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menghadirkan dampak positif yang lebih luas," kata Group CEO & Co-Founder Grab, Anthony Tan, dalam siaran pers, Senin, 10 Maret 2025.

Dia menyebut Grab akan terus berinovasi dan mencari cara terbaik untuk mendukung mitra pengemudi dan masyarakat luas.

"Kami senang dapat berkontribusi dalam inisiatif yang memberikan manfaat langsung untuk mitra pengemudi yang menjadi tulang punggung layanan transportasi dan pengantaran di Indonesia," kata Anthony.

Program bonus kinerja khusus ini disebutnya merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas kontribusi para mitra dalam menyambut Hari Idulfitri. Anthony juga mengatakan program bonus ini menyesuaikan dengan kondisi finansial perusahaan.

Adapun, Grab menetapkan kriteria penerima bonus ini berdasarkan keaktifan pengemudi, termasuk jumlah pesanan yang diselesaikan; tingkat penyelesaian pesanan; jumlah hari dan jam online, serta rating pengemudi.

Country Managing Director, Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan kriteria ini sesuai dengan layanan terbaik dari dedikasi mitra pengemudi aktif yang menyelesaikan pesanan setiap hari.

"Program bonus ini dirancang untuk memberikan penghargaan secara adil,

di mana tingkat apresiasi yang diterima mencerminkan tingkat keaktifan, kontribusi, dan pencapaian masing-masing mitra," tambahnya.

Selain program bonus kinerja, Grab juga menghadirkan program "Traktir Driver", yakni program yang memungkinkan pelanggan membeli paket makanan dengan harga khusus untuk diberikan secara langsung kepada mitra.

Grab juga mendorong pelanggan untuk menunjukkan apresiasi dengan memberikan tip lebih kepada pengemudi. Semua tip yang diberikan oleh pelanggan akan diterima sepenuhnya oleh mitra tanpa potongan dari Grab.

Sementara itu, Maxim Indonesia menyebut pemberian THR kepada mitra

kan THR kepada mitra pengemudi berdasarkan regulasi dan kondisi ekonomi yang ada saat ini. Sebagai gantinya, di momen Ramadan dan Hari Raya Lebaran 2025 ini, Maxim mempersiapkan berbagai skema program Bantuan Hari Raya untuk mitra pengemudi di seluruh kota operasional Maxim di Indonesia.

Beragam bantuan tersebut di antaranya adalah pemberian bantuan bahan pokok kepada mitra driver dan masyarakat yang membutuhkan, memberikan pengurangan komisi aplikasi untuk mitra yang menyelesaikan orderan, hingga santunan kecelakaan maupun musibah yang menimpa mitra pengemudi.

Menanggapi langkah Maxim Indo-



pengemudi tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan Nomor 118 Tahun 2018.

"Karena status antara Maxim dan juga mitra pengemudi adalah hubungan kemitraan, bukan merupakan hubungan pemberi kerja dan karyawan," kata Spesialis Humas Maxim Indonesia, Yuan Ildal Khoir, dalam keterangan resminya, Kamis, 6 Maret 2025.

Terkait pemberian THR dalam bentuk uang tunai, Maxim menyatakan belum akan memberikannya di tahun ini. "Sangatlah tidak tepat apabila tuntutan pemberian THR dilaksanakan dan diformulasikan dalam waktu yang sangat singkat," ujarnya.

Maxim Indonesia juga tidak akan mampu secara finansial untuk memberi-

nesia, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, kembali mengingatkan sudah ada imbauan dari Presiden Prabowo agar para aplikator memberikan THR kepada pengemudi ojol yang diberikan dalam bentuk tunai.

"Sudah jelas kebijakan dan permintaan dari Bapak Presiden, kita berharap itu diperhatikan," kata Yassierli di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Yassierli akan merilis surat edaran (SE) yang mengatur soal imbauan aplikator untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa, 11 Maret 2025. Menurutnya, aturan tersebut juga mengatur soal sanksi bagi aplikator yang enggan menerapkan imbauan tersebut.

"Besok kita tunggu untuk detail terkait surat edarannya seperti apa," ujarnya. •



PEMERINTAH KURANG DANA KEREK ROYALTI MINERBA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan kenaikan tarif royalti atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor mineral dan batu bara (minerba). Usulan ini tengah dikaji melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan keuntungan dari sektor minerba tidak hanya dinikmati oleh perusahaan semata, tetapi juga dibagi dengan negara.

"Prinsipnya sharing benefit, jadi kalau ada keuntungan jangan dinikmati perusahaan semua, tetapi harus dibagi," ujar Dadan, Selasa, 11 Maret 2025.

Sebagai bagian dari proses revisi, pemerintah telah mengadakan konsultasi publik dengan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Konsultasi tersebut juga mencakup revisi PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara.

"Dalam konteks ekonomi nasional, semua pihak, termasuk korporasi, memiliki pendapat yang sama," kata Dadan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu

Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menekankan, revisi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan penerimaan negara, bukan untuk memberatkan industri pertambangan.

"Tidak ada maksud untuk membebani salah satu pihak atau industri. Kami berharap industri pertambangan tetap berkelanjutan," kata Tri Winarno, Sabtu, 8 Maret 2025.

Saat ini, Kementerian ESDM masih menghitung besaran penyesuaian tarif yang akan diterapkan serta dampaknya terhadap penerimaan negara.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana melakukan amandemen royalti mineral dan batu bara. Dalam rancangan tersebut, pemerintah akan menaikkan tarif royalti bagi sejumlah komoditas mineral, seperti nikel, tembaga, hingga emas.

Dalam skema kontrak Izin Usaha Pertambangan (IUP), tarif royalti akan mengalami kenaikan sebesar 1 persen untuk batu bara dengan kadar kalori



hingga 4.200 serta yang berada di kisaran lebih dari 4.200 hingga 5.200, apabila Harga Batubara Acuan (HBA) mencapai atau melebihi USD90 per ton.

Hal yang sama berlaku untuk kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), di mana tarif royalti naik sebesar 1 persen untuk kategori kalori yang sama ketika HBA mencapai batas tersebut. Namun, khusus untuk Penerimaan Hasil Tambang (PHT) pada batu bara dengan kalori dan HBA serupa, tarifnya justru mengalami penurunan sebesar 1 persen.

Sementara itu, dalam kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang merupakan perpanjangan dari PKP2B, pemerintah akan melakukan perubahan pada rentang tarif yang berlaku. Selain itu, terdapat rencana penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan (PPH) bagi perusahaan pemegang kontrak IUPK, dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar 22 persen menjadi mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

"Jika (amandemen) disahkan, kami menilai usulan ini berpotensi menekan kinerja emiten produsen batu bara yang beroperasi dengan izin IUP seperti Bukit Asam (PTBA) dan PKP2B seperti Indo Tambangraya Megah (ITMG)," kata Investment Analyst Stockbit, Hendriko Gani, dalam risetnya, Selasa, 11

Maret 2025.

Selain itu, kenaikan tarif royalti untuk komoditas metal juga berpotensi menekan kinerja emiten produsen mineral seperti Vale Indonesia (INCO), Trimegah Bangun Persada (NCKL), Aneka Tambang (ANTM), Bumi Resources Minerals (BRMS), dan Amman Mineral Internasional (AMMN).

Berdasarkan rencana penyesuaian tersebut, komoditas yang akan mengalami kenaikan royalti paling tinggi adalah bijih tembaga dan feronikel.

"Dengan harga tembaga sebesar USD9.362 per ton pada Maret 2025,

royalti bijih tembaga berpotensi naik 3 kali lipat dari 5 persen menjadi 15 persen, sementara royalti feronikel naik 150 persen dari 2 persen menjadi 5 persen," beber Hendriko.

Sementara itu, untuk produsen batu bara dengan kontrak IUPK, dia menilai bahwa wacana penyesuaian rentang tarif berpotensi meningkatkan kinerja emiten terkait, mengingat HBA per Maret 2025 sebesar USD128 per ton. Emiten produsen batu bara yang beroperasi dengan kontrak IUPK adalah Bumi Resources (BUMI), Indika Energy (INDY), dan Adaro Andalan Indonesia



(AADI).

Selain batu bara, komoditas tembaga berpotensi mengalami kenaikan tarif royalti progresif yang cukup drastis, dari yang sebelumnya hanya 5 persen menjadi sekitar 10—17 persen dengan mengikuti Harga Mineral Acuan (HMA). Tarif royalti konsentrat tembaga juga diusulkan naik dari sebelumnya berlaku tarif tunggal 4 persen menjadi 7—10 persen mengikuti HMA.

Komoditas lainnya yakni emas juga berpeluang mengalami kenaikan tarif royalti progresif dari sebelumnya hanya di kisaran 3,75—10 persen menjadi 7—16 persen mengikuti HMA.

Nikel juga tak luput dari rencana penyesuaian tarif royalti. Dalam hal ini, tarif royalti progresif bijih nikel diusulkan naik dari sebelumnya berlaku tarif tunggal 10 persen menjadi 14—19 persen dengan mengacu HMA.

Komoditas turunannya yakni nikel matte juga direncanakan mengalami kenaikan tarif royalti progresif menjadi 4,5—6,5 persen mengikuti HMA dengan penghapusan windfall profit 1 persen. Sebelumnya, tarif tunggal yang berlaku untuk nikel matte adalah 2 persen.

Padahal, emiten-emiten pertambangan mineral tengah dilanda euforia seiring pemulihan harga bijih nikel global. Mengutip situs Trading Economics, dalam sebulan terakhir atau month to month (mtm), harga bijih nikel di pasar global melesat 6,47 persen mtm ke level USD16.426 per ton pada Selasa, 11 Maret 2025, pukul 18.00 WIB.

Salah satu emiten tambang nikel, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh terkait rencana penyesuaian tarif royalti mineral oleh pemerintah. Maklum, saat ini kebijakan tersebut masih di tahap usulan atau perencanaan.

"Kami tidak mau berspekulasi terlebih dahulu. Ditunggu saja," kata Chief Sustainability and Corp Affairs Officer Vale Indonesia, Bernardus Irmanto.

Walau begitu, INCO menyambut hangat lonjakan harga komoditas bijih

nikel global yang terjadi akhir-akhir ini lantaran tren demikian akan berkorelasi positif terhadap kinerja emiten tersebut.

Berpotensi Menekan Kinerja

Sementara itu, Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas, Muhammad Thoriq Fadilla, menilai, isu mengenai rencana penyesuaian tarif royalti untuk komoditas mineral patut menjadi perhatian lebih bagi emiten-emiten yang bergerak di industri tersebut. Kenaikan tarif royalti untuk komoditas mineral metal berpotensi menekan kinerja keuangan emiten produsen mineral.

"Jika revisi tarif royalti ini disahkan, maka emiten mineral metal akan menghadapi tekanan tambahan," kata Thoriq.

Senada, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer, menyatakan, harga komoditas mineral berisiko terkoreksi jika terjadi perubahan pada kondisi ekonomi global maupun kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah yang di-

sud mencakup amandemen tarif royalti mineral.

"Kebijakan ini dapat menekan margin keuntungan emiten produsen mineral," ujarnya.

Di luar faktor rencana penyesuaian tarif royalti, prospek emiten yang berada di sektor tambang mineral masih cukup menantang. Di sektor nikel misalnya, tren kenaikan harga komoditas ini diperkirakan hanya bersifat sementara. Sebab, fundamental utama nikel masih lemah terutama dari sisi permintaan.

Di pasar domestik sendiri, saat ini pasokan bijih nikel mengalami penurunan. Hal ini dapat membatasi kapasitas produksi smelter yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan emiten yang bersangkutan.

Kendati demikian, jika terdapat





ekonomi yang mendukung, seperti tanda-tanda pemulihan ekonomi China, maka ini bisa menjadi katalis bagi peningkatan permintaan nikel. Salah satu data penting yang perlu diperhatikan adalah data inflasi China yang dirilis pada akhir pekan nanti.

“Jika inflasi China mencatatkan kenaikan lebih tinggi dari bulan sebelumnya yaitu sekitar 0,5 persen, ini bisa menjadi sentimen positif bagi komoditas nikel,” ungkap Thoriq.

Vice President, Head of Marketing, Strategy and Planning at PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi, berpendapat, industri batu bara dinilai bakal menjadi subsektor pertambangan yang paling tertekan jika pemerintah jadi mengeksekusi rencana kenaikan tarif royalti komoditas minerba pada tahun ini.

Dia mengatakan, kenaikan tarif royalti komoditas minerba praktis bakal mendorong beban biaya operasional produsen tambang, khususnya batu bara dan nikel.

“Kenaikan terakhir pada PP 26/2022 dan jika kembali dinaikkan untuk batu bara kalori <4.200 kcal/kg menjadi 9 persen dan kalori 4.200—5.200 kcal/kg menjadi 11,5 persen, maka dapat menekan operasional,” ungkapnya.

Sektor pertambangan batu bara

menghadapi tahun yang berat pada 2025 setelah pemerintah mewajibkan ekspor komoditas tersebut mengacu pada harga batu bara acuan (HBA).

Tidak hanya itu, eksportir batu bara juga dihadapkan pada kebijakan wajib retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sebesar 100 persen selama 12 bulan. Kedua kebijakan tersebut berlaku bersamaan mulai 1 Maret 2025.

“Pada saat bersamaan, perusahaan batu bara juga makin tertekan di tengah koreksi harga komoditas. Kami memperkirakan stagnasi demand dari China dan India, hingga pengalihan energi baru terbarukan bakal mendorong penurunan harga (batu bara),” terang Oktavianus.

Proyeksi tersebut selaras dengan perkiraan Bank Dunia bahwa permintaan batu bara global berpotensi mengalami penurunan sebesar 12 persen pada 2025 dan 2026.

Namun, jika melihat data Minerba One Data Indonesia (MODI) Ditjen Minerba Kementerian ESDM, realisasi PNPB sektor tambang mencapai Rp121,74 triliun atau 107 persen di atas target.

“Maka kenaikan royalti komoditas minerba ini kemungkinan akan berdampak pada kenaikan PNPB, dengan asumsi tarif royalti dari batu bara akan mengalami kenaikan 9,5 persen hingga 12,5 persen dari tarif lama, sedangkan bijih nikel 40—90 persen dari tarif lama,” ujarnya.●



DINAMIKA SEMENANJUNG KOREA DALAM PERSPEKTIF INDONESIA

Buku berjudul Reunifikasi Korea: Game Theory yang ditulis wartawan senior Teguh Santosa mendapat pujian dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria. Wamen Komdigi menyebutnya sebagai karya yang berhasil memadukan tradisi akademik dan jurnalistik. Pujian Wamen Komdigi disampaikan dalam sambutan di acara peluncuran buku ini di Hall Dewan Pers, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa siang, 18 Februari 2025.

Peluncuran buku dihadiri sejumlah tokoh pergerakan dan aktivis yang mengenal Teguh sejak lama. Antara lain, Wamen Koperasi Ferry Juliantono yang juga Ketua Umum IKA Unpad, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mal-

larangeng, Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan, aktivis prodemokrasi Adhie Massardi, Komisaris PT PLN Andi Arief, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Abdullah Rasyid, pakar komunikasi politik Hendri Satrio, produser film dokumenter Dandhy Dwi Laksono, serta mantan anggota DPR RI Akbar Faizal dan Ramadhan Pohan, juga mantan Dubes RI di Jepang Yusron Ihza.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya, anggota Dewan Pers Totok Suryanto, dan Asep Setiawan juga hadir di tengah peluncuran bersama sejumlah wartawan senior dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Membahas konflik panjang dan prospek perdamaian di Semenanjung Korea, buku ini berpijak pada disertasi sang penulis di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung berjudul "Reunifikasi Korea dengan Keterlibatan Multipihak: Suatu Studi Melalui Game Theory".

Nezar juga mengatakan, dalam mendekati subjek penelitian, Teguh yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat dan kini memimpin

JMSI menggunakan dua pendekatan saling terkait. Pertama, pendekatan two-level games yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri setiap negara dipengaruhi oleh dinamika politik internal dan internasional. Kedua, game theory dengan setiap aktor berperan sebagai pemain yang berusaha menerapkan strategi terbaik mereka sambil di saat bersamaan menebak strategi lawan atau pesaing.

Selain itu, penulis yang mantan anggota Dewan Kehormatan PWI ini juga menggunakan pengalaman pribadi cukup panjang dalam berinteraksi dengan Korea Utara maupun Korea Selatan. Setidaknya sejak 2003 saat pertama kali berkunjung ke Pyongyang, ibu kota Korea Utara.

Anggota Lembaga Kerja Sama dan Hubungan Internasional (LKHI) PP Muhammadiyah itu telah belasan kali berkunjung ke Korea Utara untuk berbagai kegiatan, termasuk sebagai utusan khusus almarhumah Rachmawati Soekarnoputri untuk menyerahkan "Star of Soekarno" kepada Kim Jong Un yang diterima Presiden Presidium Kim Yong Nam pada 2015. Selain ke Korea Utara, Teguh juga kerap berkunjung ke Korea Selatan untuk berbagai kegiatan, seperti



memimpin delegasi wartawan Indonesia dan menjadi pembicara dalam Konferensi Wartawan Dunia.

"Hal-hal ini yang membedakan karya Mas Teguh dengan studi-studi lain yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai konflik dan prospek perdamaian di Semenanjung Korea. Selain itu, pengalaman sebagai wartawan membuat karya akademik ini menjadi mudah dan enak diikuti kalangan paling awam sekalipun," ujar Nezar lagi.

Di dalam penelitiannya, Teguh mengapresiasi "two state solution" yang disampaikan Kim Jong Un pada pertengahan Januari 2024 sebagai jalan untuk mengakhiri konflik panjang.

"Bila penyelesaian itu yang disepakati, Mas Teguh merekomendasikan peaceful co-existence di antara kedua Korea. Namun begitu, dia menilai bahwa usulan itu bisa jadi baru sebatas hasil sementara mengingat dinamika di Semenanjung Korea melibatkan aktor-aktor lain yang berkepentingan langsung dengan kawasan terus berlangsung," sambung Nezar.

Sebagaimana Nezar, Wamen Koperasi Ferry Juliantono juga memuji buku Teguh sebagai karya komprehensif dan memberikan perspektif strategis dalam memahami dinamika antara Korea Utara dan Korea Selatan.

"Saya sih mengusulkan (kepada Presiden Prabowo) agar Mas Teguh jadi special envoy Indonesia untuk Korea Utara," sambung salah seorang pimpinan Partai Gerindra ini.

Bukan hanya Wamen Nezar dan Wamen Ferry yang memuji karya Teguh. Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) yang didirikan budayawan Jaya Suprana juga mengakui Teguh sebagai penulis pertama dari Indonesia yang menulis tentang isu reunifikasi Korea.

Piagam dan medali MURI untuk Teguh diserahkan oleh Senior Manager MURI Awan Rahargo yang hadir mewakili Jaya Suprana. Ini adalah karya kedua Teguh yang mendapatkan piagam rekor MURI. Sebelumnya, pada 2023, Teguh juga mencatatkan rekor sebagai penulis buku berisi wawancara terbanyak dengan duta besar negara sahabat di Indonesia.

Selesai pemberian piagam dan medali MURI, acara berlanjut dengan bedah buku yang dimoderatori pengamat ko-

munikasi politik dan pendiri KedaikKOPI Hendri Satrio. Adapun pembicara dalam diskusi adalah Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi A. Mallarangeng yang pernah berkunjung ke Pyongyang pada 2010 sebagai utusan Presiden SBY, juga Pemimpin Redaksi Jakarta Post M. Taufiqurrohmah, dan mantan Dubes RI untuk Jepang (2013-2016) Yusron Ihza.

Andi Mallarangeng yang sebelum terjun ke dunia politik dikenal sebagai ilmuwan politik menekankan arti penting people to people contact menuju

lebih besar di panggung internasional, utamanya dalam menjadikan Indonesia sebagai juru damai di Semenanjung Korea. "Pak Prabowo punya ambisi internasional yang besar. Kalau ia ingin quick win, siapa tahu bisa berkontribusi untuk menawarkan jalan keluar konflik di Korea," ujarnya.

Adapun Dubes Yusron mengemukakan, sebagai seorang mantan wartawan dirinya bangga pada Teguh yang sangat serius dalam melakukan penelitian mengenai konflik di Semenanjung Korea. "Jadi kalau ada yang mengatakan



perdamaian kedua Korea. Tanpa itu, sulit rasanya Korea Utara dan Korea Selatan berdamai apalagi menjadi satu negara.

"Bung Teguh di ujung disertasinya juga kehilangan harapan untuk model penyatuan. Sehingga dia beralih pada two state solution. Mungkin kalau people to people contact sudah jalan, business to business contact sudah jalan, mungkin bisa," ujar Andi.

Sedangkan Taufiqurrohmah mengatakan, ini adalah saat yang tepat bagi Prabowo untuk mengambil peran

wartawan pantas jadi dubes, aku ini dulu juga wartawan, bisa jadi dubes. Mengapa tidak kawan ini (Teguh) juga jadi dubes?" ujarnya.

Menurut dia bekal memadai sebagai wartawan akan banyak manfaatnya dalam konteks hubungan internasional dan geopolitik global. Tak terkecuali dalam dinamika di Semenanjung Korea. "Wartawan akan memainkan peranan besar untuk membuat hubungan Korea Utara dan Korea Selatan menjadi lebih baik lagi," demikian Dubes Yusron. •



PEMBERANTASAN KORUPSI SETELAH 100 HARI

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Masa 100 hari pertama setelah pelantikan berakhir pada penghujung Januari 2025. Bagaimana dengan komitmen pemberantasan korupsi?

Nah, pada pertengahan Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan telah memberikan kesempatan kepada para koruptor mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri. Namun, hingga 100 hari pemerintahan berjalan, belum ada satu pun yang melapor dan mengembalikan hasil korupsi.

"Saya katakan sudah 100 hari mbok sadar, mbok bersihkan diri ya kan. Hai koruptor-koruptor yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang enggak malu. Tapi mbok ya kembaliin," ujar Prabowo saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin 19 Februari 2025.

Prabowo menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dan mempersilakan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para koruptor.

"Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari ini sudah 100 berapa hari ya. Apa boleh buat, ya terpaksa lah Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK silakan," tegasnya.

Usai pidato di depan Kongres Muslimat NU itu, serangkaian pengungkapan kasus dan perkara korupsi semakin banyak. Yang terbaru adalah penggeledahan kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan terkait korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menegaskan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil masih berstatus saksi usai kediamannya digeledah oleh penyidik di kasus korupsi Bank BJB. "(Status RK) Saksi ya," kata Setyo di Gedung KPK, Rabu, 12 Maret 2025.

Ketika ditanya kapan Kang Emil, nama ringkas Ridwan Kamil, bakal diperiksa di

kasus itu, Setyo tidak menjawab secara jelas dan menyerahkan soal pemeriksaan itu kepada penyidik KPK. "Ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu, penyidik direktur penyidikan, kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan mereka," ucap Setyo.

Dari kasus ini, KPK menyebut telah terjadi kerugian negara hingga mencapai miliaran rupiah dengan modus markup iklan melalui agensi lalu adanya kick back ke BJB. Sedangkan temuan awal kasus Bank BJB ini berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan hasil pemeriksaan bernomor 20/LHP/XVII.BDG/03/2024 yang keluar pada 6 Maret 2024, mengaudit pengelolaan anggaran promosi dan belanja iklan Bank BJB sepanjang 2021-2023, dengan total nilai mencapai Rp801 miliar. Salah satu temuan utama adalah belanja iklan media massa sebesar Rp341 miliar.

BPK menemukan adanya selisih mencurigakan. Dari Rp37,9 miliar tagihan iklan televisi ke Bank BJB, hanya Rp9,7 miliar yang bisa terverifikasi sebagai biaya riil. Selisih Rp28 miliar ini dianggap tak wajar, mengingat komisi agensi dalam kontrak seharusnya hanya 1-2 persen dari nilai iklan yang tayang.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), Yuddy Renaldi, mengundurkan diri di tengah penyelidikan dugaan korupsi iklan di bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu. Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan telah menerima laporan dari Komisar Bank BJB mengenai pengunduran diri tersebut. "Sikap itu menurut saya baik karena ini adalah tindakan personal. Sementara BJB sendiri adalah lembaga perbankan milik rakyat Jawa Barat," kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu, 5 Maret 2025. Dedi mengaku tidak mengetahui apakah keputusan Yuddy Renaldi terkait dengan penyelidikan yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ia memastikan pengunduran diri itu tidak akan mengganggu operasional Bank BJB. Pengganti Yuddy akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada April 2025.

Beberapa hari sebelum mengungkap-

kan kasus korupsi Bank BJB, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait perlengkapan pada rumah jabatan anggota DPR Tahun Anggaran 2020. Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar. "Untuk tersangka tujuh orang yaitu Indra Iskandar selaku PA (pengguna anggaran), dan kawan-kawan," kata Ketua KPK Setyo Budiyan-to, kepada wartawan, Jumat, 7 Maret 2025.

Namun Setyo belum merinci maupun

detail berapa total anggaran yang dilembungkan. Dia menyebutkan harga yang dipakai dalam pengadaan proyek itu diduga dibuat lebih mahal dibanding harga pasar. Proyek itu disebut bernilai Rp 120 miliar. Kerugian dalam kasus ini diduga mencapai puluhan miliar rupiah.

Sebelumnya lagi, pada akhir Februari 2025 Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja



menahan para tersangka lainnya Alasannya, masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP.

Sebelumnya KPK menyidik kasus dugaan korupsi terkait perlengkapan pada rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. KPK mengatakan ada dugaan markup harga pada kasus ini. "Kasusnya kalau nggak salah markup harga," kata Wakil Ketua KPK saat itu, Alexander Marwata, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2024.

Alexander belum menjelaskan secara

Sama (KKKS) periode 2018-2023. Dari sembilan tersangka tersebut, enam di antaranya adalah petinggi anak usaha Pertamina, sementara tiga lainnya disebut sebagai pihak 'broker'.

Tersangka Kasus Pertamina Oplosan dari anak usaha Pertamina antara lain, Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Agus

Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina; Edward Corne, VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga.

Sedangkan dari pihak swasta yang menjadi tersangka antara lain Muhammad Kerry Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; Gading Ramadhan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak

Kejagung menemukan adanya

Agung (MA).

Dalam perjalanan kasus, para hakim nakal yang dimaksud adalah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur, yakni hakim Erintuah Damanik, hakim Mangapul dan hakim Heru Hanindy.

Sedangkan mantan pejabat MA yang ditangkap adalah Zarof Ricar selaku Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA. Dia disebut-sebut sebagai makelar kasus alias markus di lingkungan pengadilan.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengemukakan data kinerja Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampid-

idik Kejagung lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 23 Oktober 2024. Kemudian sehari setelahnya atau 24 Oktober 2024, penyidik menciduk mantan Petinggi MA yakni Zarof Ricar di Bali.

Selanjutnya penangkapan terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono (RS) pada 14 Januari 2025. Seluruhnya masih dalam lingkup kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Hasil dari pengusutan perkara tersebut, penyidik Jampidsus Kejagung melakukan rangkaian penyitaan hasil suap dan gratifikasi para hakim.

"Penyitaan perkara suap dan atau gratifikasi tiga oknum hakim ada logam



dugaan Pertamina Patra Niaga membeli RON 90 (Pertalite) lalu mencampurnya dengan kandungan lain untuk dijual sebagai RON 92 (Pertamax) dengan harga yang lebih tinggi.

Pada periode 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengemukakan pula capaian selama periode yang sama. Salah satu kasus yang disorot publik adalah penangkapan hakim nakal dan mantan pejabat tinggi Mahkamah

sus) yang tercatat sampai dengan 20 Januari 2025. "Data Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, tahap penyelidikan 403 perkara, tahap penyidikan 420 perkara, tahap penuntutan 667 perkara, tahap eksekusi 53 perkara, Banding 136 perkara, Kasasi 78 perkara, dan Peninjauan Kembali 12 perkara," ungkap Harli.

Tiga hakim PN Surabaya yakni hakim Erintuah Damanik, hakim Mangapul dan hakim Heru Hanindy ditangkap peny-

mulia emas seberat 51.006 gram. Kemudian uang tunai dengan rincian Rp82.163.332.000; SGD 75.438.256; Sen SGD 267; USD 2.338.962; RM 35.992; Sen RM 25; YEN 100.000; EURO 77.200; SAR 23.215; HKD 483.320," jelas Harli.

"Untuk perkara permufakatan jahat penanganan perkara 1 oknum Mahkamah Agung, ada uang tunai dengan rincian Rp1.728.844.000; USD 388.600; SGD 1.099.626," sambungnya.

Selain itu, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima per 31 Desember 2024 yaitu sejumlah Rp199.154.568.718. Sementara penyitaan jumlah besar tersorot dalam kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara korupsi Duta Palma Group.

Penyitaan terkini di kasus korupsi Duta Palma dilakukan terhadap aset tanah atau kebun seluas 221.870,901 hektare, yang secara rinci yakni telah disita seluas 182.791,901 hektare dan diblokir seluas 39.979 hektare. Kemudian penyitaan uang tunai Rp6.382.825.724.941; SGD 12.859.605; USD 1.873.677; AUD 13.700; YUAN 2.005; YEN 2.000.000; WON 5.645.000; RM 300; 31 unit Kapal jenis Tug Boat dan Tongkang; serta 1 unit Helikopter jenis Bell.

"Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum," Harli menandatangani.

Beriringan dengan itu, KPK menindaklanjuti penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan penetapan tersangka pada Senin, 3 Maret 2025. Sebanyak lima orang di antaranya direksi LPEI resmi ditetapkan tersangka. Dua antaranya adalah Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). Sedangkan tiga orang dari salah satu debitur LPEI, PT Petro Energy (PE), yaitu pemilik perusahaan yakni Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD).

KPK menduga kasus dugaan fraud pemberian kredit ekspor LPEI ke PT PE itu merugikan keuangan negara hingga US\$60 juta atau setara kurang lebih Rp900 miliar. Penegak hukum di KPK menduga kredit ekspor itu diberikan LPEI ke PT PE sejak 2015 kendati mengetahui keuangan perusahaan tersebut tidak bagus.

Current ratio PT PE berada di bawah 1 atau tepatnya 0,86 ketika menerima fasilitas pembiayaan ekspor dari LPEI. Sebaliknya, perusahaan energi itu di-

duga memalsukan berbagai dokumen seperti purchase order, invoice serta kontrak yang dijadikan dasar pengajuan kredit kepada LPEI.

Selanjutnya KPK menemukan aliran dana berbentuk 'uang zakat' yang diterima oleh tersangka direksi LPEI sebesar 2,5 sampai dengan 5 persen dari kredit yang diberikan ke PT PE. "Dari keterangan yang kami peroleh dari para saksi menyatakan bahwa memang ada namanya uang zakat yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut," ungkap Kasatgas Penyidikan yang mewakili Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

Budi menerangkan bahwa kasus

Sebelumnya, sejumlah kasus sudah menjadi perkara dan menjalani proses sidang hingga putusan tingkat pertama. Namun, ada juga yang masih berada dalam proses pendalaman dan belum masuk ke pengadilan.

Beberapa antaranya adalah kasus tata kelola timah di PT Timah Tbk., kasus impor gula, kasus dugaan korupsi di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., kasus jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN, kasus akuisisi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Belum lagi kasus-kasus dan perkara yang melibatkan penyelenggara negara di tingkat provinsi kabupaten, dan kota.

Nah, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dia kerap membicarakan agar tidak terjadi kebocoran dan



kredit LPEI ke PT PE bukan satu-satunya dugaan fraud yang tengah diusut. Ada total 11 debitur LPEI yang tengah diusut KPK, salah satunya yakni PT PE. Secara keseluruhan 11 debitur LPEI, total potensi kerugian keuangan negara pada dugaan fraud tersebut mencapai Rp11,7 triliun.

"Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk Maret 2025 KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan," tandas Budi.

Sebagaimana kasus Pertamina, kasus LPEI pun tidak hanya ditangani oleh KPK. Kortas Tipikor Polri pun diketahui tengah mengusut dugaan fraud kredit ekspor yang diberikan Eximbank itu kepada debitur-debitur lain.

penyelundupan. "Dengan niat yang baik dengan tekad yang kuat dengan belajar dari semua pengalaman dengan keinginan untuk menegakkan pemerintah yang bersih yang bebas dari korupsi kita yakin dan percaya bahwa kekayaan kita akan dijaga karena kekayaan kita adalah milik anak dan cucu kita," ujarnya pada peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara, Senin, 24 Februari 2025.

Pada sisi kinerja pemberantasan korupsi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) RI masih berada di 37 atau untuk 2024. Meski, naik tipis dari perolehan 2023 yakni 34, angka itu belum bisa kembali ke perolehan tertinggi yakni 40 di 2019 silam. Sedangkan pemerintah dalam RPJMN 2025-2029 pun menargetkan agar skor IPK kembali menembus skor 43 pada 2029 mendatang. • Editor: GE



Pemilihan Suara Ulang OPTIMALKAN APBD SEBELUM MINTA APBN

Kementerian Dalam Negeri meminta 24 pemerintah daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) untuk mengoptimalkan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung pendanaannya.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan, pembiayaan PSU harus diupayakan terlebih dahulu melalui APBD sebelum mengajukan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Prinsipnya kami akan tetap menggunakan dana APBD dahulu. Kami akan melakukan efisiensi dan realokasi," kata Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Dia mengatakan, 24 daerah yang gelar PSU dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, 10 daerah hanya mengulang pemungutan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), yang seluruhnya dapat dibiayai melalui APBD.

Kedua, 14 daerah lainnya harus mengulang pemilihan di seluruh TPS. Dari jumlah tersebut, 12 daerah telah memastikan pendanaan PSU melalui APBD, sementara dua daerah lainnya, yakni Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel, masih dalam pencarian solusi pendanaan.

"Kami meminta kepada pihak KPU, Bawaslu dan jajarannya, KPUD, Bawaslu provinsi, dan panwaslu supaya mereka jangan menga-

jukan anggaran dengan skenario maksimal," ujarnya.

Tito mengungkapkan, total anggaran PSU Pilkada 2024 mencapai Rp719 miliar, rinciannya KPU di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp429.725.922.805 (59,75 persen), Bawaslu Rp158.919.295.848 (22,10 persen), TNI Rp38.531.459.000 (5,36 persen), dan Polri Rp91.993.554.893 (12,79 persen).

Menurutnya, total penyelenggaraan PSU di 24 daerah itu telah disesuaikan dengan efisiensi anggaran, dan total anggaran itu telah mengalami penurunan.

Kementerian Dalam Negeri awalnya memperkirakan anggaran PSU sekitar Rp1 triliun.

Kendati demikian, Tito meminta KPU dan Bawaslu dapat melakukan efisiensi anggaran seminimal mungkin agar tidak membebani APBD.

Mantan Kapolri ini juga telah menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Pedoman tersebut mengatur pemanfaatan berbagai pos anggaran yang dianggap tidak esensial seperti perjalanan dinas, acara seremonial, pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta konsumsi rapat.

Kemendagri juga



akan terus mengawal pendanaan PSU di daerah. Jika terdapat daerah yang benar-benar tidak mampu membiayai PSU, Pemerintah akan mendorong agar provinsi memberikan hibah kepada kabupaten/kota yang membutuhkan.

Skema ini telah diterapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam membantu pendanaan PSU di Kabupaten Empat Lawang.

"Kira-kira mekanisme seperti itu. Kalau betul-betul sudah menyerah juga provinsi terpaksa dari APBN. Kami juga tidak mau dilempar begitu saja, padahal tahu ada kemampuan misalnya," ujar Tito.

Selain itu, Tito berharap agar PSU yang digelar kali ini menjadi yang

Dia menyarankan agar daerah dibuat kewenangan untuk menggunakan dana tersebut. Sebab, dana tersebut dapat digunakan untuk PSU.

Tito pun mengingatkan agar anggaran pendidikan dan kesehatan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Dia mengatakan ada hal-hal yang lebih penting untuk diperbaiki, seperti toilet sekolah hingga membantu beasiswa.

"Jangan proyek kemudian pengadaan-pengadaan itu yang tidak perlu, nah itu kira-kira. Jadi diambil dari porsi yang paling banyak itu lah harus diambil dari porsi belanja operasional, terutama yang untuk kepentingan pegawai sendiri," terang dia.

tentu sesuaikan dengan waktu Bapak Presiden. Untuk dua gubernur, Bangka Belitung dan Papua Pegunungan, dilantik oleh Bapak Presiden dan sisanya 13 Bupati/Wali Kota dilantik oleh para gubernurnya masing-masing," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk 13 kabupaten/kota, pihaknya akan menerbitkan SK Mendagri karena Prabowo ingin agar para kepala daerah terpilih ini bisa cepat bekerja.

"Nah, 15 ini sudah masuk di kami. Dua provinsi, 13 kabupaten, yang dua ini sudah saya ajukan ke Setneg untuk diterbitkan Keppres Gubernur, yaitu Bangka Belitung dan Papua Pegunungan," jelas Tito.



Prinsipnya kami akan tetap menggunakan dana APBD dahulu.

terakhir bagi 24 daerah tersebut. Jika PSU terus berulang, hal itu tidak hanya membebani keuangan daerah, tetapi juga dapat menghambat jalannya pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Tito juga menegaskan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD tidak dapat digunakan untuk PSU Pilkada 2024 di 24 daerah. Menurutnya, anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak bisa diganggu lantaran memiliki dampak langsung ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Tito merespons usulan anggota Komisi II DPR, Longki Djanggola, agar kekurangan anggaran PSU dapat ditutupi dengan menggunakan dana pendidikan atau kesehatan. Dia menilai dana pendidikan dan kesehatan dapat diambil sekitar 10 hingga 20 persen untuk PSU.



Menunggu Pelantikan

Tito menyebut 15 orang kepala daerah yang ditetapkan berdasarkan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi tidak akan dilantik secara serentak. 15 daerah tersebut terdiri dari 13 kabupaten/kota dan 2 provinsi.

"Jadi, tidak ada pelantikan serentak di Istana seperti yang kemarin. Pelantikan serentak hanya sekali kemarin yang besar, 503 (kepala daerah terpilih)," kata Tito.

Tito juga mengatakan para gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara para wali kota dan wakil wali kota terpilih serta bupati dan wakil bupati terpilih akan dilantik oleh gubernur.

"Kalau Keppres sudah keluar nanti

gan," jelas Tito.

Adapun 15 daerah itu terdiri dari 9 daerah yang sengketanya ditolak MK, 5 daerah yang sengketanya tidak diterima MK, dan 1 daerah yang telah memperbaiki SK hasil Pilkada 2024, yakni di Kabupaten Jayapura.

Sembilan daerah yang sengketanya ditolak oleh MK adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Berau, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Buton Tengah.

Sementara itu, lima daerah yang PHPU tidak diterima MK adalah Kabupaten Mimika, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Pamekasan. ●

KOLABORASI SUKSESKAN TRANSMIGRASI PATRIOT

Kementerian Transmigrasi menjajaki kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan (LPDP Kemenkeu) untuk membangun sumber daya manusia unggul melalui program Transmigrasi Patriot.

"Kami berharap kolaborasi Kementrans dengan Kemendiknas bisa membuat Transmigrasi Patriot berjalan optimal," kata Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Jakarta, Selasa, 4 Maret 2025.

Dia menuturkan, Transmigrasi Patriot merupakan dapur SDM unggul yang akan menjadi wadah bagi para akademisi untuk mengabdikan diri di kawasan transmigrasi. Program tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan nasional pada sektor

ekonomi dan sosial, serta menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat.

Iftitah berharap program Transmigrasi Patriot dapat segera diresmikan dalam waktu dekat usai penyusunan regulasi dan pelaksanaan kajian selesai dilakukan.

Kementrans telah bertemu dan mendapatkan dukungan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan (LPDP Kemenkeu) terkait pemberian beasiswa untuk peserta program tersebut.

"Kami sudah diskusi dengan LPDP, (mereka sebut) Menteri Keuangan sangat support (mendukung) dengan

kegiatan tersebut, sebagai langkah lebih lanjut agar pendidikan tinggi sosialisasi dengan universitas untuk mengoptimalkan Program Transmigrasi

Patriot," ujarnya.

Dia menuturkan, kualitas SDM lokal harus ditingkatkan lebih dahulu agar dapat menarik minat para investor untuk mengembangkan industrialisasi dan hilirisasi di wilayah transmigrasi.

"Paradigma baru transmigrasi ibaratnya datangkan dulu gulanya, nanti semut akan datang sendirinya. Istilah ini berarti tingkatkan dulu (kemampuan SDM, maka investor akan datang)," kata Iftitah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yulianto, pun menyambut baik dan mendukung program Transmigrasi Patriot. Pihaknya akan menyiapkan aturan dan berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang akan berkolaborasi mendukung program tersebut.

"Kami akan tindaklanjuti, bersinergi dengan universitas untuk segera menjalankan pilot project ini. Jika aturan dan regulasi segera dirampungkan, maka tiga hingga empat bulan mendatang bisa segera assessment awal tentu dengan penjangkaran minat dari LPDP dan kesiapan Kementerian Transmigrasi untuk menjalankan program Transmigrasi Patriot," katanya.

Brian menyatakan pihaknya akan mengajak kampus-kampus di sekitar kawasan transmigrasi untuk melakukan kajian atau asesmen jenis-jenis industri apa saja yang cocok untuk suatu kawasan transmigrasi. Kesesuaian jenis industri dengan lokasi transmigrasi akan menjadi motor penggerak ekonomi di kawasan transmigrasi tersebut.

"Kami akan ajak kampus untuk melakukan kajian. Berikutnya kami akan membuat tahapan pembangunan yang terukur. Sehingga dampak positif dari transformasi kawasan transmigrasi

dinikmati oleh masyarakat transmigran dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi," katanya.

Brian menilai transformasi kawasan transmigrasi menjadi kawasan industri menuju kawasan transpolitan dapat mengikutsertakan dunia industri sebagai akselerator. Dengan demikian, geliat ekonomi di kawasan transmigrasi menjadi terukur dan maksimal.

Sebagai langkah awal, ia menyebut pihaknya akan membentuk satuan tugas yang akan mengidentifikasi semua kebutuhan dan solusi di lapangan. Termasuk di dalamnya menyiapkan 100-200 orang pendamping untuk sekitar dua ribu calon transmigran patriot. Transmigran patriot adalah transmigran yang terdiri dari mahasiswa S1-S3 yang diberikan beasiswa dan akan mukim di suatu kawasan transmigrasi sebagai proyek awal.

"Kami akan susun formulanya. Termasuk formula untuk beasiswanya. Saya sangat mendukung kawasan transmigrasi tumbuh dan berkembang melalui riset dan edukasi. Kita akan susun peta jalannya," ujarnya.

Dia juga menggarisbawahi program pengabdian masyarakat yang bisa diakomodasi Kementerian Transmigrasi. Dengan program pengabdian masyarakat ini, maka para dosen bisa melakukan terobosan di kawasan transmigrasi.

"Terobosan yang dilakukan para dosen bisa langsung digunakan oleh masyarakat transmigran. Kawasan transmigrasi tertentu bisa dijadikan lokus, semacam proyek percontohan. Dari itu akan kita estafetkan ke kawasan transmigrasi lainnya. Sekolah Garuda juga ada di daerah, bisa dikoneksikan. Intinya kita dukung penuh transformasi kawasan transmigrasi menuju transpolitan," jelas Brian.

Iftitah menambahkan, pihaknya bermaksud mendorong produktivitas di kawasan transmigrasi untuk mendorong investasi dan daya beli masyarakat transmigran. Daya dorong tersebut akan dilakukan melalui edukasi, industrialisasi, hilirisasi, dan digitalisasi.

"Saat ini sisa lahan transmigrasi kurang lebih 525 ribu hektare. Kita harus manfaatkan luas lahan ini melalui hilirisasi. Supaya nilai tambahnya berlipat ganda.

Makanya kami diskusikan dengan Menteri Brian, terutama transmigran patriot," ucap Iftitah.

Program Beasiswa

Kementrans dan LPDP Kemenkeu akan memperdalam pembahasan mekanisme pelaksanaan program beasiswa Transmigrasi Patriot dengan membagi fokus tugas masing-masing lembaga agar program tersebut nantinya dapat berjalan optimal.

Iftitah menyatakan, Kementrans akan fokus terhadap pengembangan infrastruktur dan sosialisasi program tersebut. Sementara, LPDP Kemenkeu berfokus pada penyaluran beasiswa dan rekrutmen para penerima (awardee).

"Transmigrasi Patriot ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan sains untuk mengembangkan sek-

iden Prabowo Subianto mengenai hilirisasi dan industrialisasi," ucapnya.

Mengingat program transmigrasi merupakan pionir pembangunan, Iftitah mengatakan bahwa kunci keberhasilan program tersebut adalah meningkatkan kualitas SDM. Untuk mewujudkan hal tersebut, program beasiswa Transmigrasi Patriot akan dilaksanakan berdampingan dengan program Transmigrasi Lokal untuk mengembangkan kawasan transmigrasi daerah setempat melalui kolaborasi yang akan dijalankan secara end-to-end.

"Pada prinsipnya, secara teknis, jika program ini berhasil dan bisa direalisasikan, kami dapat membantu banyak orang serta bermanfaat bagi bangsa dan negara," katanya.

Direktur Utama LPDP Kemenkeu, Andin Hadiyanto, menuturkan, pihaknya sangat mendukung program beasiswa



tor pertumbuhan ekonomi baru dan ekosistem masyarakat yang lebih beradab di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah dalam pertemuan dengan Direktur Utama LPDP Kemenkeu, Andin Hadiyanto, di Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

Saat ini, Kementrans tengah berupaya untuk mentransformasi program transmigrasi agar tidak hanya sekadar memindahkan penduduk, tapi juga mengembangkan industrialisasi secara sistematis untuk menciptakan pusat ekonomi baru di daerah.

"Jika pilot project ini optimal dalam implementasinya, maka industrialisasi secara sistematis akan berjalan dengan sendirinya sesuai dengan arahan Pres-

Transmigrasi Patriot dan akan segera menyusun peta jalan mekanisme rekrutmen program tersebut dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pihaknya telah menyampaikan rencana pelaksanaan program beasiswa Transmigrasi Patriot kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan menyatakan siap untuk mendukung program tersebut.

"Arahan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) segera lakukan secara bertahap, yang penting berjalan, untuk teknis kami siap membahas lebih lanjut dengan Sekjen Kementerian Transmigrasi," imbuh Andin.. •

SEKOLAH RAKYAT UNTUK WONG CILIK

Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri ke Istana Kepresidenan untuk membahas mengenai program Sekolah Rakyat.

Menteri-menteri yang hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno; Menteri Sosial, Saifullah Yusuf; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto; dan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti.

Menurut Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), sekolah rakyat akan diban-

gun lewat mekanisme kolaborasi.

"Ya, kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti Saintek, kemudian untuk pengadaan guru Dikdasmen, Prof Muti. Untuk sarana dan prasarana nanti yang membantu tentu PU. Jadi, kami minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan Presiden," kata Gus Ipul, Senin, 10 Maret 2025.

Terkait dengan program ini, Kemensos telah menyiapkan sentra dan balai-balai yang berada di bawah naungannya untuk menjadi lokasi pendirian sekolah rakyat.

Guna memastikan kesiapan sentra milik Kemensos, Gus Ipul bersama Wamensos Agus Jabo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah meninjau kesiapan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi yang akan menjadi salah satu lokasi berdirinya sekolah rakyat.

"Nah, ini salah satu tempat yang akan dijadikan sekolah rakyat itu. Bagian dari Sentra Pangudi Luhur, asetnya Kementerian Sosial," kata Gus Ipul.

Gus Ipul juga telah melaporkan ke-

pada Presiden Prabowo mengenai 53 lokasi di sejumlah daerah yang siap menyelenggarakan program sekolah rakyat. Namun, jumlah itu dapat terus bertambah karena kementerian akan terus berkoordinasi dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan.

"Kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," kata Gus Ipul.

Pada kesempatan sama, Presiden Prabowo meminta program sekolah rakyat itu terus dimatangkan dan harus mencakup sebanyak mungkin daerah.

"Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, penyelenggaraan program sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat ke-



layakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.

"Ya makanya itu yang saya sebut 53 (lokasi) itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan," kata dia.

Lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat rencananya tersebar di berbagai wilayah, antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua. Kemudian, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya juga telah menyatakan komitmennya mendukung penyelenggaraan program sekolah rakyat itu.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengemukakan penerimaan siswa untuk sekolah rakyat itu akan mengacu kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari status kesejahteraan kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Dia juga mengatakan dari 53 lokasi yang telah dipilih untuk program sekolah rakyat, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi.

"Jadi, ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS," kata Amalia.

Gus Ipul, kemudian melanjutkan bahwa pemerintah terus konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah rakyat.

"Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapa pun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang," katanya.

Prosesnya saat ini, tambah Gus Ipul, beberapa kementerian terkait membahas aspek-aspek penting program, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana dan prasarana, pengawasan, hingga tata kelola. Dalam

beberapa pekan ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih jelas mengenai jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menambahkan, Kemensos menargetkan pembukaan sebanyak 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada Juli 2025. Dia mengatakan definisi sekolah rakyat adalah untuk orang miskin, dengan sistem boarding untuk jenjang SD sampai dengan SMA.

"Tujuannya kami ingin memutus rantai kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem lewat jalur pendidikan," katanya.

Ia mengatakan rata-rata hampir 74 persen penduduk miskin di Indonesia latar belakang pendidikannya di

penerima atensi seperti lansia, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), korban trafficking, itu yang akan kami jadikan sekolah rakyat. Solo sudah siap," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, menyebutkan ada dua skema kurikulum yang dapat diadopsi di sekolah rakyat (SR).

"Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul, itu berarti ikut Mendikti Saintek. Akan tetapi, juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini yang digagas Kemendikdasmen," kata Muti.

Menurut dia, perbedaan keduanya terletak pada standar yang diterapkan. Misalnya, kurikulum sekolah unggul



bawah SD.

"Oleh karena itu, melalui sekolah rakyat pemerintah memfasilitasi bisa sekolah sampai kuliah. Harapannya mereka bisa jadi leader, bisa jadi agen perubahan, bisa mengubah masyarakat Indonesia jadi masyarakat makmur, maju, dan sejahtera," katanya.

"Semalam kami ketemu Gubernur Jawa Timur, mereka siap 40. Besok hari Rabu kami ketemu gubernur bersama bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, setelah itu hari Kamis kami ketemu gubernur dan bupati wali kota se-Jawa Barat, setelah itu Banten," imbuhnya.

Ia mengatakan 100 sekolah rakyat tersebut diharapkan dapat dimulai pada Juli bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Mengenai bangunan yang akan digunakan, kata dia, akan menggunakan aset Kementerian Sosial.

"Kemensos sudah punya aset namanya sentra atau tempat rehabilitasi untuk

Kemendikti Saintek, artinya standarnya adalah standar internasional.

Ia menyebutkan beberapa standar internasional tersebut, di antaranya pelajar yang disiapkan untuk berasrama dan pendidikan yang disiapkan sudah punya standar tinggi. Bahkan, mencakup potensi mendatangkan guru asing dari luar negeri untuk berkolaborasi dengan guru lokal.

Sedangkan, untuk kurikulum yang disiapkan oleh Kemendikdasmen, kurikulum standar nasional yang dikenal dengan nama Kurikulum Merdeka Belajar. Secara ringkas kurikulum ini dirancang dapat mawadahi seluruh kebutuhan peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Selain itu, ada beberapa pendekatan belajar pada kurikulum ini yang salah satu elemennya menekankan pemahaman mendalam terhadap materi pelajaran dengan cara menyenangkan. ●

TUGAS PRABOWO UNTUK AHY BANGUN TANGGUL LAUT DI PANTURA

Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall harus diwujudkan sebagai upaya perlindungan kawasan pesisir. Apalagi bila melihat dampak krisis iklim dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, termasuk di wilayah pantai utara.

Presiden Prabowo Subianto sudah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk membangun tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa.

"Pak AHY saya beri tugas yang berat (bidang) infrastruktur, salah satu nanti infrastruktur paling penting adalah Giant Sea Wall. Giant Sea Wall yang akan menyelamatkan pantai utara Jawa," kata Prabowo kepada AHY saat acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025.

Presiden kemudian menyebutkan beberapa lokasi pembangunan tanggul raksasa itu, di antaranya mencakup pantai utara di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Banten, sampai dengan di Gresik, Jawa Timur.

Prabowo optimistis proyek itu dapat berjalan, kendati belum bisa memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya.

"Saya tidak tahu berapa tahun, insya

Allah dengan tekad kita akan bisa," kata Prabowo.

Prabowo menekankan akan segera merealisasikan proyek itu. Anggaran untuk proyek tersebut juga sudah tersedia. "Kami akan putuskan mulai dengan kekuatan sendiri, bukan potensi lagi, kita jelas punya, uangnya siap. Kita mulai secepatnya," kata Prabowo.

AHY pun menekankan, faktor perubahan iklim harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif.

Pemerintah berkomitmen untuk mengawal proses pemulihan dan memastikan langkah-langkah mitigasi jangka panjang dapat segera terealisasi demi melindungi masyarakat dari dampak banjir di masa mendatang.

Dengan koordinasi yang kuat dan aksi nyata di lapangan, diharapkan

penanganan banjir dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Proyek Giant Seawall Pantai Utara Jawa masuk dalam Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029. Adapun dalam daftar tersebut untuk lokasinya direncanakan meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemda, BUMN dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian PSN merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional. PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme rencana kerja pemerintah.

AHY juga mengungkapkan proyek National



Capital Integrated Coastal Development (NCICD) menjadi prioritas pemerintah dalam melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob dan penurunan tanah (land subsidence).

"Ini adalah suatu keharusan bagi kita untuk menjadikannya sebagai proyek utama. Presiden mengatakan, ini bukan hanya proyek, melainkan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup rakyat kita, terutama mereka yang berada di pesisir utara, sepanjang pantai utara Jawa," ujar AHY di Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.

Dia juga menyoroti kompleksitas proyek yang mencakup lima provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, maupun sekitar 30 kabupaten/kota. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri.

"Kita harus memastikan, mulai dari hari ini, kita bekerja sama, membuat strategi, dan tidak hanya mengandalkan satu pihak saja. Ini proyek besar, kompleks, tetapi jika berhasil, Indonesia bukan saja bisa melindungi masyarakat di sepanjang pesisir utara pulau Jawa, melainkan juga bisa mewujudkan proyek yang terbaik di masa depan dalam hal ukuran dan skala," katanya.

Proyek NCICD menjadi perhatian utama pemerintah dengan koordinasi antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana, baik dalam aspek teknis, pembiayaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Langkah strategis yang diambil, termasuk pembentukan satuan tugas khusus dan rencana konferensi infrastruktur internasional, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan proyek sebagai solusi jangka panjang bagi ketahanan pesisir.

Dengan visi yang jelas dan dukungan berbagai pihak, proyek diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga warisan berharga bagi masa depan Indonesia.

Sebagai langkah konkret, AHY akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelaraskan perencanaan dan implementasi

proyek. Sinergi antara kementerian dan lembaga terkait akan memastikan pembangunan berjalan efektif, dengan mempertimbangkan aspek teknis, regulasi, serta kebutuhan masyarakat yang terdampak.

AHY juga menegaskan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir harus diterapkan untuk mengurangi risiko banjir di masa depan. Dia menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi jangka pendek, menengah, dan panjang guna memastikan pemulihan

yang terdampak. Identifikasi kawasan prioritas harus segera dilakukan agar langkah-langkah pemulihan lebih terarah dan konkret, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dia menyampaikan bahwa selain langkah tanggap darurat, pemerintah juga harus menyiapkan strategi jangka panjang untuk mencegah banjir berulang. Tanpa upaya mitigasi yang sistematis, permasalahan ini akan terus terjadi setiap tahun.



yang lebih efektif dan berkelanjutan.

"Kita juga harus memikirkan solusi yang lebih permanen. Artinya, solusi jangka pendek tentu harus kita dahulukan, tetapi solusi jangka menengah dan panjang juga harus disiapkan agar banjir tidak terus berulang setiap lima tahun," ujarnya.

Menurut AHY, perlu rehabilitasi rumah warga serta perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan

"Kita harus memperkuat tanggul, menyiapkan area tampungan air seperti embung, serta melakukan normalisasi sungai dan pembangunan sodetan agar daya tampung dan aliran air lebih baik," jelasnya.

Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, sangat penting dalam mewujudkan solusi yang komprehensif. ●

TINGKATKAN KUALITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bekerja sama dan berkolaborasi dengan beberapa lembaga dan institusi dalam meningkatkan kualitas serta upaya pelindungan para pekerja migran Indonesia (PMI).

Kolaborasi itu dilakukan dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

KP2MI juga menandatangani MoU dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Terbuka (UT).

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengatakan, kerja sama dan kolaborasi tersebut dilakukan sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan upaya pelindungan dan peningkatan kualitas PMI bisa dilakukan dari hulu ke hilir.

"Kolaborasi bersama BPS adalah untuk memperkuat data pekerja migran yang ada di BPS dengan data yang ada di KP2MI, termasuk pekerja yang melakukan magang ke luar negeri. Semua (pekerja magang) yang berangkat ke luar negeri tidak terdata," kata Karding, Kamis, 6 Maret 2025.

Karding menjelaskan, menurut UU 18/2017, pekerja migran adalah orang-orang yang bekerja di luar Indonesia dan mendapatkan upah. Sedangkan, data pekerja magang yang ada masih berada di bawah ketenagakerjaan, pendidikan menengah serta sains dan teknologi.

Karding pun menegaskan data para pekerja tersebut sangat penting untuk melindungi warga Indonesia yang ada

di luar negeri.

Selain itu, KP2MI berkolaborasi dengan KP3A dalam hal pemberdayaan per-

ehatan PMI dan keluarganya.

Lalu dengan Undip dan UT, KP2MI berkolaborasi dalam hal pendidikan dan



empuan dan pelindungan anak PMI dan keluarganya.

Sedangkan dengan Kemendukbang, KP2MI berkolaborasi dalam hal penyediaan pelayanan ketahanan keluarga pekerja migran serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Dengan Baznas, KP2MI berkolaborasi dalam hal peningkatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan, dakwah, dan kes-

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Karding juga menegaskan, pihaknya ingin mengurangi jumlah pekerja migran di sektor domestik hingga saat ini mencapai 80 persen.

"80 persennya adalah (pekerja) domestik, 70 persennya perempuan. Dan pendidikannya rata-rata SD, SMP, ada sedikit SMA," kata Karding.

Karding berharap, penandatanganan

MoU dengan Undip dan UT bisa semakin mengurangi jumlah pekerja migran di sektor domestik.

"Jadi kami harus menyiapkan, konsolidasikan semua lembaga-lembaga pelatihan yang tersebar di mana-mana," kata Karding.

Dia menyebut, bidang pelatihan yang akan ditangani oleh Undip dan UT akan disesuaikan dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. "Misalnya Undip, Undip mau fokus misalnya di perikanan. Bahasanya kita fokuskan Inggris atau bahasa-bahasa lain. Begitu juga misalnya Universitas Terbuka, kita link and match-kan langsung," ujar Karding.

Wakil Rektor UT, Rahmat Budiman, mengatakan UT terus berupaya meningkatkan akses seluas-luasnya kepada para pekerja migran Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya melalui program bekerja sambil kuliah.

"Fleksibilitas waktu antara bekerja dan kuliah yang ditawarkan UT membuka peluang untuk memberikan akses pendidikan formal kepada PMI yang berada di luar negeri," kata Rahmat.

Rahmat menambahkan, dalam waktu tiga tahun terakhir, jumlah PMI yang kuliah di UT mengalami peningkatan, di mana yang ikut program bekerja dan kuliah pada 2025 sebanyak 7.135 orang dan lulusannya sebanyak 1.440 orang.

Dari angka kelulusan tersebut, sebagian kembali ke tanah air dan bekerja di antaranya sebagai PNS, kepala desa, pengusaha, petani milenial, dan lain-lain.

"Alumni UT yang memilih tetap bekerja di luar negeri seperti Korea Selatan, di antaranya berhasil mendapatkan visa I-7, sehingga bisa naik level dari pekerja migran menjadi profesional worker yang pendapatannya setara dengan pekerja warga negara Korea Selatan," terang Rahmat.

Rahmat mengatakan, UT memberikan pelatihan bagi para instruktur BP2MI yang bertugas dalam program orientasi pra-keberangkatan, khususnya dalam bidang peningkatan kompetensi pembelajaran.

Dia berharap melalui penandatanganan MoU tersebut, kerja sama UT dan Kementerian P2MI terus terjalin dengan baik, sehingga dapat terus berkontribusi dalam pemberdayaan purna PMI khususnya alumni UT layanan luar negeri.

Akreditasi Penyalur

Karding mengatakan, KP2MI sedang mempersiapkan parameter dan standar guna memberikan akreditasi dan sertifikasi kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

"Pelan-pelan kita masukkan hal-hal yang berkaitan dengan parameter-parameter dan sistem yang menyangkut dengan sistem yang memaksa mereka untuk patuh dan mengikuti keinginan kita untuk misalnya transparan," kata Karding saat menerima audiensi salah satu perusahaan konsultan di Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025.



Karding menuturkan, salah satu tujuan utama dari kementeriannya adalah untuk menyehatkan P3MI. Untuk mencapainya, beberapa langkah yang diambil adalah akreditasi dan sertifikasi, serta audit berkala.

Ade Irawan, direktur perusahaan konsultan yang terlibat dalam audiensi tersebut mengatakan pihaknya, Visi Integrasi Nusantara, akan membantu KP2MI untuk meningkatkan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia. Hal ini sebagai dukungan penuh terhadap upaya Karding membenahi P3MI.

"Sehingga mereka (P3MI) tidak asal, tidak ada fraud di dalamnya, tidak ada praktik kongkalikong di dalamnya. Sehingga proses rekrutmen, penempatan, pemantauan termasuk kepulangan dari pekerja migran dilakukan secara proper," ucap Ade.

Senada, Direktur Riset dan Pengelolaan Pengetahuan Visi Integrasi Nusantara, Adnan Topan Husodo, mengungkapkan, pihaknya mendukung upaya

Karding dalam membenahan P3MI.

Dia menyebut akreditasi dan sertifikasi bagi P3MI sebagai langkah untuk menghindari berbagai macam permasalahan yang sering dihadapi pekerja migran Indonesia.

"Di satu sisi, ini juga akan menghindari berbagai macam masalah klasik yang sering kita hadapi mulai dari pekerja migran ilegal, kemudian juga kekerasan, penipuan, manipulasi dan lain sebagainya ini merugikan kita semua," katanya.

KP2MI juga membahas peluang kerja sama dan penempatan pekerja migran

Indonesia dalam pertemuan dengan sejumlah organisasi internasional di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.

Karding menguraikan berbagai masalah terkait pekerja migran Indonesia. Salah satu masalah yang ada adalah terkait pemberdayaan bagi para pekerja migran Indonesia.

"Sehingga kita butuh pendampingan dalam hal pemberdayaan ekonomi, melatih mereka untuk berusaha memerlukan akses ke modal, dan juga melatih mereka memerlukan akses ke pasar, dan seterusnya," kata dia.

Karding mengatakan, masalah lain yang terkait PMI adalah terkait perlindungan karena isu perlindungan menjadi salah satu prioritas agar pekerja migran Indonesia bisa terlindungi secara hukum di negara penempatan.

"Jadi perlindungan PMI termasuk yang di luar negeri untuk penampungan, kemudian advokasi kalau terjadi masalah, baik litigasi maupun non-litigasi," tambah Karding. ●

CEGAH KEBOCORAN DANA DESA

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menemukan maraknya penyelewengan dana desa di banyak daerah.

Dana desa, yang semestinya dimanfaatkan untuk membangun desa dan masyarakat, nyatanya di sejumlah wilayah malah digunakan untuk kepentingan pribadi perangkat desa, bahkan untuk membiayai judi online (daring) dan membuat situs web. Karena itu, Kemendes PDT menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Yandri mengungkapkan, hasil evaluasi program dana desa menunjukkan banyaknya pembajakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Salah satu bentuk penyelewengannya adalah dana desa dipakai untuk membiayai judi daring, membangun situs web fiktif, dan lainnya.

"Diskusi tadi sangat produktif. Kami akan tindaklanjuti lebih jauh ke depan, termasuk nota kesepahaman (MoU) akan kami lakukan dengan KPK sehingga kami ingin memastikan tiap rupiah dana negara yang meluncur ke desa atau di Kemendes itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Yandri menyinggung keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk memben-tuk koperasi desa merah-putih untuk membangun desa. Menurut dia, mimpi

soal pemberantasan korupsi kepada semua kepala desa.

Selain itu, hal konkret lainnya adalah kerja sama penanganan perkara korupsi. Kemendes PDT akan melaporkan sejumlah kasus penyelewengan dana desa kepada KPK. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi kepala desa agar bekerja secara bersih.

"Untuk konkretnya, begitu. Ini termasuk mungkin nanti beberapa kasus di tingkat desa akan kami laporkan ke KPK untuk di-follow up sehingga nanti benar-benar ada efek jera bagi para kades," ujarnya.

Di sisi lain, Kemendes PDT juga bakal menindaklanjuti rekomendasi KPK soal evaluasi kerja-kerja instansi. Salah satunya adalah rangkap jabatan tenaga pen-



untuk mencegah kebocoran dana desa kembali terulang.

Untuk kepentingan itu, Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, mendatangi gedung KPK untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa, 11 Maret 2025. Pertemuan itu difokuskan untuk membahas soal konstruksi kerja sama bidang pencegahan korupsi di Kemendes PDT.

Prabowo bisa terwujud apabila ada kerja sama dan pendampingan dari KPK. Apalagi, Kemendes PDT juga sudah menyambangi kepolisian dan kejaksaan untuk menjalin kerja sama serupa.

KPK, lanjut Yandri, bisa masuk melalui forum koordinasi kepala desa yang dimiliki Kemendes PDT. Dalam forum itu, KPK bakal memberikan masukan dan materi

damping desa.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H Harefa, menyampaikan, secara umum, pimpinan KPK mendukung program-program yang dikerjakan oleh Mendes PDT. Pembahasan dan diskusi perkembangan kerja sama akan dilakukan berkala.

KPK menyambut baik inisiatif Mendes

PDT yang melarang studi banding ke daerah yang jauh. Begitu pula dengan gagasan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat Kemendes PDT harus memiliki desa binaan. KPK bisa menyelenggarakan penyuluhan antikorupsi.

Celah korupsi

Dikutip dari hasil riset Kompas terbaru, selama program dana desa berjalan 10 tahun, sudah ada Rp610 triliun anggaran yang digelontorkan. Seharusnya, ribuan desa kini menjadi maju. Namun, dana desa justru membuka celah korupsi dari kepala desa hingga elite lokal.

Uang rakyat raib dalam praktik pembangunan fiktif dan laporan palsu. Beberapa desa memang berkembang, tetapi lebih banyak yang terjerat penyimpangan, meninggalkan warga dalam janji kosong pembangunan.

Analisis dari 591 putusan kasus korupsi Dana Desa (2015-2024) mengungkap adanya 640 terdakwa dengan kerugian negara Rp598,13 miliar, setara dana untuk 744 desa. Sebesar 60 persen pelakunya adalah kepala desa, disusul bendahara desa (10,6 persen). Secara keseluruhan, sebanyak 81,8 persen pelaku korupsi dana desa berasal dari perangkat desa.

Aceh tercatat sebagai provinsi dengan pelaku korupsi dana desa terbanyak, diikuti Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Di tingkat kabupaten/kota, pelaku terbanyak terdapat di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan Sijunjung, Sumatera Barat.

Modus utama korupsi adalah laporan fiktif (59,83 persen), pembangunan di bawah standar (54,49 persen), penggelembungan anggaran (39,89 persen), dan penyalahgunaan wewenang (44,1 persen). Korupsi paling banyak terjadi di infrastruktur (83,43 persen), disusul administrasi desa, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan tunai.

Kepala desa, dengan kewenangan besar pengelolaan anggaran melalui Undang-Undang Desa, sering kali terjerumus dalam praktik korupsi akibat minimnya pemahaman tentang tata kelola keuangan. Masalah ini diperburuk kurangnya pengawasan dan rendahnya integritas, yang membuat mereka rentan menyalahgunakan dana desa.

Sebelumnya, Yandri juga sudah men-

emui Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, guna menindaklanjuti dugaan adanya penyelewengan dana desa.

"Maksud dan tujuan kami datang adalah kami menyampaikan data dari PPA TK bahwa pada tahun lalu, 2024 semester 1 Januari-Juni, ada oknum kepala desa yang menggunakan dana desa untuk penggunaan lainnya," kata Yandri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, 19 Februari 2025.

Yandri mengungkapkan, berdasarkan data PPA TK, dana desa itu diseleweng-

pemberantasan kemiskinan.

"Kami tadi sudah meminta karena ini adalah tugas aparat penegak hukum. Kami sudah menyampaikan data sehingga bisa di-follow up untuk menjadi perhatian," ujarnya.

Yandri juga berharap bahwa melalui pelaporan ini, tidak akan ada lagi oknum-oknum kepala desa yang menyalahgunakan dana desa.

"Jadi kalau ini ditindak, mudah-mudahan yang lain tidak berani. Tapi kalau dibiarkan, dibiarkan atau ditoleransi, ini kami khawatir oknum kepala desa yang



kan untuk hal-hal yang melanggar aturan, seperti judi online (daring), kepentingan pribadi kepala desa, dan diberikan kepada pihak lain yang tidak berhak.

Dia meminta agar Bareskrim Polri bisa menindaklanjuti temuan PPA TK tersebut agar pada 2025 dana desa bisa digunakan sebagai semestinya dalam rangka menyukseskan salah satu visi Astacita, yakni membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

lain akan mengikuti kepala desa yang salah ini," ucapnya.

Ketua PPA TK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan, menemukan sejumlah bentuk penyelewengan dana desa, seperti di wilayah Sumatera dan Papua.

Di dua wilayah itu, ditemukan penggunaan dana desa oleh oknum kepala desa untuk judi online. Ivan mengatakan temuan penggunaan dana desa untuk judi online itu berkisar antara Rp50-260 juta. ●



SUSUN STRATEGI AWASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Badan Pengawas Pemilu telah menyusun strategi pengawasan yang komprehensif untuk memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan, telah menginstruksikan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera berkoordinasi dengan KPU setempat terkait pelaksanaan putusan MK. Selain itu, pihaknya juga memastikan ketersediaan anggaran dan membentuk kembali pengawas ad hoc.

Bagja juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bawaslu daerah, terutama di wilayah

yang mengalami permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

"Kami akan segera melakukan evaluasi, bukan hanya terhadap pengawas ad hoc, tetapi juga terhadap Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, agar kejadian serupa tidak terulang," papar Bagja dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Persiapan Penyelenggaraan PSU Pilkada 2024 Hasil Putusan MK bersama Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan DKPP di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Bagja menyebutkan rekomendasi Bawaslu di antaranya dalam menyusun jadwal PSU, KPU harus memperhitungkan batas waktu potensi penyelesaian sengketa proses pemilihan, memperhatikan waktu pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari libur atau ditentukan sebagai hari libur, serta meminta KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan.

Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malon-

da, menambahkan ada tantangan besar dalam penyesuaian jadwal pelaksanaan PSU dengan batas waktu putusan MK, terutama di daerah seperti Pasaman, Tasikmalaya, Empat Lawang, Kutai Kartanegara, Gorontalo, Bengkulu Selatan, dan Parigi Moutong.

"Jika kita menggunakan batas maksimal waktu penyelesaian sengketa di PTUN dan Mahkamah Agung, maka durasi yang dibutuhkan bisa mencapai 70 hari kalender. Sementara itu, putusan MK hanya memberikan waktu 60 hari sejak dibacakan. Ini menjadi tantangan yang harus segera dicarikan solusinya," jelas Herwyn.

Selain itu, Bagja juga memberikan masukan terkait ketersediaan anggaran untuk PSU pasca-putusan MK. Dia mengatakan pembiayaan Bawaslu kabupaten/kota yang akan melaksanakan pengawasan PSU tetapi pemerintah daerahnya tidak mampu untuk melakukan pembiayaan bisa dilakukan mekanisme cost sharing dengan Bawaslu Provinsi.

Bagja menjelaskan mekanisme cost sharing mengacu pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan yang bersumber dari APBD. Dalam pasal itu dijelaskan, dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan.

"Maka Bawaslu provinsi yang masih terdapat sisa anggaran pemilihan dapat menggunakan anggaran dimaksud untuk melakukan pengawasan PSU dengan mekanisme cost sharing," ucap Bagja saat RDP bersama Komisi II DPR, Pemerintah, KPU, dan DKPP, Senin, 10 Maret 2025.

Bagja mengatakan terhadap saran dan masukan di atas, diperlukan kebijakan Kemendagri untuk penggunaan anggaran pengawasan Bawaslu Provinsi. Ini juga sesuai dengan pasal 18 ayat (3) Permendagri 54/2019 tentang pendanaan pemilihan yang bersumber dari APBD menyatakan bahwa penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan dilakukan paling lambat tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah Persiapan

Bawaslu akan menyiapkan 18.972 jajaran ad hoc dalam PSU dan rekapitulasi pemilihan 2024.

"Sebanyak 10.056 untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 5.094. Mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan," kata Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda.

Herwyn menerangkan, saat ini persiapan jajaran ad hoc sedang dalam tahap evaluasi. Dimulai dari evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota yang akan melaksanakan PSU.

"Evaluasi kami lakukan dengan pendampingan ketat untuk menjaring kualitas jajaran yang terbaik. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP) juga menjadi salah satu tolok ukur evaluasi," terangnya.

Dia ingatkan kepada jajaran Bawaslu untuk tetap melakukan pengawasan saat bulan Ramadan. Sebab, ia khawatir ada kegiatan dari calon-calon peserta PSU Pemilihan 2024 melakukan kegiatan terkait proses pemenangan.

"Ini sedang kita siapkan. Harus ada aturan yang jelas dan ketat agar tidak ada yang bias terkait kegiatan saat bulan puasa," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu, To-

berjalan sesuai hukum dan mencegah potensi masalah di lapangan," tegasnya dalam Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.

Selain itu, Totok juga minta seluruh jajaran Bawaslu untuk memastikan setiap laporan terkait PSU ditindaklanjuti dengan serius.

"Setiap laporan harus diproses dan dicatat dengan baik. Jangan sampai ada yang terabaikan, karena ini bisa berdampak pada kredibilitas pemilu dan



tok Hariyono, mengingatkan pentingnya memahami amar putusan MK sebagai pedoman utama dalam pengawasan PSU Pemilihan 2024. Ia meminta jajarannya untuk mencermati setiap detail putusan guna mengantisipasi potensi sengketa dikemudian hari.

"Kita harus benar-benar memahami setiap detail putusan MK. Ini akan menjadi pedoman dalam mengawasi PSU agar

proses hukum di MK," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya rekomendasi Bawaslu kepada KPU berdasarkan temuan di lapangan agar PSU dapat berjalan sesuai aturan.

"Koordinasi dengan KPU harus dilakukan secara intensif dan terarah, sesuai dengan putusan MK. Ini penting agar PSU berjalan lancar dan tidak menimbulkan sengketa baru," tambahnya. •

LOBI-LOBI AMRAN SULAIMAN TAK KENA PEMANGKASAN ANGGARAN

Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar membatalkan pemotongan anggaran di Kementerian Pertanian. Amran sudah menyampaikan permintaan itu secara langsung pada bendahara negara.

"Masalah efisiensi anggaran, bahwasannya sampai tadi malam, untuk Kementerian insya Allah, mudah-mudahan sesuai dengan pertemuan kami dengan Menteri Keuangan langsung tadi malam jam 8, itu bintangnya (opsi) dicabut," kata Amran dalam rapat dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.

Kementerian Pertanian sebelumnya mendapatkan jatah anggaran Rp29,37 triliun untuk 2025. Kemudian dipangkas Rp10,28 triliun dan hanya menyisakan Rp19,09 triliun.

Amran menyebut Sri Mulyani akan segera merespons permintaan itu melalui surat keputusan yang akan dikeluarkan dalam satu hingga dua hari ke depan.

"Kami juga per-nah

menelepon langsung ada 6 orang dari Komisi IV yang mendengar langsung bahwa itu beliau (Sri Mulyani) sudah setuju, mudah-mudahan satu dua hari terbit. Itu yang kami terima tadi malam," tuturnya.

Selain kepada Sri Mulyani, Amran juga telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Perlu kami sampaikan bahwasanya kami sudah menyurati langsung ke Bapak Presiden dan Menteri Keuangan agar Kementerian Pertanian tidak dibebani efisiensi Rp10,28 triliun, pada dasarnya dari Kementerian Keuangan disetujui untuk tidak dibebani (efisiensi) Rp10,28 triliun," terangnya.

Meskipun saat ditanya mengenai peruntukkan dana Rp10,28 triliun ketika tidak lagi dipangkas, Amran belum memberikan penjelasan lebih lanjut.

Hanya saja menurut dia, pembebanan efisiensi anggaran sebesar Rp10,28 triliun ini akan mengganggu cita-cita swasembada pangan untuk bisa tercapai dalam waktu yang singkat.

"Adanya pembebanan efisien anggaran ini tentu menyebabkan terganggunya upaya mewujudkan swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sebagaimana diharapkan bapak Presiden RI," tuturnya.

Dia kemudian meminta dukungan Komisi IV DPR agar permohonannya itu bisa dikabulkan. "Kami mohon dukungan bapak ibu dan anggota Komisi IV DPR terhormat agar ke-men-



terian pertanian tidak dibebani efisien anggaran Rp10,28 triliun, dengan demikian anggaran efisiensi ini masih di bintang (ada opsi) bisa segera dibuka,” jelasnya.

Sebelumnya, program Swasembada Pangan pada 2025 terancam karena adanya efisiensi anggaran. Pemanngkasan anggaran membuat Kementan terpaksa mengurangi target luas optimalisasi lahan dan cetak sawah baru pada 2025. Target optimalisasi lahan disesuaikan dari 500.000 hektare menjadi 300.000 hektare, sedangkan cetak sawah baru dari 225.000 hektare menjadi 100.000 hektare.

Selain itu, sejumlah tantangan lain tengah menanti. Salah satunya adalah banjir yang tengah melanda sejumlah daerah di Indonesia. Bencana hidrometeorologis itu terjadi justru di saat produksi beras nasional pada Januari-April 2025 diperkirakan mencapai titik tertinggi sejak tujuh tahun terakhir.

Dampak banjir

Pada 3 Maret 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Kerangka Sampel Area (KSA) padi Januari-April 2025 yang dimutakhirkan pada Januari 2025. Pembaruan KSA itu mengacu pada lahan baku sawah yang ditetapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional seluas 7,39 juta hektare.

Produksi beras nasional pada Januari-April 2024 diperkirakan 13,95 juta ton. Potensi produksi itu meningkat 2,88 juta ton atau 25,99 persen dibandingkan realisasi Januari-April 2024 yang mencapai 11,07 juta ton. Potensi produksi beras pada Januari-April 2025 itu tertinggi dalam sejarah produksi beras nasional sejak 2019 atau tujuh tahun terakhir.

Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, menuturkan, banjir telah melanda sejumlah daerah sentra beras nasional. Sebagian besar tanaman padi di daerah-daerah tersebut rusak dan bahkan gagal panen.

“Beberapa waktu lalu, di daerah pemilihan saya, di Wera dan Ambalawi (Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat), dilanda banjir. Daerah itu menjadi pusat padi dan jagung. Bagaimana Kementan merespons dampak banjir

itu,” tuturnya.

Anggota Komisi IV DPR lain, Slamet, juga meminta Kementan tidak hanya memberikan bantuan benih dan pupuk. Kementan juga perlu mengupayakan para petani terdampak banjir mendapatkan asuransi untuk mengganti kerugian yang mereka alami.

Menanggapi hal itu, Amran mengemukakan, per 11 Maret 2025, tanaman padi yang terdampak banjir dan telah diusulkan untuk mendapatkan

tare luas lahan sawah baku yang kami kelola. Selain bantuan benih dan pupuk, kami juga akan mengupayakan para petani terdampak banjir mendapatkan asuransi,” katanya.

Kementan mencatat, sejak Januari 2025 hingga 11 Maret 2025, tanaman padi yang terdampak banjir berada di Jawa Tengah seluas 5.164,5 hektare, Lampung 4.391,8 hektare, Sulawesi Selatan 4.235,51 hektare, dan Jawa Barat 1.317,45 hektare. Selain itu juga



bantuan seluas 17.641 hektare. Dari luasan itu, seluas 8.503 hektare telah mendapatkan bantuan benih, pupuk, dan traktor. Sementara sisanya, yakni seluas 9.138 hektare tengah diproses untuk mendapatkan bantuan.

“Adapun tanaman padi yang puso seluas 5.248,46 hektare. Luasan sawah yang terdampak banjir hanya sekitar 0,01 persen dari 7,39 juta hek-

ada di Jawa Timur seluas 875,65 hektare, Nusa Tenggara Barat 500 hektare, dan Aceh 334,11 hektare.

Dari sejumlah daerah itu, tanaman padi di Lampung mengalami gagal panen atau puso terlalu, yakni 4.391,8 hektare. Kemudian disusul Jawa Tengah yang mengalami puso seluas 581,3 hektare dan Sulawesi Selatan 459,55 hektare. ●

PSU

Gunawan Effendi

Mengulang pemungutan suara boleh dibilang sebagai sisi kegagalan menyelenggarakan pemilihan. Tak terkecuali pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Tapi, apa boleh buat?

Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 sudah mengetuk palu dan membacakan putusnya. Alhasil, MK memutuskan 24 daerah harus menyelenggarakan PSU, pemungutan suara ulang.

Ke-24 daerah itu, mulai dari kawasan timur Indonesia: Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan dan Provinsi Papua; Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara; Kabupaten Buru, Maluku; Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara; Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo; Kabupaten Banggai dan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; Kota Palopo, Sulawesi Selatan; Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur; Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah; Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan; Kabupaten Magetan, Jawa Timur; Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; Kabupaten Serang, Banten; Kabupaten Pesawaran, Lampung; Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu; Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan; Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, Kabupaten Bungo, Jambi; Kabupaten Siak, Riau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dan Kota Sabang, Aceh.

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam penyelenggaraan PSU Pilkada kali ini adalah kecukupan anggarannya. Pada saat pemerintah menerapkan penghematan anggaran, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, penyelenggaraan PSU juga dapat dianggap bertentangan dengan semangat efisiensi. Toh pelaksanaan demokrasi memerlukan dana, kadang-kadang tidak sedikit, sehingga PSU pun dijadwalkan tetap berlangsung.

Soal kecukupan anggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mengakui efisiensi APBN di lembaganya berimbas pada kekurangan anggaran untuk mengawasi PSU. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR pada Kamis, 27 Februari 2025, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, kondisi anggaran APBN di Bawaslu pasca Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, terjadi pemblokiran hampir 50 persen

dana yang dianggarkan. Alhasil, Bawaslu tingkat provinsi tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengawasi PSU di kabupaten-kota yang menyelenggarakannya.

Masih mengenai pembiayaan PSU, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengemukakan, pemerintah sedang berupaya agar APBD mampu membiayai PSU dan memastikan penganggaran dilakukan dalam versi minimal. Minimal dalam arti menghindari biaya-biaya yang tidak perlu semisal sosialisasi Hari H PSU.

Wamendagri Bima juga menegaskan, jika APBD Kabupaten tak sanggup membiayai PSU, maka APBD Provinsi yang menjadi sandaran. Jika APBD Provinsi tak sanggup membiayai juga, barulah dana APBN akan menjadi pertimbangan. Bima menegaskan, pembiayaan PSU dapat dilakukan dengan berbagi pendanaan (cost-sharing).

Persoalan lain adalah penyelenggaraan PSU tidak serentak

seperti pemungutan suara Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024. Amar (perintah) putusan MK justru membagi jadwal waktu PSU paling lambat 30, 45, 60, 90, hingga 180 hari usai pembacaan putusan. Untuk gelombang pertama PSU 30 hari pasca putusan MK, tercatat PSU akan berlangsung pada Sabtu, 22 Maret 2025 di Kabupaten Barito Utara, Kalteng; Kabupaten Magetan, Jatim; Kabupaten

Bangka Barat, Babel; dan Kabupaten Siak, Riau. Nah, waktu penyelenggaraan PSU di empat kabupaten pertama ini terjadwal berlangsung pada masa puasa Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 hijriyah. Bagaimana pelaksanaan PSU menjelang Idul Fitri di empat kabupaten di empat pulau berbeda itu, kita sama-sama menantikannya.

Penyelenggaraan PSU di kabupaten, kota, dan provinsi lainnya, akan menyesuaikan dengan amar putusan MK. Namun Komisi Pemilihan Umum Pusat mengupayakan Hari H PSU berlangsung pada Sabtu. Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengemukakan, untuk daerah yang diperintahkan PSU dalam tenggat waktu 45 hari, pencoblosan terjadwal pada 5 April 2025. Selanjutnya untuk PSU dalam tenggat waktu 60 hari, PSU terjadwal pada 19 April. Berikutnya, untuk daerah yang diperintahkan PSU dalam tenggat waktu 90 hari, PSU terjadwal pada 24 Mei 2025. Sedangkan untuk PSU dengan tenggat waktu 180 hari, waktunya terjadwal pada 9 Agustus 2025.

Begitulah jika berlangsung PSU. Tapi, apa boleh buat? •





4

MUDIK GRATIS TETAP TERSEDIA

Meski dalam situasi efisiensi anggaran, pemerintah pusat maupun banyak pemerintah daerah menyelenggarakan mudik gratis bagi warga yang memerlukannya. Untuk mudik gratis fasilitas pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan menjadi penyelenggara utamanya. Kepadatan mudik diprediksi mulai berlangsung sejak Jumat, 21 Maret 2025.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sudah menegaskan kementerannya tetap menyelenggarakan Program Mudik Gratis pada Angkutan Lebaran tahun 2025. Langkah ini dilakukan guna menekan lonjakan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik

nekan jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kepadatan di jalan raya selama periode Lebaran, serta yang paling penting demi alasan keselamatan para pemudik,” ujar Menhub Dudy, di Jakarta, Kamis, 6 Maret 2025.

Menhub Dudy menjelaskan bepergian jarak jauh menggunakan kend-

swasta guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan selama dalam perjalanan.

“Kami tidak bosan-bosan mengimbu masyarakat agar seyogyanya tidak melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan sepeda motor, mengingat potensi bahaya kecelakaan yang cukup tinggi. Kami sangat berharap masyarakat dapat



menggunakan kendaraan pribadi, serta mengurangi kepadatan di jalan raya.

“Kemenhub kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun di tengah keterbatasan anggaran, program ini tetap kami jalankan guna me-

araan pribadi, khususnya sepeda motor, berisiko tinggi mengalami kecelakaan. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Mudik Gratis yang diselenggarakan Kemenhub atau pihak-pihak lain, baik Kementerian/Lembaga, BUMN, atau perusahaan

mudik menggunakan angkutan umum yang sudah melalui ramp check atau memanfaatkan Program Mudik Gratis yang diselenggarakan oleh Kemenhub. Sebab selain penumpang, sepeda motor pemudik juga akan diangkut secara gratis, sehingga dapat digunakan untuk

bermobilitas di tempat tujuan,” terang Menhub.

Menhub Dudy menyampaikan mulai tahun ini, Kemenhub akan mengkoordinasikan Program Mudik Gratis yang diselenggarakan oleh berbagai pihak agar pelaksanaannya bisa lebih efektif dan efisien. Untuk informasi lebih leng-

dari satu tempat,” ujarnya.

Program Mudik Gratis yang diselenggarakan oleh Kemenhub tersedia melalui jalur darat, laut, serta kereta api, dan digelar di beberapa titik simpul transportasi. Pendaftaran mudik gratis mulai dibuka pada Senin, 10 Maret 2025 hingga Minggu, 23 Maret 2025. Untuk tahun ini pendaftaran dilakukan secara online melalui laman : <https://nusantara.kemenhub.go.id/>

Untuk jalur darat, Ditjen Perhubungan Darat menyediakan 520 unit bus untuk 21.536 penumpang serta 10 unit truk untuk mengangkut 300 sepeda motor, pada arus mudik dan balik Lebaran 2025. Terdapat 31 kota tujuan Mudik Gratis yang tersebar di wilayah Sumat-

tasi bus menyediakan kuota mudik gratis ke 31 kota tujuan dan sembilan kota arus balik yang tersebar di sebagian wilayah Sumatera, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kuota dibuka secara bertahap setiap harinya pukul 08.00 WIB dan akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi.

Rincian tiga kota tujuan mudik di Jawa Barat mencakup Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Kemudian Provinsi Jateng-DIY sebanyak 19 Kota yaitu Solo, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Blora, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, Sragen dan Yogyakarta.

Kemudian Provinsi Jawa Timur den-



kap mengenai program mudik gratis ini, masyarakat dapat mengikuti melalui akun media sosial @kemenhub151.

“Kami ingin penyelenggaraan Program Mudik Gratis bisa lebih terkontrol. Harapannya, tidak ada lagi pemudik yang melakukan pendaftaran di lebih



era, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kemudian untuk jalur laut, Ditjen Perhubungan Laut menyediakan “Tiket Gratis Kapal Laut” dengan kuota 47.816 penumpang dan jumlah rute sebanyak 153 ruas. Berikutnya untuk kereta api, Ditjen Perkeretaapian menyelenggarakan “Program Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kereta Api” dengan kuota 16.960 penumpang dan 7.424 unit sepeda motor.

Sedangkan berdasar informasi di Instagram resmi Ditjen Perhubungan Laut, @djplkemenhub151, kuota Mudik Gratis 2025 jalur laut bertambah menjadi 48.867 penumpang. Namun, ruas yang tersedia tetap 153 trayek untuk pemudik gratis.

Mudik gratis menggunakan transpor-

gan lima kota tujuan yaitu Madiun, Surabaya, Tuban, Malang, dan Tulungagung. Sedangkan untuk wilayah Sumatera sebanyak empat kota yaitu Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu dan Padang. Untuk kota asal arus balik tersedia fasilitas gratis ke sembilan kota yaitu Palembang, Cirebon, Semarang, Solo, Purwokerto, Wonogiri, Yogyakarta, Madiun, Surabaya.

Pemberangkatan penumpang arus mudik menggunakan bus di kawasan Jabodetabek akan dilakukan dari lima terminal, yaitu Terminal Pulogebang Jakarta, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, dan Terminal Jatijajar Depok pada 27 Maret 2025. Sementara itu, Terminal Kampung Rambutan Jakarta dan Terminal Poris Plawad Tangerang akan memberangkatkan penumpang

pada 28 Maret 2025. Pemberangkatan penumpang arus balik akan dilakukan pada 5 April 2025 dari sembilan terminal tipe A di kota asal keberangkatan.

Sedangkan Ditjen Perkeretaapian menyelenggarakan program mudik gratis sepeda motor dengan kereta api. Kuota yang disiapkan untuk 16.960 penumpang dan 7.424 unit sepeda motor.

Selain itu, Kemenhub bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kemacetan di pasar tumpah dan lokasi-lokasi strategis yang berpotensi menyebabkan hambatan selama pergerakan mudik dengan transportasi kereta api. "Kemudian lin-

pat Koordinasi Lintas Sektor Kesiapan Angkutan Lebaran 2025 yang dihadiri kementerian dan instansi terkait, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin, 10 Maret 2025..

Turut hadir dalam rakor ini sejumlah pejabat pemangku kepentingan Angkutan Lebaran 2025 Antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta sejumlah menteri dan kepala badan terkait lainnya. Tercatat 16 kementerian dan lembaga, seperti Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, BMKG, Kementerian Pariwisata dan lainnya had-

en atau 18.746 unit bus, terhadap 85,49 persen atau 660 unit kapal, 68,47 persen pesawat, 60,66 persen atau 1.547 unit lokomotif dan kereta, serta terhadap 43 persen atau 70 unit kapal penyeberangan.

"Hari puncak arus mudik kemungkinan terjadi pada tanggal 28 Maret 2024, namun demikian karena telah disetujuinya pemberlakuan work from anywhere (WFA), maka kami juga mengantisipasi apabila terjadi kepadatan/kegiatan mudik yang mulai berlangsung pada Jumat, 21 Maret 2025," kata Menhub Dudy.

Menhub menyampaikan sejumlah



tas kereta api yang perlu diwaspadai dan perlu juga kerjasama dengan pihak Pemda dan tentunya dengan kepolisian untuk mengamankan jam-jam tersebut," ungkap Menhub Dudy.

Secara keseluruhan Menteri Dudy mengemukakan Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana transportasi guna menghadapi masa Angkutan Lebaran pada 21 Maret hingga 11 April 2025. "Kemenhub telah menyediakan sejumlah sarana dan prasarana transportasi untuk membantu kelancaran para pemudik menuju kampung halaman, baik itu transportasi darat, laut, udara, maupun perkeretaapian," ujarnya dalam Ra-

ir dalam Rakor lintas sektoral kali ini

Dalam rapat itu, Menhub Dudy mengemukakan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk Angkutan Lebaran tersebut terdiri dari 30.451 unit bus yang tersedia di 115 terminal, 772 unit kapal laut yang tersedia di 264 pelabuhan, 404 unit pesawat di 60 bandar udara, 2.550 unit lokomotif dan kereta, baik antarkota maupun regional, serta 187 unit kapal penyeberangan di 14 lintas pelabuhan penyeberangan.

Dari sisi keselamatan, Kemenhub juga terus menggencarkan uji kelaikan pada sarana transportasi tersebut. Hingga 8 Maret lalu, telah selesai dilakukan ramp check/uji kelaikan terhadap 60,67 pers-

titik utama yang perlu diperhatikan adalah lokasi wisata di daerah-daerah tujuan mudik, pasar tumpah yang biasanya mulai dibuka menjelang arus mudik dan arus balik, perlintasan sebidang perkeretaapian. Kemudian yang juga perlu mendapat perhatian adalah pelabuhan penyeberangan yang berpotensi mengalami penumpukan, seperti Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Provinsi Banten, dan Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk di Jawa Timur.

"Untuk menyikapi hal itu, kami juga telah bekerja sama dengan beberapa Pemda, khususnya untuk mengantisipasi titik titik padat tersebut. Kami juga meminta adanya pengamanan dari pihak

Kepolisian dan Pemda setempat,” ujar Menhub Dudy.

Menhub Dudy menyatakan ia telah melakukan rapat koordinasi dengan menteri-menteri, kepala daerah, pimpinan BUMN dan swasta serta instansi terkait guna memastikan Angkutan Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lancar.

Terkait pengamanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa akan dikerahkan sebanyak 164.268 personel gabungan Polri, TNI, dan lainnya untuk mengamankan selama masa Angkutan Lebaran. Sebanyak 39.358 personel berasal dari Polri, 66.714 personel dari TNI serta 58.096

Fitri 1446 H / 2025 M. “Dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan pada aspek pengamanan, aspek kesiapan transportasi sarana dan prasarana perhubungan, kesiapan bahan pokok dan bahan bakar minyak, serta kesiapan tanggap bencana selama pelaksanaan mudik,” ujar Menkopolkam.

Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan, Pemerintah telah siap menyambut dan melaksanakan mudik Lebaran 2025. “Kesimpulan rapat, seluruh kementerian dan lembaga yang hadir di sini telah siap untuk melaksanakan dan mensukses-

anggap bencana untuk memitigasi terjadinya banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang semakin tinggi.

“Sebagaimana perintah Bapak Presiden, telah dibentuk juga quick response, tim respon cepat manakala terjadi hal-hal yang terkait dengan gangguan keamanan bencana dan lain sebagainya,” kata Budi Gunawan.

Sejauh ini, Kementerian Perhubungan memperkirakan sebanyak 146,48 uta orang dari total penduduk, akan melakukan perjalanan mudik selama periode Lebaran 2025. “Seperti biasanya, Kemenhub sebelum lebaran, kami selalu melakukan survei yang hasil survei kami



personel dari berbagai instansi terkait lainnya akan berjaga pada 2.894 pos pengamanan dan titik-titik penting lainnya.

Kapolri juga mengemukakan puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18-30 Maret. Sementara itu, puncak arus balik pada tanggal 5-7 April 2025. Adapun, hari raya Idul Fitri 1446 H diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025.

Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga yang diadakan hari ini bertujuan untuk mengecek kesiapan menghadapi arus mudik pada Idul

kan mudik maupun Lebaran Idul Fitri 1446 H, tahun 2025,” ujar Budi saat konferensi pers.

Dia menjelaskan, untuk mendukung proses pemantauan dan pengamanan selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025, akan dikerahkan sebanyak 146.268 personel gabungan dari Polri, TNI, dan sejumlah kementerian atau lembaga lainnya. Para personel, jumlahnya, akan ditempatkan di 2.894 pos pengamanan di sejumlah titik.

Selain itu, Pemerintah juga mempersiapkan perihal kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) selama arus mudik dan Lebaran 2025. Termasuk juga membuat sejumlah skenario

bagikan juga K/L lain. Untuk tahun ini, kami perkirakan jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran sebanyak 146,48 juta orang,” kata Menhub Dudy.

Menhub menekankan pula bahwa keselamatan pemudik adalah prioritas. “Kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Kita adalah pengelola transportasi sehingga saya menekankan keselamatan menjadi prioritas dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini,” tandas Menhub Dudy. ●



Mudik Kendaraan Pribadi

DISKON TARIF HINGGA GRATIS DI RUAS JALAN TOL

Sejumlah ruas jalan tol di Jawa dan Sumatera menyiapkan diskon tarif tol. Malah ada yang gratis pada saat tertentu. Namun, kondisi cuaca di sepanjang perjalanan juga memerlukan perhatian.

Untuk pengguna moda angkutan darat, termasuk kendaraan pribadi, pemerintah menerapkan diskon tarif tol di Jawa dan Sumatera sepanjang periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Beberapa ruas malah digratiskan pada periode tertentu.

Fasilitas diskon tarif dan tol gratis itu merupakan upaya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran. Selain memastikan kesiapan infrastruktur, Kementerian PU juga telah menyiapkan berbagai strategi yang dapat mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran kali ini.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan kesiapan in-

frastruktur jalan tol maupun jalan nasional dalam mendukung kelancaran mudik dan arus balik Lebaran 2025. Dalam paparannya pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI yang membahas Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Mudik Lebaran 2025 di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025, Menteri Dody menyampaikan bahwa panjang jaringan jalan tol yang siap beroperasi untuk arus mudik dan balik mencapai 3.020,5 km. Adapun untuk jalan nasional non tol sepanjang 47.604,34 km sudah mencapai kondisi mantap sebesar 95,22 persen.

"Kementerian PU memastikan jaringan jalan, baik tol maupun non tol, dalam kondisi optimal. Seluruh jalan nasional lintas utama kami pastikan dalam kondisi mantap dan layak dilalui," ungkap Men-

teri Dody.

Untuk antisipasi kondisi darurat selama musim mudik Lebaran, Kementerian PU telah menyiapkan 393 posko tanggap bencana yang dilengkapi dengan 440 unit alat berat serta 137 titik penempatan material strategis di lokasi rawan bencana. Menurut Menteri Dody, terdapat 298 titik rawan banjir dan 660 titik rawan longsor yang telah diidentifikasi dan akan mendapatkan perhatian khusus.

Menteri Dody juga telah menginstruksikan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar memastikan seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terpenuhi dengan baik. Hal ini mencakup kondisi perkerasan jalan utama, akses masuk-keluar tol, serta area gerbang tol



dalam kondisi prima.

"BUJT diminta untuk secara khusus meningkatkan layanan di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Kami ingin memastikan fasilitas tersebut dalam kondisi bersih, terawat, serta memiliki kapasitas parkir dan toilet yang memadai," ungkap Menteri Dody.

Saat ini terdapat 134 TIP di 75 ruas jalan tol operasional di seluruh Indonesia. Selama musim mudik Lebaran 2025, akan ada tambahan 192,85 km jalan tol operasional baru, termasuk 74,35 km jalan tol yang dioperasikan tanpa tarif, serta tambahan 118,5 km yang akan dibuka secara fungsional, di antaranya ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi (Gending-Paiton sepanjang 25 km).

Menteri Dody juga mengungkapkan bahwa sesuai kebijakan Presiden, terdapat 74,35 km jalan tol yang dibuka operasional tanpa tarif khusus selama masa mudik dan balik Lebaran tahun ini. Selain itu, Menteri Dody menegaskan rencana pemberlakuan diskon tarif di 18 ruas jalan tol. "Kita akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menentukan detail pelaksanaan diskon tarif di 74,35 km ruas jalan tol tertentu," jelasnya.

Menteri Dody berharap langkah-langkah tersebut dapat menjamin kelan-

caran dan kenyamanan masyarakat selama perjalanan mudik Lebaran 2025. Untuk itu segenap jajaran Kementerian PU juga siap mendukung program fasilitasi mudik Lebaran 2025.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Roy Rizali Anwar menegaskan, jajaran Kementerian PU sudah siap mendukung arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. "Pertama, Kementerian PU memastikan seluruh jalan nasional di lintas utama dalam kondisi mantap, tidak ada lubang, serta bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik. Kementerian PU juga memberlakukan

diskon tarif tol sebesar 20 persen dan memastikan terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan Minimal) dalam meningkatkan pelayanan jalan tol. Serta memfungsionalkan tambahan beberapa ruas jalan tol tanpa tarif dan tambahan Rest Area (TIP) operasional," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Roy Rizali Anwar yang mewakili Menteri PU Dody Hanggodo pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor bersama Kapolri terkait Kesiapan Menghadapi Idul Fitri 1446 H Tahun 2025, di Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Selain itu, sambung Roy, Kementerian PU juga akan terus berkoordinasi den-



• INFO KHUSUS

gan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, BMKG, BUJT dan K/L lain yang terkait untuk mendukung kelancaran lalu lintas. "Kementerian PU juga telah menyiapkan bencana untuk mengantisipasi kondisi darurat pada titik-titik rawan bencana di jalan tol dan jalan nasional. Kementerian PU juga telah mengidentifikasi 660 titik lokasi rawan longsor dan 298 titik lokasi rawan banjir pada ruas jalan nasional di seluruh Indonesia," jelas Dirjen Roy.

"Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga telah menyiapkan Disaster Relief Unit (DRU) berupa 440 unit alat berat dan 137 titik material seperti sand

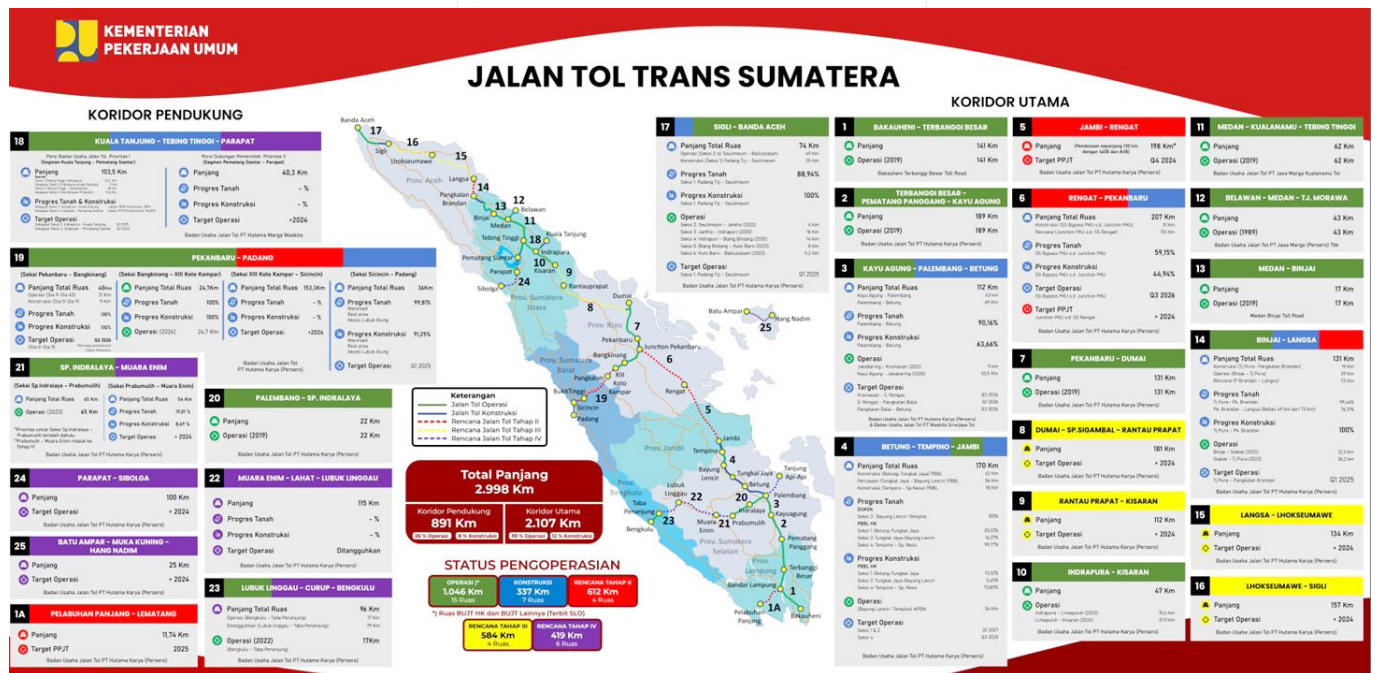
penambahan pengoperasian jalan tol sepanjang 192,85 km, dan tambahan 10 rest area operasional pada ruas jalan tol Trans Sumatera, dan tambahan 8 rest area fungsional di Trans Jawa dan Trans Sumatera," kata Dirjen Roy.

Ruas jalan tol yang akan operasional tanpa tarif dengan total panjang 74,35 km diantaranya, Jalan Tol Binjai - Langsa (ruas Tanjung Pura - Pangkalan Brandan), Jalan Tol Pekanbaru - Padang (ruas Padang - Sicincin), Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA (ruas Klaten - Prambanan), dan Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat (ruas Kuala Tanjung - Indrapura).

Sementara itu, ruas jalan tol yang fungsional dengan total panjang 118,5

ra PT Jasa Marga (Persero) memberikan potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk perjalanan menerus di Pulau Jawa, dari Jakarta menuju Semarang. Sedangkan BUMN PT Hutama Karya (Persero) juga menerapkan diskon serupa pada arus mudik dan balik Lebaran di seluruh ruas tol yang dikelolanya di Pulau Sumatera.

Melansir dari Antara, diskon tarif tol ini akan berlaku dalam dua periode, yaitu arus mudik pada 24-27 Maret 2025 dan arus balik pada 8-9 April 2025, untuk semua golongan kendaraan. Diskon tarif tol 20 persen akan diterapkan di sejumlah ruas tol di Pulau Jawa, yaitu: Tol Tangerang - Merak; Tol Jakarta - Cikampek, Tol Mohammed bin Zayed



bag, bronjong, jembatan bailey, sheet pile, dan lain-lain. Selain itu, Ditjen Cipta Karya telah menyiapkan sarana prasarana tanggap darurat sejumlah 459 unit, seperti mobil tangki air, truk angkut, dan mobil toilet kabin. Untuk Ditjen Sumber Daya Air telah menyiapkan sejumlah 755 alat berat, diantaranya excavator, dump truck, truck crane, dan mobil tangki air," tambah Dirjen Roy.

Dirjen Roy juga mengemukakan, saat ini panjang jaringan jalan nasional di seluruh Indonesia adalah 47.604,34 km dengan persentase kemandirian jalan 95,22 persen. Sementara itu, panjang jalan tol yang operasi adalah 3.020,5 km. "Selama masa mudik Lebaran Tahun 2025, Kementerian PU akan melakukan

km meliputi Jalan Tol Sigli - Banda Aceh (ruas Padang Tiji - Seulimeum), Jalan Tol Japek II Selatan (ruas Bojongmangu - Sadang), Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (ruas Gending - Paiton), Jalan Tol Palembang - Betung (ruas Rengas - Pangkalan Balai), dan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA (ruas Prambanan - Tarmansartani).

"Terkait pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen, berlaku untuk semua golongan kendaraan yang melakukan perjalanan jarak jauh (barrier gate to barrier gate) pada 17 ruas jalan tol di Trans Jawa dan Trans Sumatera," jelas Dirjen Roy.

Rincian informasi dari operator jalan tol menyebutkan, Badan Usaha Milik Nega-

(MBZ), Tol Cikampek - Palimanan, Tol Palimanan - Kanci, Tol Kanci - Pejagan, Tol Pejagan - Pemalang, Tol Pemalang - Batang, Tol Batang - Semarang, Tol Semarang ABC

Sedangkan, berdasarkan informasi dari situs resmi Hutama Karya, diskon tarif tol 20 persen dengan jarak terjauh akan diberikan kepada pengguna jalan yang melintasi Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Terpeka), Tol Indralaya - Prabumulih (Indraprabu), Tol Pekanbaru - Dumai (Permai), dan Tol Indrapura - Kisaran (Inkis)

Selain itu, anak perusahaan PT Hutama Karya Waskita (HMW) juga akan menerapkan potongan tarif yang sama untuk Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi

- Parapat (Kutepat). Diskon tarif ini hanya berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan transaksi menggunakan uang elektronik (e-toll).

Selain hanya berlaku untuk pengguna e-toll, pengguna pun perlu memperhatikan jadwal pemberlakuan diskon sesuai dengan periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Untuk arus mudik, diskon tarif berlaku pada 24 Maret 2025 pukul 05.00 WIB hingga 28 Maret 2025 pukul 05.00 WIB. Sedangkan pada arus balik, masa diskon tarif tol berlaku pada 8 April 2025 pukul 05.00 WIB hingga 10 April 2025 pukul 05.00 WIB.

BUMN Utama Karya juga mengusulkan kepada pemerintah dan kepolisian untuk mengoperasikan sejumlah ruas tol secara fungsional selama periode mudik. Ruas-ruas tol fungsional tanpa tarif itu meliputi ruas Sigli - Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji - Seulimeum) sepanjang 23,95 km, Ruas Sicincin - Padang sepanjang 35,90 km, dan Ruas Palembang - Betung Seksi 1-2 (Rengas - Pangkalan Rimo - Pangkalan Balai) sepanjang 33,62 km.

Ruas-ruas tol ini akan beroperasi secara fungsional tanpa tarif mulai 20 Maret hingga 10 April 2025 dengan jam operasional tertentu, menyesuaikan kondisi lalu lintas serta berdasarkan diskresi kepolisian. Selain itu, agar perjalanan lebih lancar, pengguna jalan tol diimbau untuk memastikan kecukupan saldo e-toll sebelum melakukan perjalanan agar tidak mengalami kekurangan saldo yang dapat menyebabkan antrean di gerbang tol. Yang tak kalah penting, para pengguna tol mengatur waktu perjalanan dengan bijak, menghindari perjalanan di jam-jam favorit yang diprediksi menjadi puncak arus mudik dan arus balik.

Meski Kementerian PU sudah siaga untuk persiapan infrastruktur, para pemudik perlu pula mengantisipasi dan menyiapkan mitigasi terkait dengan kondisi cuaca sepanjang periode arus mudik dan balik tahun ini. Alasannya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi beberapa wilayah di Pulau Jawa hingga Sumatera bakal diguyur hujan pada periode mudik lebaran 2025.

Ketua BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, dari hasil pemantauan cuaca yang dilakukan, terdapat potensi hujan deras

pada periode 20-26 Maret 2025. "Secara resolusi lebih tinggi di sini kita melihat pada 20 hingga 26 Maret, ada zona-zona atau titik-titik yang merah, yaitu potensi hujan lebat," ujar Dwikorita saat presentasi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa, 11 Maret 2025.

"Itu ada di Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) itu lokasinya. Kami sebutkan di dalam wilayah mana saja, misalnya di Sumatera Selatan, Bengkulu," katanya lagi.

gan intensitas sedang. "Dimungkinkan pula hujan dengan intensitas sedang. Itu hampir di sebagian besar wilayah-wilayah tersebut," ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Dwikorita mengungkapkan bahwa BMKG rutin menyampaikan informasi prakiraan cuaca setiap tiga jam sekali. Malah BMKG juga menyampaikan prakiraan cuaca di suatu wilayah selama enam hari ke depan.

Namun, menurut dia, informasi mengenai prakiraan cuaca bahkan peringa-



Selain di sejumlah daerah itu, menurut Dwikorita, BMKG juga memperkirakan bahwa hujan lebat berpotensi mengguyur wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel). "Kepulauan Babel, Jabar Jateng dan juga pada tanggal tersebut dimungkinkan pula hujan dengan intensitas sedang. Itu hampir sebagian besar wilayah," ungkap Ibu Kepala BMKG yang biasa disapa Rita itu.

Lebih lanjut, Bu Rita menyampaikan bahwa pada periode 27 Maret-2 April 2025 masih terdapat potensi hujan den-

tan dini dari dari BMKG seringkali masih diabaikan dan diacuhkan oleh publik. "Kami cek di lokasi perumahan sudah dikeluarkan siaga, siaga. Artinya peringatan dini diterima. Namun, persoalannya barangkali publik tidak bisa membayangkan seperti apa hujan sedang, hujan lebat seperti apa," kata Dwikorita.

Dengan begitu, lanjut Bu Rita, BMKG berupaya menyempurnakan sajian informasinya. "Kadang-kadang mungkin diremehkan peringatan dini yang sudah diterima," ujarnya. • Editor: GE



MUDIK DAN KOMPLEMEN PARIWISATA

Pergerakan arus mudik dan arus balik melekat pula dengan sisi pariwisata. Baik cakupan perjalanan, akomodasi, kuliner, belanja produk ekonomi kreatif setempat bahkan ziarah. Bagaimana dengan sisi pariwisata mudik lebaran 2025?

Kondisi cuaca ekstrem musim penghujan memang membayangi arus mudik dan arus balik pada Lebaran 2025 kali ini. Di depan Komisi V DPR RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengemukakan antara lain cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi pada Maret 2025 yang bertautan dengan pergerakan arus mudik dan arus balik Lebaran.

"Bahwa kondisi cuaca di bulan Maret itu masih dimungkinkan terjadinya cuaca ekstrem," kata Dwikorita dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Selasa, 11 Maret 2025.

Menurut Rita, sapaan ringkas Kepala BMKG, pada 20 hingga 26 Maret zona-zona atau titik-titik berpotensi mengalami hujan lebat, antara lain ada di Jawa Barat. Selain Jabar, sambungnya, wilayah lain pun diprediksi akan hujan lebat. Antara lain Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jawa Tengah (Jateng).

Dia mengatakan cuaca ekstrem mulai membaik di awal April. Pada periode 27 Maret sampai 2 April 2025 diprediksi hujan dengan intensitas ringan dan sedang akan turun di sejumlah wilayah. Kemudian, pada periode 3-9 April 2025, akan terjadi hujan dengan intensitas lebat, ringan dan sedang. Dwikorita mengatakan hujan lebat itu diprediksi terjadi di sebagian wilayah Sulawesi bagian utara.

"Sepuluh hari pertama bulan April saat arus balik cuaca sudah semakin membaik meskipun masih berpotensi terjadi hujan, curah hujan dengan intensitas menengah," ungkapnya.

Mengingat kondisi ini, Bu Kepala BMKG menyatakan lembaganya akan melakukan penyebaran informasi dan peringatan dini yang lebih masif. Meskipun demikian, ia menambahkan bahwa risiko cuaca ekstrem diprediksi akan menurun pada sepuluh hari pertama bulan April, meskipun curah hujan dengan intensitas menengah masih akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Selain itu, Dwikorita juga menyampaikan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai informasi curah hujan. Tujuannya agar informasi kondisi cuaca lebih mudah dipahami.

Lebih lanjut Dwikorita menyampaikan informasi mengenai potensi gelombang tinggi dengan ketinggian 2 hingga 2,5 meter yang berisiko terjadi di wilayah Samudera Hindia dan pesisir Pantai Samudera Hindia, seperti di bagian selatan Sumatera dan Jawa.

Ia juga mengemukakan informasi peringatan potensi banjir yang dapat terjadi pada periode 29 Maret hingga 27 April di wilayah pesisir, seperti Pantura, serta daerah pantai di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Maluku. Tak hanya itu, BMKG juga memberikan informasi mengenai potensi bencana longsor di beberapa daerah yang akan terus dipantau dan diinformasikan setiap hari.

Dengan prakiraan kondisi cuaca dan dampaknya pada periode mudik dan arus balik, Rita menegaskan BMKG akan

terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca, serta memperkuat kesiagaan dalam menghadapi potensi bibit siklon.

Untuk itu, BMKG berencana untuk terus memperbesar penyebaran informasi mitigasi dan sosialisasi. Selain itu, BMKG juga akan terus menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait guna melakukan antisipasi terhadap bencana maupun kemacetan selama masa Mudik Lebaran 2025 mendatang.

Melalui antisipasi dan persiapan mitigasi menghadapi cuaca ekstrem, maka sisi pariwisata di masa mudik, semoga saja tidak terganggu. Harap maklum, Kementerian Pariwisata pun sudah memproyeksikan 111 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) selama periode libur Lebaran 2025. Beriringan dengan itu, pemerintah telah menetapkan libur sekolah dan madrasah pada 21 Maret–8 April 2025. Sementara itu, ASN juga mendapatkan fleksibilitas kerja berdasarkan Surat Edaran Menpan RB No. 2 Tahun 2025, yang menetapkan kebijakan Flexible Working Arrangement pada 24–27 Maret 2025.

Nah, pada masa liburan mudik dan arus balik, Kementerian Pariwisata memproyeksikan mayoritas pergerakan wisatawan nusantara akan berfokus pada Pulau Jawa sebanyak 70 persen dan 30 persen di luar Pulau Jawa. "Kita berharap ini bisa menggerakkan pesawat, bisa membuat kita mencapai target perjalanan bisnis 1,08 miliar pergerakan. Yang jelas, menurut data, perkiraan pergerakannya ada 111 juta pergerakan wisatawan nusantara di Lebaran tahun ini. Itu sudah menjadi target kita di Kementerian Pariwisata," kata Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa kepada wartawan di Gedung DPR RI, di sela Rapat Kerja membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisata bersama dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, 11 Maret 2025.

Dalam kesempatan sama, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri mengatakan telah berkoordinasi secara nasional dengan Polri. Koordinasi ini menghasilkan rencana operasi ketupat demi mengantisipasi lonjakan wisatawan di destinasi wisata ketika libur Lebaran nanti. "Saya rasa persiapannya sudah cukup baik, operasi ketupat nanti tanya sama Polri saja. Pastinya di destinasi wisata seju-

lah 4.600 itu termasuk akan dilakukan operasi ini," kata Widi.

Kementerian Pariwisata juga menyambut baik kebijakan diskon tarif angkutan udara domestik pada periode mudik dan arus balik Lebaran 2025. "Dengan harapan bahwa diskon tiket pesawat akan meningkatkan mobilitas wisatawan nusantara, terutama dalam menyambut libur Lebaran 1446 H. Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan momen mudik untuk berwisata dan menjelajahi destinasi baru di Indonesia," ungkap Menteri Widi pada awal Maret 2025.

Kebijakan diskon tarif pesawat ini berlaku untuk tiket kelas ekonomi di seluruh Indonesia, dengan masa berlaku perjala-

meningkatkan kapasitas penumpang melalui penambahan layanan kereta api, penerbangan, serta pembukaan rute domestik baru. Diharapkan, kampanye ini tidak hanya meningkatkan pengalaman berwisata masyarakat selama mudik Lebaran 2025, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan perputaran ekonomi, khususnya dari sektor pariwisata.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengalaman masyarakat selama periode mudik dan berwisata, Kementerian Pariwisata juga meluncurkan kampanye #MudikYuk dan #LebarandiJakartaAja untuk meningkatkan minat wisatawan melakukan perjalanan wisata selama libur Lebaran 2025. Melalui publikasi promo paket wisata menarik, kampanye ini bertujuan mendorong



nan mulai 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Pembelian tiket dapat dilakukan mulai 1 Maret 2025, memberikan kesempatan dan memudahkan masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik atau berwisata di Indonesia dengan biaya yang lebih terjangkau.

Kemenpar mendorong pula agar pelaku industri pariwisata untuk memberikan berbagai promo tambahan. Selain diskon tiket pesawat, hal yang sama dapat diterapkan pada tiket kereta api, akomodasi, serta paket wisata. "Promo yang diberikan tidak hanya berpotensi menjadi daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menteri Pariwisata Widi.

Selain itu Menteri Widi mengapresiasi penyedia jasa transportasi yang telah

pencapaian target 1,08 miliar perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2025. Ini juga merupakan bagian dari kampanye besar #DiIndonesiaAja dan program Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI).

Kampanye #MudikYuk dirancang untuk mengajak masyarakat menjelajahi destinasi wisata di Indonesia, terutama di sekitar kampung halaman mereka. Sementara itu, #LebarandiJakartaAja ditujukan bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang tidak mudik atau masyarakat yang menjadikan Jakarta sebagai destinasi mereka berwisata, untuk menikmati liburan di ibu kota. Kedua kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan minat berwisata selama musim mudik Lebaran, dengan menawarkan paket wisata Lebaran hasil kolaborasi dengan mitra

industri pariwisata.

Bekerja sama dengan BUMN, asosiasi pariwisata, dinas pariwisata, pelaku industri, serta pemangku kepentingan terkait, Kementerian Pariwisata mendukung promosi paket wisata yang telah terkurasi dapat diakses melalui media sosial Kementerian Pariwisata, laman khusus di situs Indonesia.travel, serta QR code pada banner yang dipasang di bandara, stasiun, dan pusat perbelanjaan.

Selama bulan Ramadan, Kementerian Pariwisata aktif mempromosikan destinasi wisata melalui media sosial, menyoroti tradisi budaya, kuliner khas, serta destinasi menarik yang bisa dikunjungi selama Ramadan dan Lebaran.

Dari sisi pengusaha industri hotel dan resto, bayang-bayang cuaca ekstrem pada Ramadan dan Lebaran menjadi tantangan tersendiri. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengemukakan cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir

pergerakan wisatawan nusantara itu akhirnya. Tapi sampai saat ini kita masih optimistis itu bisa ada dampaknya," ujarnya.

Untuk mencapai target sesuai dengan harapan, kata dia, para pelaku usaha terus melakukan promosi di masing-masing daerah untuk mendatangkan lebih banyak pengunjung. Selain itu, Maulana menyebut bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, utamanya wilayah-wilayah yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrem.

Dalam hal ini, PHRI mendorong pemerintah agar segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah titik yang terdampak agar dapat diakses oleh masyarakat pada saat libur Lebaran. Ia berharap, perbaikan jalan dapat segera rampung sebelum masyarakat melaksanakan mudik Lebaran. "Karena kalau perbaikan jalan tidak bisa diselesaikan, itu akan berdampak banyak hal (terkait) terhambatnya pergerakan orang," ujar

musala, serta tempat perawatan kendaraan atau bengkel darurat.

Dalam menghadapi terjadinya potensi bencana, memerlukan dukungan dan kerja bersama untuk memastikan keamanan pemudik. Dalam upaya mengurangi kepadatan lalu lintas, strategi pengaturan perjalanan telah disiapkan, salah satunya melalui kebijakan diskon tarif tol yang akan diterapkan pada periode tertentu untuk mengurangi kemacetan. Selain itu, pemerintah juga telah membahas ketersediaan BBM untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik.

"Kita sangat ingin Idul Fitri bisa lancar, aman, nyaman, dan selamat. Tantangan yang kita hadapi tidak pernah menurun, justru meningkat. Oleh karena itu, kewaspadaan akan terus kita lakukan," ujar Menko PMK Pratikno dalam Rapat Koordinasi Persiapan Idul Fitri 1446 H di Auditorium Mutiara, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Senin, 10 Maret 2025.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan pemudik. Fasilitas kesehatan telah disiapkan dengan menyiagakan tenaga medis di berbagai posko kesehatan dan Public Safety Centre (PSC) yang tersebar di jalur-jalur mudik. Selain itu, Menko PMK juga menekankan pentingnya pengecekan kesehatan bagi pengemudi angkutan umum, mengingat banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelelahan dan kondisi fisik pengemudi.

"Untuk mewujudkan keselamatan, harus ada fasilitas kesehatan. Kita sudah mengecek dan juga telah mendiskusikan mengenai pengecekan pengemudi angkutan umum, karena banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi pengemudi," ujar Menko PMK.

Untuk meningkatkan kenyamanan dan pemerataan layanan transportasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengembangkan aplikasi terpadu Lintas Kementerian/Lembaga dan Pihak Swasta bernama Nusantara Hub untuk layanan mudik gratis.

Akhirnya selamat mudik Lebaran 2025. Semoga selamat di perjalanan dan mencapai lokasi tujuan. Sampai jumpa setelah kembali dari arus balik. Dengan pengalaman yang membahagiakan. • Editor: GE



ini telah menghambat beberapa akses jalan di sejumlah titik.

Beberapa destinasi di Indonesia juga kemungkinan terdampak imbas cuaca buruk sehingga ini menjadi tantangan bagi para pelaku usaha di industri ini. Tambahan pula, sambung Maulana, masyarakat yang menjadi korban bencana akibat curah hujan yang cukup besar kemungkinan akan menahan diri untuk melakukan perjalanan.

"Jadi, kita mesti melihat lagi ke depan apakah hal-hal ini akan mengganggu

Maulana.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, kesiapan sarana dan prasarana untuk arus mudik dan balik Lebaran 2025 menjadi perhatian utama. Ia menyebutkan, rest area di jalur mudik akan diperkuat sebagai daya dukung mengurangi risiko kemacetan. Posko mudik juga akan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih inklusif, termasuk jumlah toilet perempuan memadai, ruang laktasi, area bermain anak,

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



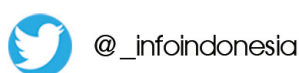
*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786



INOVASI **UNTUK** NEGERI
info indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #53 MARET 2025



SUMSEL
SIAP **GO INTERNATIONAL**